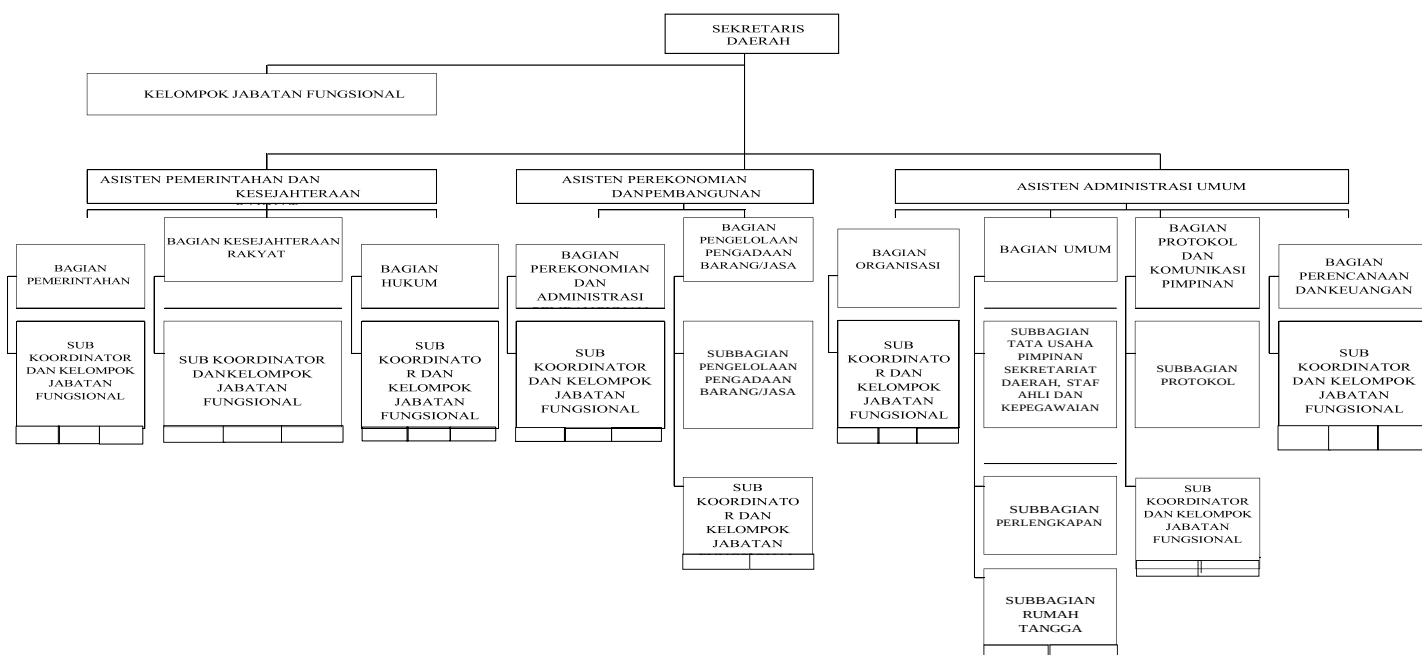


1.4 Data Umum Perangkat Daerah

Sekretariat Daerah Kabupaten Luwu Timur dibentuk berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Luwu Timur Nomor 2 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Daerah, Sekretariat Dewan Perwakilan Daerah, dan Staf Ahli Pemerintah Kabupaten Luwu Timur, selanjutnya dilakukan beberapa revisi terakhir dengan diterbitkannya Peraturan Daerah Nomor 08 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah dan tahun 2021 dilakukan perubahan kelembagaan Sekretariat Daerah yang dibentuk berdasarkan Peraturan Bupati Nomor 53 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Sekretariat Daerah Kabupaten Luwu Timur. (Struktur Organisasi Terlampir) yang terdiri dari : 1 (satu) Sekretaris Daerah, 3 (tiga) Asisten, 9 Bagian, 5 SubBagian, 8 SubKoordinator dan Kelompok Jabatan Fungsional serta Kelompok Jabatan Fungsional yang dapat diuraikan susunan organisasi Sekretariat Daerah sebagai berikut :

Gambar 1.1
BAGAN STRUKTUR ORGANISASI
SEKRETARIAT DAERAH KABUPATEN LUWU TIMUR



1.4.1 Jumlah PNS

Pada Tahun 2022 Jumlah PNS pada Sekretariat Daerah Luwu Timur sebanyak 81 orang dan 81 Tenaga Upah Jasa. pada Tabel 1.1 disajikan data Jumlah Pegawai berdasarkan kualifikasi Pendidikan, Pangkat dan Golongan, dan pada Tabel 1.2 disajikan data Jumlah Pejabat Struktural/Eselon berdasarkan kualifikasi Pendidikan dan Jenis Kelamin dan Tabel 3.1 disajikan data Jumlah Fungsional berdasarkan kualifikasi Pendidikan dan Jenis Kelamin.

Tabel 1.1

**Jumlah Pegawai Berdasarkan Kualifikasi Pendidikan, Pangkat dan Golongan
Pada Sekretariat Daerah Kabupaten Luwu Timur Tahun 2022**

No.	Golongan	Jumlah Pegawai Kualifikasi Pendidikan												Total	
		S3/S2		S1/DIV		D1-D3		SLTA/ Sederajat		SMP/ Sederajat		SD/ Sederajat			
		L	P	L	P	L	P	L	P	L	P	L	P	L	P
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)
1	IV	4	3	4	2	-	-	-	-	-	-	-	-	8	6
2	III	1	5	25	15	4	2	1	-	-	-	-	-	31	22
3	II	-	-	-	-	-	1	1	6	-	-	-	-	1	7
4	I	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	1	0
5	CPNSD	-	-	2	3	-	-	-	-	-	-	-	-	2	3
6	Upah Jasa	-	-	7	8	-	-	45	10	3	-	2	6	43	38

Sumber : Kepegawaian Sekretariat Daerah Tahun 2022

Tabel 1.2

**Jumlah Pejabat Struktural/Eselon berdasarkan kualifikasi Pendidikan dan Jenis
Kelamin Sekretariat Daerah Kabupaten Luwu Timur Tahun 2022**

No.	Pejabat Struktural/ Eselon	Jumlah Pegawai Kualifikasi Pendidikan												Total	
		S3/S2		S1/DIV		D1-D3		SLTA/ Sederajat		SMP/ Sederajat		SD/ Sederajat			
		L	P	L	P	L	P	L	P	L	P	L	P	L	P
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)
1	IIa	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-
2	IIb	2	1	1	1	-	-	-	-	-	-	-	-	3	2
3	IIIa	0	2	4	2	-	-	-	-	-	-	-	-	4	4
4	IVa	0	0	3	1	-	-	-	-	-	-	-	-	3	1
	Jumlah	4	4	7	5	-	-	-	-	-	-	-	-	11	9

Sumber : Kepegawaian Sekretariat Daerah Tahun 2022

Berdasarkan Struktur Organisasi Pada Sekretariat Daerah Pejabat Struktural/Eselon terdiri 1 (satu) Sekretaris Daerah, 3 (tiga) Orang Asisten, 8 Orang Kepala Bagian dan 4 kepala Sub Bagian, pada Tahun 2022 Jumlah Pejabat Struktural/Eselon sebanyak 20 Orang yang terdiri dari **Eselon IIa**, 1 (satu) orang pendidikan S3, **Eselon IIb**, 4 (empat) orang pendidikan S2, 1 (satu) orang Pendidikan S1, **Eselon IIIa**, 2 (dua) orang pendidikan S2, 6 (enam) orang pendidikan S1, **Eselon IVa**, 4 (empat) orang pendidikan S1, sesuai Dengan tabel di atas.

Tabel 1.3
Jumlah Pejabat Fungsional berdasarkan kualifikasi Pendidikan dan Jenis Kelamin
Pada Sekretariat Daerah Kabupaten Luwu Timur Tahun 2022

No.	Pejabat Fungsional	Jumlah Pegawai Kualifikasi Pendidikan												Total	
		S3/S2		S1/DIV		D1-D3		SLTA/ Sederajat		SMP/ Sederajat		SD/ Sederajat			
		L	P	L	P	L	P	L	P	L	P	L	P	L	P
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)
1	Pengelola Pengadaan barang dan Jasa	-	-	6	1	-	-	-	-	-	-	-	-	6	1
2	Fungsional Penyetaraan	-	2	13	6	-	-	-	-	-	-	-	-	13	8
	Jumlah	-	2	19	7	-	-	-	-	-	-	-	-	19	9

Sumber : Kepegawaian Sekretariat Daerah Tahun 2022

Jumlah Pejabat fungsional pada Sekretariat Daerah sebanyak 28 Orang terdiri dari 7 Orang Fungsional Pengelolaan Barang dan Jasa dan 21 Orang Fungsional Penyetaraan.

1.4.2 Target dan Realisasi Pendapatan Menurut Jenis Pendapatan

Target dan realisasi Pendapatan menurut jenis Pendapatan Tahun Anggaran 2021 pada Sekretariat Daerah disajikan sebagai berikut :

Tabel 2.1
Target dan Realisasi Pendapatan
Sekretariat Daerah Tahun 2022

No.	Uraian	Anggaran Perubahan (Rp)	Realisasi (Rp)	%
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
A.	PENDAPATAN ASLI DAERAH	112.529.000,00	122.079.000,00	108,48
1	<i>Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah- Penyewaan Tanah dan Bangunan</i>	<i>52.529.000,00</i>	<i>55.779.000,00</i>	<i>106,18</i>
	- Sewa Tanah (ATM dan Media Reklame)	52.529.000,00	55.779.000,00	106,18
2	<i>Retribusi Penyewaan Bangunan</i>	<i>60.000.000,00</i>	<i>66.300.000,00</i>	<i>110,50</i>
	- Mess Pemda Jakarta	0,00	0,00	0,00
	- Mess Pemda Makassar	50.000.000,00	47.300.000,00	94,60
	- Sewa Gedung	10.000.000,00	19.000.000,00	190,00

Sumber : LRA Sekretariat Daerah Tahun 2022

Target Pendapatan Asli Daerah pada Sekretariat Daerah tahun 2022 Rp112.529.900,00 dengan Realisasi Rp122.079.000,00 dengan capaian 108,48%. Realisasi Pendapatan melebihi target dikarenakan permintaan penyewaan gedung oleh masyarakat mengalami kenaikan sedangkan penyewaan terhadap Mess Pemda Jakarta tidak ditetapkan target karena sedang dilakukan proses pembangunan.

1.4.3 Target dan Realisasi Belanja Menurut Jenis Belanja

Target dan realisasi Belanja Tahun Anggaran 2022 pada Sekretariat Daerah disajikan sebagai berikut :

Tabel 2.2
Target dan Realisasi Belanja
Sekretariat Daerah Tahun 2022

No.	Uraian	Anggaran Perubahan (Rp)	Realisasi (Rp)	%
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
	BELANJA	74.270.997.414,00	66.489.774.927,81	89,52
1	Belanja Operasi	67.327.650.813,00	61.175.544.710,00	90,86
	Belanja Pegawai	11.140.311.522,00	10.798.847.908,00	96,93
	Belanja Barang dan Jasa	41.954.339.291,00	38.597.696.802,00	92,00
	Belanja Hibah	11.245.000.000,00	9.245.000.000,00	82,81
	Belanja Bantuan Sosial	2.988.000.000,00	2.534.000.000,00	76,54
2	Belanja Modal	6.943.346.601,00	5.314.230.217,81	98,56
	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	3.903.116.601,00	3.030.250.829,00	77,64
	Belanja Modal Gedung dan Bangunan	3.040.230.000,00	2.283.979.388,81	75,13

Sumber : LRA Sekretariat Daerah Tahun 2022

Anggaran Perubahan Pada Sekretariat Daerah Tahun 2022 sebesar **Rp74.270.997.414,00** dengan Realisasi **Rp66.489.774.927,81** dengan capaian 89,52 %. yang terdiri dari Belanja Operasi **Rp67.327.650.813,00** dengan Realisasi **Rp61.175.544.710** dengan capaian 90,86% dan Belanja Modal **Rp6.943.346.6010** dengan realisasi **Rp5.314.230.217,81** dengan Capaian 89,52%.

BAB III**HASIL PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN YANG MENJADI KEWENANGAN PERANGKAT DAERAH****A. URUSAN PENUNJANG
URUSAN ADMINISTRASI PEMERINTAHAN
SEKRETARIAT DAERAH****1. TUJUAN DAN SASARAN****Tabel 3.1**

Target dan Realisasi Indikator Kinerja Utama (IKU) Sekretariat Daerah Tahun 2022

SASARAN	INDIKATOR KINERJA	TARGET	REALISASI	CAPAIAN (%)
Meningkatnya Akuntabilitas Pencapaian Kinerja dan Penyelenggaraan Urusan Sekretariat Daerah	Nilai SAKIP Sekretariat Daerah	66,84%	70,18%	105,00%
	Persentase rata-rata Capaian Kinerja Program Sekretariat Daerah	93,33%	88,39%	94,71%

Sumber: Sekretariat Daerah Tahun 2022

Dari pencapaian kinerja Indikator Kinerja Utama (IKU) diatas dapat diuraikan sebagai berikut :

Sasaran**Meningkatnya Akuntabilitas Pencapaian Kinerja dan Penyelenggaraan Urusan Sekretariat Daerah**

Sasaran Sekretariat Daerah memiliki 2 (dua) Indikator Kinerja yang mendukung tercapainya sasaran perangkat daerah yakni:

- a. Nilai SAKIP Sekretariat Daerah

Tabel 3.2

Nilai Lakip Sekretariat Daerah Tahun 2020 dan 2021

NO	UNIT KERJA	TAHUN 2020		TAHUN 2021	
		Nilai	Kategori	Nilai	Kategori
	Sekretariat Daerah	64,25	B	70,18	BB

Sumber: Inspektorat Kab.Luwu Timur

Dari Tabel di atas menunjukkan Nilai Sakip Sekretariat Daerah mengalami peningkatan dari Tahun 2020, hal ini dapat dilihat dari peningkatan hasil evaluasi atas akuntabilitas kinerja Sekretariat Daerah yang mencakup 5 (lima) komponen besar yaitu manajemen kinerja, yaitu Perencanaan Kinerja; Pengukuran Kinerja; Pelaporan Kinerja; Evaluasi Kinerja; dan Capaian Kinerja.

Diagram 3.1
Perbandingan Nilai LAKIP Sekretariat Daerah



b. Persentase rata-rata Capaian Kinerja Program Sekretariat Daerah

Untuk mencapai sasaran strategis diukur dengan menggunakan indikator sasaran strategis yang telah ditetapkan secara formal, sehingga akan diperoleh informasi kinerja yang penting dan diperlukan dalam menyelenggarakan manajemen kinerja secara baik serta diperoleh ukuran keberhasilan dari pencapaian satu tujuan dan sasaran strategis organisasi.

Sekretariat Daerah Kabupaten Luwu Timur dalam mencapai Sasaran Strategis yang telah diuraikan di atas, melaksanakan 3 (tiga) Program yaitu:

1. Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
2. Program Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat
3. Program Perekonomian dan Pembangunan

Tabel 3.3
Pengukuran Indikator Kinerja Utama
Persentase Rata-rata Capaian Kinerja Program

NO	Uraian	REALISASI KINERJA TAHUN 2021 (%)	TARGET TAHUN 2022 (%)	REALISASI KINERJA TAHUN 2022 (%)	CAPAIAN KINERJA TAHUN 2022 (%)
1	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	91.20	100	90.20	90.20
2	Program Perekonomian dan Pembangunan	50	50	37.49	74.98
3	Program Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat	74.04	100	100	100
Persentase rata-rata Capaian Kinerja Program		71.75	93.33	75.90	81.32

Dari table di atas dapat dilihat bahwa terjadi peningkatan Realisasi Kinerja dari tahun 2021 ke tahun 2022 yakni dari 71.75% menjadi 75.90%, hal ini menunjukkan adanya perbaikan terhadap kekurangan yang mungkin terjadi pada tahun sebelumnya. Sekretariat

Daerah yang melaksanakan fungsi koordinasi dalam penyelenggaraan pemerintahan dengan 9 Bagian yakni Bagian Perencanaan dan Keuangan, Bagian Umum, Bagian Organisasi, Bagian Protokol dan Kepemimpinan, Bagian Hukum, Bagian Kesejahteraan Rakyat, Bagian Pemerintahan, Bagian Pengadaan Barang dan Jasa dan Bagian Ekonomi dan Pembangunan telah berkomitmen mewujudkan target kinerja yang diperjanjikan dalam Perjanjian Kinerja dengan memanfaatkan sumber daya dan sarana prasarana yang memadai.

2. PROGRAM DAN KEGIATAN

Capaian Program masing-masing dapat di lihat sebagai berikut:

1) Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota

Indikator kinerja outcome program ini adalah Persentase Penunjang urusan perangkat daerah berjalan sesuai standar dengan target kinerja 100% dan realisasi kinerja sebesar 90,20%.

Faktor pendukung capaian kinerja program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota adalah:

- a) Kegiatan Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah yang terdiri dari Sub Kegiatan Penyusunan dokumen perencanaan Perangkat Daerah, Koordinasi dan penyusunan RKA SKPD, Koordinasi dan penyusunan DPA SKPD, Evaluasi kinerja Perangkat Daerah dimana kegiatan ini menghasilkan dokumen Perencanaan dan penganggaran serta Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah. Kegiatan ini dilaksanakan oleh *Bagian Perencanaan dan Keuangan*.

Capaian Kinerja dari masing-masing sub kegiatan yang berkontribusi terhadap capaian kinerja kegiatan Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah adalah:

Tabel 3.4

Capaian kegiatan Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja perangkat Daerah Tahun 2022

No	Sub Kegiatan	Target	Realisasi	Capaian Kinerja (%)
1	Penyusunan dokumen perencanaan Perangkat Daerah	2 Dok	2 Dok	100
2	Koordinasi dan penyusunan RKA SKPD	2 Dok	2 Dok	100
3	Koordinasi dan penyusunan DPA SKPD	2 Dok	2 Dok	100
4	Evaluasi kinerja Perangkat Daerah	9 Dok	9 Dok	100
<i>Persentase Penyusunan dokumen perencanaan, penganggaran dan Evaluasi tepat waktu</i>		100%	100%	100

Sumber: Bagian Perencanaan dan Keuangan Setda Tahun 2022

- b) Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah yang terdiri dari sub kegiatan Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN, Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian, Verifikasi Keuangan SKPD serta Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD dengan realisasi kinerja 84,83%. Kegiatan ini dilaksanakan oleh *Bagian Perencanaan dan Keuangan*.

Capaian Kinerja dari masing-masing subkegiatan yang berkontribusi pada kegiatan ini adalah sebagai berikut adalah:

Tabel 3.5

Capaian kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat daerah Tahun 2022

No	Sub Kegiatan	Target	Realisasi	Capaian Kinerja (%)
1	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	84 Orang	83 Orang	98,00
2	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian, Verifikasi Keuangan SKPD	20 Kegiatan	20 Kegiatan	100
3	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	18 Dokumen	18 Dokumen	100
<i>Persentase rata-rata capaian kinerja administrasi keuangan perangkat daerah</i>		100%	84,83%	84,83

Sumber: Bagian Perencanaan dan Keuangan Setda Tahun 2022

- c) Kegiatan Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah kegiatan ini mencakup penatausahaan Barang milik Daerah pada SKPD dengan realisasi kinerja 100% di mana indikator dari sub kegiatan ini yaitu Jumlah laporan penatausahaan Barang Milik Daerah sebanyak 4 Laporan. Kegiatan ini dilaksanakan oleh *Bagian Perencanaan dan Keuangan*.
- d) Kegiatan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah. Kegiatan ini mencakup Pengadaan Pakaian Dinas beserta atribut kelengkapannya, pengolahan dan pendataan kepegawaian Sekretariat Daerah, Sosialisasi dan Bimbingan Teknis Perundang-undangan, dengan realisasi kinerja 76,75% hal ini disebabkan karena target untuk sub kegiatan sosialisasi tidak terpenuhi. Kegiatan ini dilaksanakan oleh *Bagian Umum*. Faktor pendukung capaian kinerja Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah adalah:

Tabel 3.6

Capaian kegiatan Administrasi Kepegawaian Perangkat daerah Tahun 2022

No	Sub Kegiatan	Target	Realisasi	Capaian Kinerja (%)
1	Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	12 Dok	12 Dok	100
2	Sosialisasi Perundang undangan	6 Orang	5 Orang	83,33
3	Bimbingan Teknis Perundang-undangan	21 Orang	20 Orang	95,24
<i>Persentase rata-rata capaian kinerja Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah</i>		100%	76,75%	76,75

Sumber: Bagian Umum Setda Tahun 2022

- e) Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah yang terdiri dari sub kegiatan Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor, Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor, Penyediaan Peralatan Rumah Tangga, Penyediaan Bahan Logistik Kantor, Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan, Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan, Fasilitas Kunjungan Tamu, Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD, Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD. Pada Kegiatan ini realisasi kinerja sebesar 105,00%. Hal ini disebabkan realisasi kinerja untuk Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD melebihi target. Kegiatan ini dilaksanakan oleh *Bagian Umum*. Capaian kinerja masing-masing subkegiatan yang mendukung Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah adalah:

Tabel 3.7
Capaian kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah Tahun 2022

No	Sub Kegiatan	Target	Realisasi	Capaian Kinerja (%)
1	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	9 Jenis	9 Jenis	100
2	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	9 Jenis	9 Jenis	100
3	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	11 Jenis	10 Jenis	90,91
4	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	8 jenis	8 jenis	100
5	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	9 Jenis	9 Jenis	100
6	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang- undangan	7330 Eks	7330 Eks	100
7	Fasilitasi Kunjungan Tamu	12.000 Orang	10.562 orang	88,02
8	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	650 Kali	684 kali	105,23
9	Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	50 Dok	50 Dok	100
<i>Persentase Rata-rata Capaian Kinerja Administrasi Umum Perangkat Daerah</i>		100%	105%	105

Sumber: Bagian Umum Setda Tahun 2022

- f) Kegiatan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah dengan realisasi kinerja sebesar 92,18% yang terdiri dari sub kegiatan Pengadaan Kendaraan Dinas, Pengadaan Mebel, Pengadaan Peralatan dan mesin Lainnya, pengadaan Gedung kantor dan bangunan lainnya. Kegiatan ini dilaksanakan oleh *Bagian Umum*. Faktor pendukung capaian kinerja Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah adalah:

Tabel 3.8
Capaian kegiatan Pengadaan Barang Milik Daerah
Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Tahun 2022

No	Sub Kegiatan	Target	Realisasi	Capaian Kinerja (%)
1	Pengadaan Kendaraan Dinas	4 Unit	3 Unit	75,00
2	Pengadaan Mebel	62 Unit	58 Unit	93,55
3	Pengadaan Peralatan dan mesin Lainnya	84 Unit	66 Unit	78,75
4	pengadaan Gedung kantor dan bangunan lainnya	2 Unit	2 Unit	100
<i>Persentase Barang Milik Daerah yang diadakan</i>		100%	92,18%	92,18

- g) Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah dengan realisasi kinerja sebesar 132.27% kegiatan ini terdiri dari sub kegiatan penyediaan jasa surat menyurat, Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik, Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor hal ini disebabkan target untuk Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor tidak tercapai. Kegiatan ini dilaksanakan oleh *Bagian Umum*. Faktor pendukung capaian kinerja Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah adalah:

Tabel 3.9
Capaian kegiatan Penyediaan Jasa
Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Tahun 2022

No	Sub Kegiatan	Target	Realisasi	Capaian Kinerja (%)
1	Penyediaan jasa surat menyurat	4000 surat	8672 surat	216,80
2	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	420 rek	420 rek	100
3	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	45 orang	42 orang	93,33
<i>Persentase Rata-rata Capaian Kinerja jasa penunjang urusan Pemerintah Daerah</i>		100%	132.27%	132.27

- h) Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah yang terdiri dari sub kegiatan Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan, Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan, Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya, Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya dengan realisasi kinerja sebesar 91,08% hal ini disebabkan karena target pada sub kegiatan Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya tidak tercapai Karena sebagian peralatan dan mesin pada Kantor Bupati/Sekretariat Daerah belum dilakukan pemeliharaan disebabkan kantor masih dalam proses pengerjaan Rehabilitasi. Kegiatan ini dilaksanakan oleh *Bagian Umum*. Capaian kinerja masing-masing subkegiatan yang mendukung Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah adalah:

Tabel 3.10
Capaian kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah
Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Tahun 2022

No	Sub Kegiatan	Target	Realisasi	Capaian Kinerja (%)
1	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	45 Unit	45 Unit	100
2	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	3 Unit	3 Unit	100
3	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	173 Unit	169 Unit	97,69
4	Pemeliharaan Meubel	126 Unit	126 Unit	100
5	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	10 Unit	10 Unit	100
<i>Persentase Barang milik daerah Penunjang urusan pemerintahan daerah yang terpelihara dengan baik (%)</i>		100%	91,08%	91,08

- i) Kegiatan Administrasi Keuangan dan Operasional Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah yang terdiri dari Sub Kegiatan Penyediaan Gaji dan Tunjangan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah, Penyediaan Pakaian Dinas dan Atribut Kelengkapan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah, Pelaksanaan Medical Check Up Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah, Penyediaan Dana Penunjang Operasional Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah. Realisasi kinerja sebesar 54,17% hal ini disebabkan target untuk pengadaan pakaian dinas Wakil Bupati tidak teraksana karena Jabatan Wakil Bupati

masih kosong, serta subkegiatan pelaksanaan medical checkup KDH/WKDH juga tidak terealisasi. Kegiatan ini dilaksanakan oleh *Bagian Umum*.

Capaian Kinerja masing-masing subkegiatan yang mendukung pendukung capaian kinerja Administrasi Keuangan dan Operasional Kepala Daerah dan Wakil kepala Daerah adalah:

Tabel 3.11

Capaian kegiatan Administrasi Keuangan dan Operasional
Kepala daerah dan Wakil kepala daerah Tahun 2022

No	Sub Kegiatan	Target	Realisasi	Capaian Kinerja (%)
1	Penyediaan Gaji dan Tunjangan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah	2 Orang	1 Orang	50
2	Penyediaan Pakaian Dinas dan Atribut Kelengkapan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah	16 pasang	8 pasang	50
3	Pelaksanaan Medical Check Up Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah	100 orang	0	0
4	Penyediaan Dana Penunjang Operasional Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah	4 keg	4 keg	100
<i>Persentase Laporan Administrasi Dana Operasional Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah</i>		100%	54,17%	54,17

- j) Kegiatan Fasilitas Kerumahtanggaan Sekretariat Daerah dengan realisasi kinerja sebesar 54,03%. Kegiatan ini terdiri dari sub kegiatan penyediaan kebutuhan rumah tangga Kepala Daerah, Wakil Kepala Daerah dan Sekretariat Daerah. Kegiatan ini dilaksanakan oleh *Bagian Umum*.

Faktor pendukung capaian kinerja Fasilitas Kerumahtanggaan Sekretariat Daerah adalah:

Tabel 3.12

Capaian kegiatan Fasilitas Kerumahtanggaan Sekretariat Daerah Tahun 2022

No	Sub Kegiatan	Target	Realisasi	Capaian Kinerja (%)
1	Penyediaan kebutuhan rumah tangga Kepala Daerah	3 Jenis	3 Jenis	100
2	Penyediaan kebutuhan rumah tangga Wakil Kepala Daerah	4 Jenis	1 Jenis	25
3	Penyediaan kebutuhan rumah tangga Sekretariat Daerah	7 Jenis	7 Jenis	100
<i>Persentase Pemenuhan Kebutuhan Rujab dan Mess</i>		100%	54,03%	54,03

- k) Kegiatan Penataan Organisasi dengan 2 (dua) Indikator yakni *Persentase OPD yang meningkat nilai SAKIP* dan Indikator *Persentase OPD yang menghasilkan inovasi pelayanan publik* masing-masing memiliki capaian kinerja dengan persentase capaian sebesar 82,05% dan 80,00%. Kegiatan ini terdiri dari 3 (tiga) Sub kegiatan yakni Pengelolaan Kelembagaan dan Analisis Jabatan, Fasilitas Pelayanan Publik dan Tata Laksana, Peningkatan Kinerja dan Reformasi Birokrasi, Monitoring, Evaluasi dan Pengendalian Kualitas Pelayanan Publik dan Tata Laksana, Koordinasi dan Penyusunan Laporan Kinerja Pemerintah Daerah. Kegiatan ini dilaksanakan oleh *Bagian Organisasi*.

Subkegiatan yang mendukung pendukung capaian kinerja Penataan Organisasi adalah:

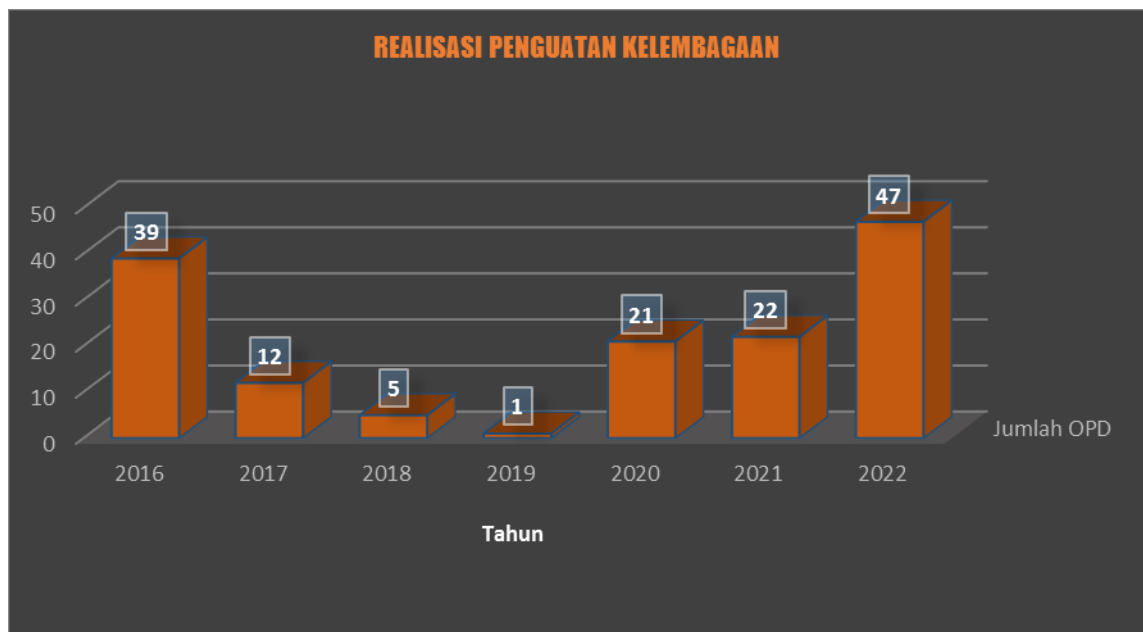
Tabel 3.13
Capaian Kinerja Penataan Organisasi Tahun 2022

	Sub Kegiatan	Target	Realisasi	Capaian Kinerja (%)
1	Pengelolaan Kelembagaan dan Analisis Jabatan	39 OPD	47	121
2	Fasilitasi Pelayanan Publik dan Tata Laksana	1 Kegiatan	0 Kegiatan	0
		10 OPD	4 OPD	40
3	Peningkatan Kinerja dan Reformasi Birokrasi	39 OPD	39 OPD	100
4	Monitoring, Evaluasi dan Pengendalian Kualitas Pelayanan Publik dan Tata Laksana	2 Laporan	2 Laporan	100
5	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Kinerja Pemerintah Daerah	1 Dok	1 Dok	100
<i>Persentase OPD yang meningkat nilai SAKIP</i>		31,71%	82,05%	82,05
<i>Persentase OPD yang menghasilkan inovasi pelayanan publik</i>		50%	40%	80

Sumber data : Bagian Organisasi SETDA Tahun 2022

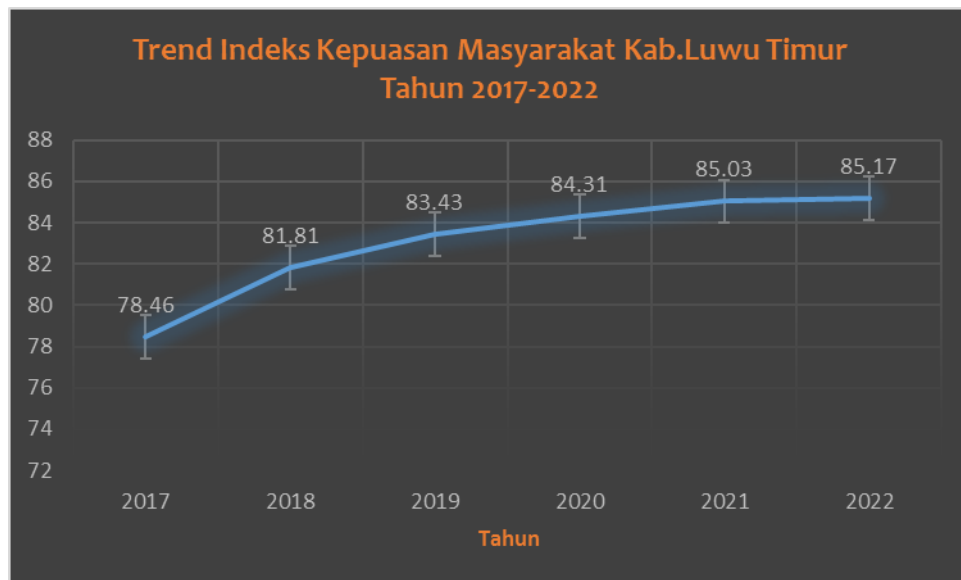
Berikut data realisasi capaian kinerja Penataan Organisasi dari Tahun 2016 s/d 2022 pada Tabel berikut :

Diagram 3.2
Pengelolaan Kelembagaan dan Analisis Jabatan Tahun 2016 s/d 2022



Sumber data : Bagian Organisasi SETDA Tahun 2022

Diagram 3.3
Fasilitasi Pelayanan Publik dan Tata Laksana Tahun 2017 s/d 2022



Sumber data: Bagian Organisasi Setda Tahun 2022

Survey Kepuasan Masyarakat pada Pemerintah Kabupaten Luwu Timur dilaksanakan berdasarkan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Reformasi Birokrasi Nomor 14 Tahun 2017 tentang Pedoman Penyusunan Survey Kepuasan Masyarakat unit pelayanan publik. Indeks Kepuasan Masyarakat Kabupaten Luwu Timur Tahun 2022 adalah 85,17 yang diperoleh dari 21 Unit Kerja Pelayanan Publik.

Diagram 3.4
Nilai LAKIP Kab.Luwu Timur Tahun 2016-2021



Sumber data : Bagian Organisasi SETDA Tahun 2022

- l) Kegiatan Pelaksanaan Protokol dan Komunikasi Pimpinan yang terdiri dari sub kegiatan Fasilitasi Keprotokolan, Fasilitasi Komunikasi Pimpinan, Pendokumentasian Tugas Pimpinan realisasi kinerja kegiatan ini mencapai target 100%. Kegiatan ini dilaksanakan oleh *Bagian Keprotokolan dan Komunikasi Pimpinan*.

Tabel 3.14

Capaian kegiatan Protokol dan Komunikasi Pimpinan Tahun 2022

No	Sub Kegiatan	Target	Realisasi	Capaian Kinerja (%)
1	Fasilitasi Keprotokolan	300 keg	300 keg	100
2	Fasilitasi Komunikasi Pimpinan	300 keg	300 keg	100
3	Pendokumentasian Tugas Pimpinan	300 keg	300 keg	100
<i>Jumlah Kegiatan Keprotokolan dan Komunikasi Pimpinan yang dihasilkan</i>		900	900	100

Sumber data : Bagian Prokopim SETDA Tahun 2022

2) PROGRAM PEMERINTAHAN DAN KESEJAHTERAAN RAKYAT

Indikator kinerja outcome program ini adalah Persentase Rekomendasi Kebijakan Bidang Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat yang ditindaklanjuti dan dilaksanakan dengan target kinerja 100% dan realisasi kinerja sebesar 100%, sehingga capaian kinerja dari Program Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat sebesar 100%

Subkegiatan pendukung capaian kinerja program Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat adalah sebagai berikut:

- a) Kegiatan Administrasi tata Pemerintahan. Kegiatan ini terdiri dari sub kegiatan Penataan Administrasi Pemerintahan, Pengelolaan Administrasi Kewilayahan, dan Fasilitasi Pelaksanaan Otonomi Daerah dengan capaian realisasi kinerja kegiatan 100%. Kegiatan ini dilaksanakan oleh *Bagian Pemerintahan*.

capaian kinerja dari masing-masing subkegiatan:

- Sub kegiatan Penataan Administrasi Pemerintahan melakukan monitoring administrasi Pemerintahan Kecamatan dan kelurahan serta memfasilitasi kasus-kasus pengaduan serta memfasilitasi penataan administrasi kelurahan dan kecamatan dengan target selama setahun 14, yang terdiri dari 11 kecamatan (Burau, Wotu, Angkona, Malili, Wasuponda, Nuha, Towuti, Tomoni, Tomoni Timur, Mangkutana dan Kalaena) dan 3 Kelurahan (Kel.Malili, Kel.Magani dan Kel. Tomoni).
- Sub kegiatan Pengelolaan Administrasi Kewilayahan memfasilitasi penyediaan dokumen penegasan batas wilayah, yang fokus kerjanya di wilayah batas desa, sesuai dengan amanat Peraturan Menteri Dalam Negeri (Permendagri 45 tahun 2016) terkait Pedoman Penetapan dan Penegasan Batas Desa. Target selama setahun sebanyak 30 Peta desa, 34 Peta Desa telah dibuatkan Peraturan Bupati di Bagian Hukum, meliputi 5 Desa di Kecamatan Angkona (Desa Balirejo, Maliwowo, Solo, Wanasari dan Watangpanua), 5 Desa di Kalaena (Argomulyo, Kalaena Kiri, Mekar Sari, Sumber Makmur dan Sumber Agung), 8 Desa di Kecamatan Tomoni (Desa Bangun Jaya, Bangun Karya, Beringin Jaya, Kalpataru, Mulyasri, Rante Mario, Sumber Alam dan Tadulako), 5 Desa di Kecamatan Tomoni Timur (Desa Alam Buana, Cendana Hitam Timur, Manunggal, Margomulyo dan Purwosari) dan 11 Desa di Wotu

(Desa Arolipu, Bahari, Bawalipu, Kalaena, Karambua, Lampenai, Madani, Rinjani, Tabaroge, Tarengge dan Desa Tarengge Timur.

- Sub kegiatan Fasilitasi Pelaksanaan Otonomi Daerah, kegiatan ini Merupakan subkegiatan yang memfasilitasi penyusunan dokumen penyelenggaraan Pemerintahan Daerah yang memuat Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (LPPD), Laporan Penerapan Standar Pelayanan Minimal tahun 2021 dan Ringkasan Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (RLPPD) Tahun 2021 melalui media massa dan media cetak. Pada tahun 2022, sebanyak 3 dokumen dan telah diselesaikan pada triwulan I dan II, sehingga untuk triwulan III dan IV, dilakukan melalui monitoring dan evaluasi LPPD, monitoring dan evaluasi SPM, reuvi EKPPD (Evaluasi Kinerja Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah) serta koordinasi dan supervisi terhadap laporan LPPD dan SPM.

Tabel 3.15

Capaian kinerja kegiatan Bagian Pemerintahan Setda Luwu Timur tahun 2022

No	Sub Kegiatan	Target	Realisasi	Capaian Kinerja (%)
1	Penataan Administrasi Pemerintahan	11 Kec.	14 Kec/Kel.	127
2	Pengelolaan Administrasi Kewilayahan	30 Peta	34 Peta	113
3	Fasilitasi Pelaksanaan Otonomi Daerah	3 Laporan	3 Laporan	100
<i>Jumlah administrasi tata pemerintahan yang dikelola (laporan)</i>		4	4	100

Sumber: Bagian Pemerintahan Setda Luwu Timur Tahun 2022

- b) Kegiatan Pelaksanaan Kebijakan Kesejahteraan Rakyat capaian kinerja 100 % yang terdiri dari Sub Kegiatan Fasilitasi Pengelolaan Bina Mental Spiritual, Pelaksanaan Kebijakan, Evaluasi dan Capaian Kinerja terkait Kesejahteraan Sosial dan Pelaksanaan Kebijakan, Evaluasi dan Capaian Kinerja terkait Kesejahteraan Masyarakat. Kegiatan ini dilaksanakan oleh *Bagian Kesejahteraan Rakyat*.

- Sub Kegiatan Fasilitasi Bina Mental Spiritual merupakan subkegiatan yang memfasilitasi Pemberangkatan Jamaah Haji Kabupaten, Wisata Religi, Pelaksanaan Hari-hari Besar Keagamaan, Kegiatan MTQ, Dukungan Pembayaran petugas Keagamaan dan Bantuan Hibah kepada Lembaga-Lembaga Keagamaan dan Rumah Ibadah, Pembinaan Keagamaan/UDG.
- Subkegiatan Pelaksanaan Kebijakan, Evaluasi, dan Capaian Kinerja terkait Kesejahteraan Sosial merupakan subkegiatan yang memfasilitasi Pemberian Beasiswa kepada Mahasiswa Luwu Timur yang Kurang Mampu dari berbagai Universitas serta pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi terhadap Rumah-rumah Ibadah yang akan diberikan Hibah.
- Subkegiatan Pelaksanaan Kebijakan, Evaluasi, dan Capaian Kinerja terkait Kesejahteraan Masyarakat merupakan subkegiatan yang memfasilitasi pemberian Beasiswa terhadap Mahasiswa Berprestasi dan Penyelesaian Studi serta pembinaan UKS.

Adapun capaian kinerja kegiatan bagian kesejahteraan rakyat tahun 2022 dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 3.16
Capaian Kinerja Bagian Kesejahteraan Rakyat Tahun 2022

No	Sub Kegiatan	Target	Realisasi	Capaian Kinerja (%)
1.	Fasilitasi Pengelolaan Bina mental Spritual	7 Kegiatan	7 Kegiatan	127
2.	Pelaksanaan Kebijakan, Evaluasi dan Capaian Kinerja terkait Kesejahteraan Sosial	2 Kegiatan	4 Kegiatan	113
3.	Pelaksanaan Kebijakan, Evaluasi dan Capaian Kinerja terkait Kesejahteraan Masyarakat	3 Kegiatan	3 Kegiatan	100
	<i>Jumlah Rekomendasi pelaksanaan kebijakan kesejahteraan rakyat yang dihasilkan</i>	4	4	100

Sumber data : Bagian Kesra Setda Tahun 2022

Adapun Capaian Kinerja kegiatan dari 3 (tiga) subkegiatan dari Tahun 2017 s/d 2022 pada Tabel berikut :

Tabel 3.17
Capaian Kinerja Output Kegiatan Bagian Kesra Setda Luwu Timur Tahun 2021

NO	KEGIATAN	TARGET						REALISASI					
		2017	2018	2019	2020	2021	2022	2017	2018	2019	2020	2021	2022
1	Pendampingan Penyelenggaraan Ibadah Haji (orang)	160	160	172	0	160	150	157	160	159	0	0	74
2	Penyelenggaraan Hari-hari Besar Keagamaan (kegiatan)	15	15	17	18	15	14	15	15	17	4	3	11
3	Pembinaan Kegiatan Keagamaan (kegiatan)	2	3	4	5	0	2	2	3	4	0	0	2
4	Apresiasi Wisata Religi	23	30	35	0	36	9	23	30	35	0	0	0
5	Fasilitasi Pelaksanaan MTQ (orang)	-	60	-	58	-	58	-	60	-	52	0	52
6	Fasilitasi Pelaksanaan STQ	16	-	56	-	20	0	16	-	56	-	20	0
7	Pembinaan Unit Kesehatan Sekolah	12	34	40	40	40	0	12	34	33	4	0	0
8	Dukungan Pembiayaan Operasional Petugas Keagamaan	1286	1354	1512	1514	1514	95	1286	1354	1512	1514	1514	95
9	Peningkatan Kapasitas Petugas Keagamaan	12	340	411	-		0	12	340	411	-	-	0
10	Bantuan Hibah Rumah Ibadah/Lembaga (Mesjid, Gereja Pura)					125	49					118	30
11	Beasiswa kepada Mahasiswa Kurang Mampu						725						635
12	Beasiswa kepada Mahasiswa Berprestasi (orang)						5502						5637
13	Bantuan Penyelesaian Studi (orang)						15						24

Sumber data : Bagian Kesra SETDA Tahun 2022

- c) Kegiatan Fasilitasi dan Koordinasi Hukum. kegiatan ini terdiri dari sub kegiatan Fasilitasi Penyusunan Produk Hukum Daerah, Fasilitasi Bantuan Hukum, Pendokumentasian Produk Hukum dan Pengelolaan Informasi Hukum dengan rata-rata capaian kinerja sebesar 115,00%. Kegiatan ini dilaksanakan oleh *Bagian Hukum*. Capaian kinerja masing-masing SubKegiatan Fasilitasi dan Koordinasi Hukum adalah sebagai berikut:

Tabel 3.18
Capaian Kinerja Kegiatan Fasilitasi dan koordinasi Hukum Tahun 2022

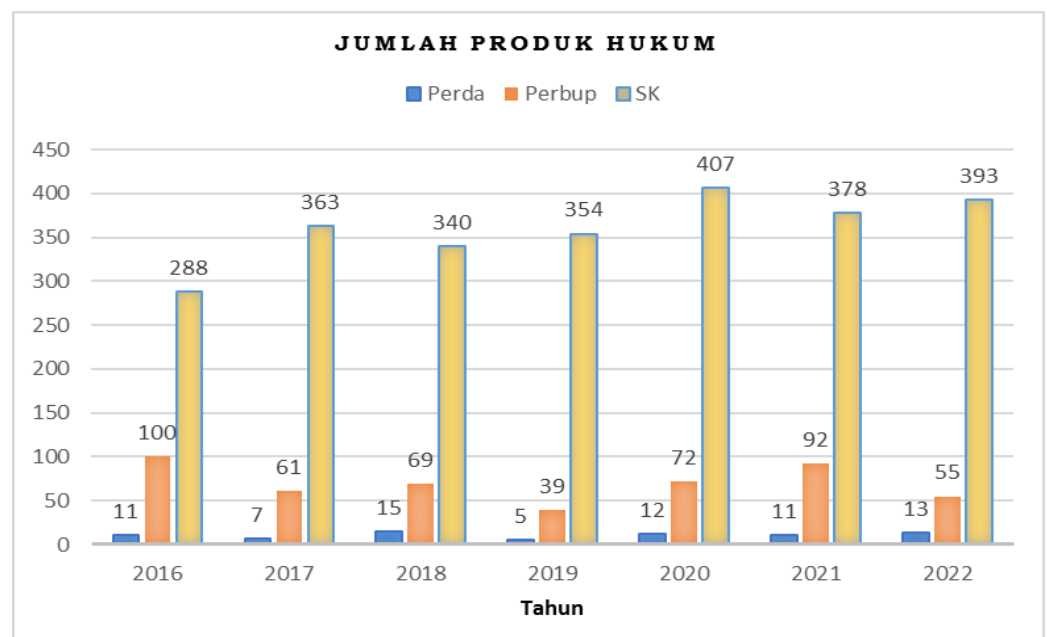
No	Sub Kegiatan	Target	Realisasi	Capaian Kinerja (%)
1	Fasilitasi Penyusunan Produk Hukum (Produk Hukum)	12 Perda 38 Perbup 350 SK	13 Perda 55 Perbup 393 SK	115,25
2	Fasilitasi Bantuan Hukum (Kasus)	2	0	0
3	Pendokumentasian Produk Hukum dan Pengelolaan Informasi Hukum	12 Perda 38 Perbup 350 SK 11 Desa	13 Perda 55 Perbup 393 SK 22 Desa	115,25
<i>Persentase Koordinasi Hukum yang dilaksanakan</i>		85	98	117,61

Sumber: Bagian Hukum Setda Tahun 2022

Adapun capaian kinerja kegiatan bagian Hukum tahun 2016 s/d 2021 adalah sebagai berikut :

- Sub Kegiatan Fasilitasi Penyusunan Produk Hukum
Jumlah rancangan produk hukum daerah yang difasilitasi dan ditetapkan adalah sebagai berikut:

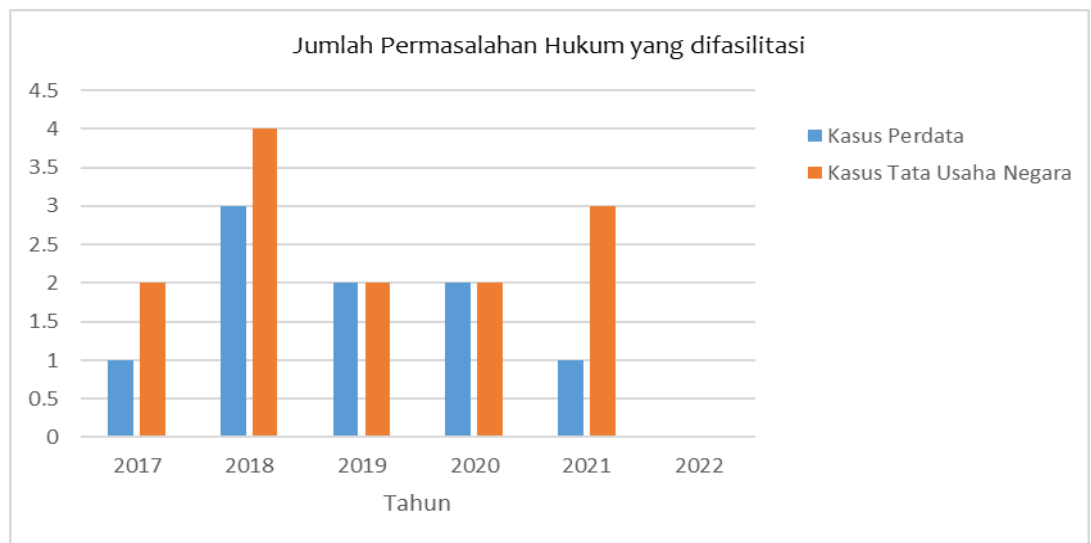
Diagram 3.5
Realisasi Fasilitasi Penyusunan Produk Hukum Daerah (2016-2022)



Sumber: Bagian Hukum Setda Tahun 2022

- Sub Kegiatan Fasilitasi Bantuan Hukum. Kegiatan ini bertujuan untuk melakukan pendampingan tindak lanjut hasil temuan pengawasan dan Penyelesaian permasalahan hukum. Kegiatan ini untuk memfasilitasi penyelesaian permasalahan hukum dibidang Perdata dan Tata Usaha Negara ataupun pidana di tahap penyelidikan dan penyidikan. Jumlah permasalahan hukum yang difasilitasi penyelesaiannya dari tahun 2017 s/d 2021 dapat dilihat pada gambar diagram sebagai berikut :

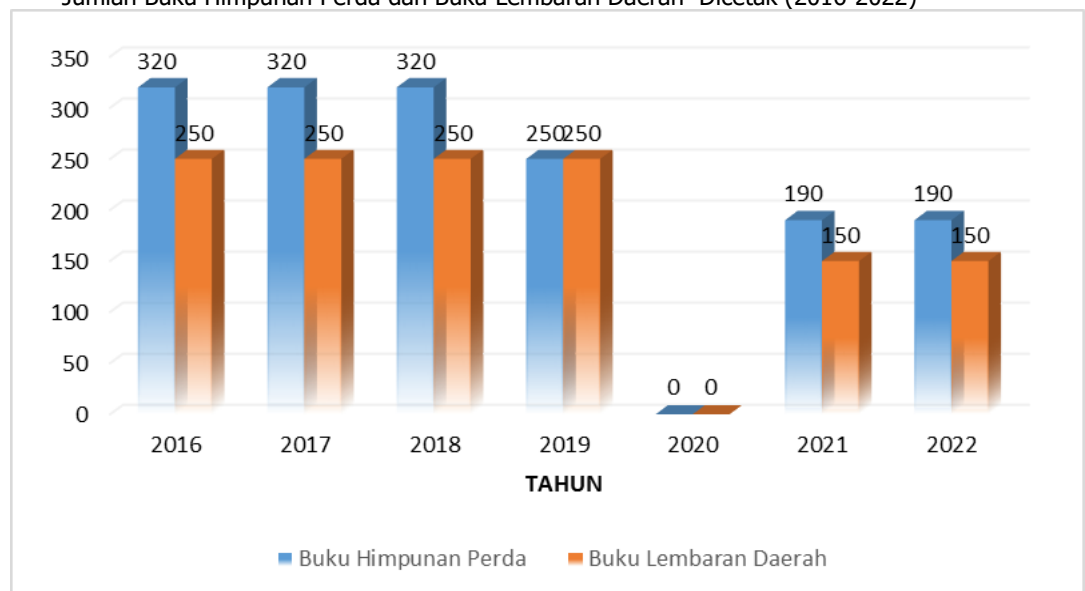
Diagram 3.6
Jumlah Permasalahan Hukum yang Difasilitasi (2017-2022)



Sumber data: Bagian Hukum Setda Tahun 2022

- Sub Kegiatan Pendokumentasin Produk Hukum dan Pengelolaan Informasi Hukum. Kegiatan ini bertujuan mempublikasikan produk hukum yang telah ditetapkan. Publikasi dilakukan melalui website Luwu Timur di jdih.luwutimurkab.go.id dan juga melalui Buku himpunan Peraturan daerah yang disampaikan kepada Kepala desa lingkup pemerintah Kabupaten Luwu Timur. Jumlah buku himpunan perda yang telah di cetak dapat dilihat pada diagram sebagai berikut :

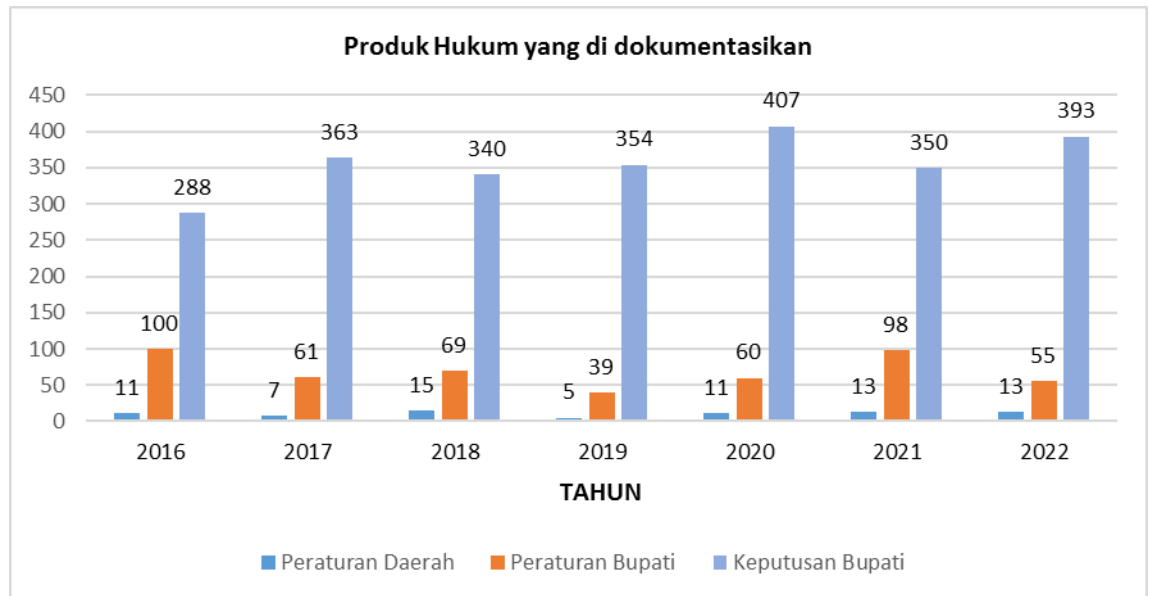
Diagram 3.7
Jumlah Buku Himpunan Perda dan Buku Lembaran Daerah Dicetak (2016-2022)



Sumber data: Bagian Hukum Setda Tahun 2022

Capaian kinerja terkait jumlah produk hukum yang telah dipublikasikan dari tahun 2016 s/d 2021 dapat dilihat pada diagram berikut ini:

Diagram 3.8
Pendokumentasian Produk Hukum (2016-2022)



Sumber data: Bagian Hukum Setda Tahun 2022

- d) Kegiatan Fasilitasi Kerja Sama. Kegiatan ini mencakup sub kegiatan Fasilitasi Kerja Sama Dalam Negeri yakni bertujuan untuk memfasilitasi kerjasama Pemerintah Daerah Kabupaten Luwu Timur dengan Daerah lain atau Pihak lain. Capaian Realisasi pada kegiatan ini sebesar 73,33%. Kegiatan ini dilaksanakan oleh *Bagian Pemerintahan*.

Capaian kinerja Kegiatan dari tahun 2018 s/d 2022 dapat dilihat pada diagram berikut :

- Subkegiatan Fasilitasi Kerjasama dalam Negeri, Subkegiatan ini merupakan kegiatan penyusunan kesepakatan bersama (Mou) dengan daerah lain dan dengan pihak ketiga, diantaranya kesepakatan bersama dengan Kabupaten Tanggamus dan Kabupaten Pringserui Provinsi Lampung serta dengan pihak ketiga, diantaranya dengan Universitas Cokroaminoto Palopo, PT Telkom Indonesia, dan LAN Makassar
- Subkegiatan Evaluasi Pelaksanaan Kerjasama, Subkegiatan ini merupakan evaluasi terhadap pelaksanaan fasilitasi kerjasama dalam negeri Evaluasi yang dilakukan yaitu terhadap Universitas Cokroaminoto Palopo, dengan pihak ketiga Save The Children serta koordinasi pada evaluasi dan pemetaan potensi kerja sama daerah di Biro Pemerintahan dan Otonomi Daerah, Bidang Kerjasama Provinsi Sulawesi Selatan.

Tabel 3.19
Capaian Kinerja Kegiatan Fasilitasi dan koordinasi Hukum Tahun 2022

No	Sub Kegiatan	Target	Realisasi	Capaian Kinerja (%)
1	Fasilitasi Kerjasama dalam negeri (MOU)	22 Mou	29 Mou	131,82
2	Evaluasi Pelaksanaan Kerjasama	2 Mou	2 Mou	100
<i>Jumlah kerja sama daerah yang difasilitasi (PKS)</i>		30	22	73,33

Sumber: Bagian Hukum Setda Tahun 2022

Diagram 3.9
Kerjasama Tahun 2018 – 2022



Sumber Data: Bagian Pemerintahan Setda Tahun 2022

3) Program Perekonomian dan Pembangunan

Indikator kinerja outcome program ini adalah Persentase rekomendasi pembangunan Daerah dengan target kinerja 50% dan realisasi kinerja sebesar 74.98%.

- a) Kegiatan Pelaksanaan Kebijakan Perekonomian. Capaian Realisasi pada kegiatan ini sebesar 91.67%. Subkegiatan yang mendukung capaian kinerja kegiatan pelaksanaan kebijakan, perekonomian dapat dilihat pada table berikut :

Tabel 3.20
Capaian kinerja kegiatan Pelaksanaan Kebijakan Perekonomian tahun 2022

No	Sub Kegiatan	Target	realisasi	Capaian Kinerja (%)
1	Koordinasi, Sinkronisasi, Monitoring dan Evaluasi Kebijakan BUMD dan BLUD (Rekomendasi)	4	4	100
2	Pengendalian dan Distribusi Perekonomian (Rekomendasi)	4	4	100
3	Perencanaan dan Pengawasan Ekonomi Mikro kecil (Rekomendasi)	4	3	75
Jumlah Rekomendasi Kebijakan Perekonomian yang dihasilkan		12	11	91,67

Sumber: Bagian Perekonomian dan Pembangunan Setda Luwu Timur Tahun 2022

- SubKegiatan Koordinasi, Sinkronisasi, Monitoring dan Evaluasi Kebijakan Pengelolaan BUMD dan BLUD merupakan subkegiatan yang pelaksanaan kegiatannya menyangkut Evaluasi, Monitoring Kebijakan Pengelolaan BUMD dan BLUD yang ada di Kabupaten Luwu Timur yang terdiri dari 4 BUMD dan satu Perseroda. Tahun 2022 ini Kabupaten Luwu Timur Rencananya akan membentuk satu Lagi BUMD baru yang Namanya LUTIM GEMILANG. Yang sampai saat ini masih banyak mengalami hambatan-hambatan diantaranya adalah adanya perbedaan pendapat antara Kemenkumham dan Kemendagri dalam hal Pendirian BUMD Baru yang akan dibentuk ini. Adapun solusi yang dibutuhkan saat ini adalah bagaimana untuk lebih efektif dan efisien untuk melakukan koordinasi kepada Kemenkumham dan kemendagri agar BUMD Baru yang diusulkan bisa terbentuk dalam tahun 2022 ini.
- Sub kegiatan Pengendalian dan Distribusi Perekonomian, dalam sub kegiatan ini ada Beberapa Kegiatan yang dilaksanakan antara lain, Pengendalian Inflasi Daerah (TPID), dan Pelaksanaan Koordinasi Dana Bagi Hasil Cukai Hasil Tembakau (DBH-CHT) dalam pelaksanaan Kegiatan Pengendalian Inflasi Daerah

ini. Pada bulan Desember 2022 kabupaten luwu timur mencapai inflasi sebesar 5,13% yang mengikuti Laporan Badan Pusat Statistik Zona Palopo yang mencakup Beberapa Kabupaten kota yang berada di Luwu Raya. Dan selanjutnya dalam Kegiatan Dana Bagi Hasil Cukai Hasil Tembakau ini Bagian Ekonomi dan Pembangunan adalah merupakan Koordinator bagi Beberapa SKPD yang mengelola Dana Bagi Hasil Cukai Hasil Tembakau yang terdiri dari Kantor Satpol PP, Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi serta dinas Kesehatan selaku pengelola Dana Bagi Hasil Cukai Hasil Tembakau untuk Tahun 2022. Dan solusi yang diharapkan pada sub kegiatan ini adalah harus sering melakukan koordinasi lintas sektor.

- Sub kegiatan Perencanaan dan Pengawasan Ekonomi Mikro Kecil adalah Sub Kegiatan Perencanaan dan Pengawasan Ekonomi Mikro Kecil yang mana Sub Kegiatan ini mempunyai beberapa hal tentang Koordinasi yang berkaitan dengan Percepatan Akses Keuangan di Daerah (TPAKD) yang mana terdiri dari koordinasi tentang Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM), fasilitasi beberapa kegiatan sosialisasi yang dilaksanakan oleh Otoritas Jasa Keuangan (OJK) serta kegiatan lintas sektor yang dilaksanakan pada sub kegiatan ini. dan solusi yang diharapkan pada sub kegiatan ini adalah harus sering melakukan koordinasi lintas sektor.

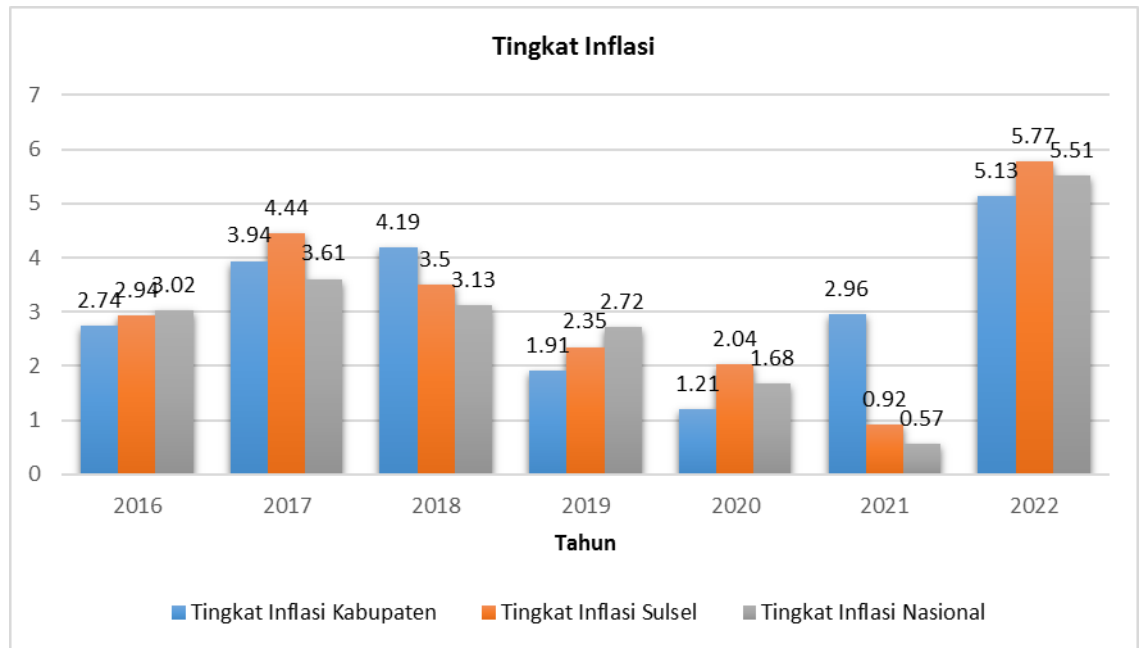
Untuk lebih jelas terkait capaian kinerja Koordinasi pengendalian inflasi daerah dari tahun 2016 s/d 2022 dapat dilihat pada diagram berikut ini:

Tabel 3.21
Perkembangan Inflasi Daerah Kurun 6 Tahun (2016-2022)

Tahun	Tingkat Inflasi Kabupaten	Tingkat Inflasi Sulsel	Tingkat Inflasi Nasional	Target Inflasi Nasional
2016	2,74	2,94	3,02	4±1%
2017	3,94	4,44	3,61	
2018	4,19	3,50	3,13	3,5±1%
2019	1,91	2,35	2,72	
2020	1,21	2,04	1,68	3,0±1%
2021	2,96	0,92	0,57	3,0±1%
2022	5,13	5,77	5,51	3,0±1%

Sumber data : Bagian Ekbang SETDA Tahun 2022

Diagram 3.10
Perkembangan Inflasi Daerah Kurun 7 Tahun (2016-2022)



Capaian kinerja kegiatan Evaluasi Penguatan Tim Percepatan Akses Keuangan Daerah. Kegiatan ini merupakan kegiatan baru sejak tahun 2019 terkait pelaku usaha UMKM yang memperoleh bantuan dari perbankan lewat aplikasi SIKP (sistem informasi kredit program).

Tabel 3.22
Perkembangan Sistem Informasi Kredit Program (SIKP) Tahun 2019-2022

Tahun	Calon Debitur	Debitur
2019	1083	267
2020	1886	570
2021	1821	963
2022	1821	963

Sumber data : Bagian Perekonomian dan Pembangunan SETDA Tahun 2022

- b) Kegiatan Pelaksanaan Administrasi Pembangunan. Capaian realisasi kinerja 100%. Faktor yang mendukung capaian kinerja kegiatan pelaksanaan kebijakan, perekonomian adalah :
- Sub kegiatan Pengendalian dan Evaluasi Program Pembangunan. Capaian realisasi kinerja sebesar 100% kegiatan ini mencakup realisasi serapan anggaran APBD 2022. Kegiatan ini bertujuan mengukur dan melaporkan realisasi serapan anggaran masing-masing SKPD dan secara umum mengetahui presentase realisasi serapan anggaran kabupaten Luwu Timur. Dan untuk tahun 2022 Persentase realisasi serapan Anggaran kabupaten Luwu Timur sebesar 96.93%.
 - Sub Kegiatan Pengelolaan Evaluasi dan Pelaporan Pelaksanaan Pembangunan kegiatan ini mencakup Pelaksanaan Kegiatan Pembangunan Fisik di Kabupaten Luwu Timur, dan untuk tahun 2022 berjumlah 700 kegiatan. Dengan rincian kegiatan pembangunan Fisik yang selesai sampai dengan 31 Desember 2022 terealisasi

sebanyak 683 kegiatan atau sebesar 97,57%, kegiatan yang belum selesai dan pelaksanaannya tahun 2022 sebanyak 8 kegiatan atau sebesar 1,14% dan kegiatan yang batal sebanyak 9 kegiatan atau sebesar 1,29% terdapat di beberapa OPD seperti Dinas PU, Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan, Dinas Perikanan, dan Sekretariat DPRD.

Capaian kinerja terkait realisasi serapan anggaran Kab. Luwu Timur dari tahun 2016 s/d 2022 dapat dilihat pada diagram berikut ini:

Tabel 3.23
Realisasi Penyerapan APBD Tahun (2016-2022)

Tahun	Pagu Anggaran	Realisasi	Persentase (%)
2016	1.553.764.811.738,00	1.340.482.311.019.61	86.27
2017	1.544.366.403.788,86	1.396.832.154.604,00	90.45
2018	1.594.487.428.669,95	1.521.586.750.535.37	95.43
2019	1.609.008.544.799,42	1.519.108.192.200.13	94.41
2020	1.484.283.786.932,78	1.424.193.813.767.05	95.95
2021	1.565.315.094.982,00	1.502.290.124.752,67	95.97
2022	1.724.113.886.050,00	1.671.257.743.867,76	96.93

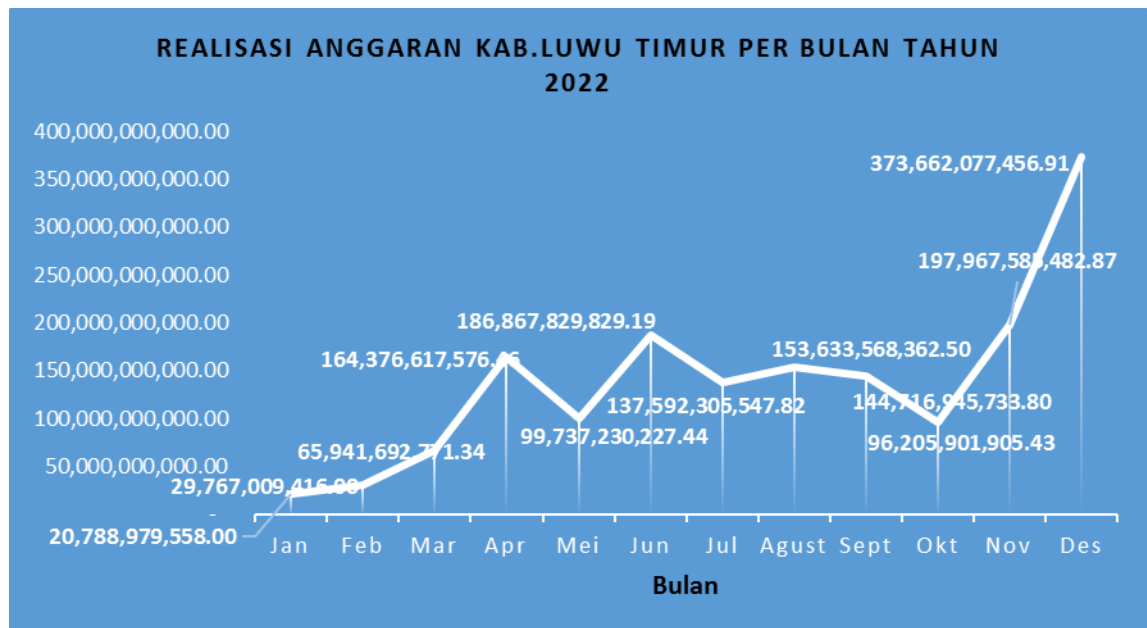
Sumber data : Bagian Perekonomian dan Pembangunan SETDA Tahun 2022

Grafik 3.11
Realisasi APBD Kurun 6 Tahun (2016-2022)



Realisasi serapan anggaran APBD Kab. Luwu Timur Tahun 2022 sebesar Rp1.671.257.743.867,76 dari target Rp1.724.113.886.050,00 atau setara dengan 96,93%. Realisasi Belanja per bulan dapat dilihat pada grafik berikut:

Grafik 3.12
Realisasi APBD Kab. Luwu Timur Tahun 2022



Sumber: Bagian Perekonomian dan pembangunan Setda Tahun 2022 (*Unaudited*)

- c) Kegiatan Pengelolaan Pengadaan barang dan Jasa. Kegiatan yang dilaksanakan oleh *Bagian Pengadaan Barang dan Jasa (PBJ)* ini memiliki Capaian kinerja sebesar 112% faktor pendukung capaian kinerja kegiatan Pengelolaan Pengadaan Barang dan Jasa adalah:
- Sub kegiatan Pengelolaan pengadaan Barang dan Jasa, merupakan suatu kegiatan pemilihan penyedia dalam bentuk pelaksanaan tender dengan target 800 paket tender dan terealisasi sebanyak 1233 paket tender dan pengadaan langsung, yang mana jumlah paket tender yang dikelola telah melebihi target.
 - Pengelolaan Layanan pengadaan secara Elektronik merupakan subkegiatan yang menangani layanan pengelolaan teknologi dan system informasi untuk memfasilitasi pelaksanaan pengadaan Barang/Jasa secara elektronik. Selain memfasilitasi UKPBJ/Pejabat pengadaan dalam melaksanakan pengadaan barang/jasa secara elektronik juga melayani registrasi penyedia barang dan jasa yang berdomisili di wilayah kerja layanan pengadaan secara elektronik yang bersangkutan. Untuk tahun 2022 jumlah aplikasi yang pengelolaannya melalui LPSE sebanyak 7 aplikasi yakni SIRUP, SPSE, SIKAP, EKATALOG, LPSE SUPPORT, BELA PENGADAAN/TOKO DARING dan E-KONTRAK serta telah dapat diakses oleh seluruh OPD, Pelaku Usaha dan UMK, diantaranya aplikasi SPSE yang berhasil menayangkan 3598 produk pada katalog lokal.
 - Pembinaan dan Advokasi Pengadaan Barang dan Jasa merupakan sub kegiatan yang memfasilitasi pembinaan dalam upaya peningkatan kapasitas sumber daya manusia pengelola pengadaan serta pelaksanaan pendampingan dalam pelaksanaan pengadaan barang dan jasa. Pada tahun 2022 telah terlaksana pembinaan bagi ASN pengelola PBJ dalam bentuk fasilitasi kegiatan sosialisasi kepada PPK mengenai tata cara perhitungan TKDN dalam pelaksanaan PBJ serta membuka layanan konsultasi PBJ sebagai bentuk pendampingan/advokasi bagi OPD.

Tabel 3.24

Capaian Kinerja Kegiatan Pengelolaan Pengadaan Barang dan Jasa Tahun 2022

No	Sub Kegiatan	Target	Realisasi	Capaian Kinerja (%)
1	Pengelolaan Pengadaan Barang dan Jasa	800 Paket	1233 Paket	154
2	Pengelolaan Layanan Pengadaan Barang dan jasa secara Elektronik	7 Aplikasi	7 Aplikasi	100
3	Monitoring Evaluasi dan pelaporan Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa	61 Laporan	61 Laporan	100
<i>Persentase Pengelolaan Pengadaan Barang dan Jasa dilaksanakan</i>		80%	111,49%	139,36

Sumber data: Bagian Pengadaan Barang dan Jasa Tahun 2022

Diagram 3.13

Jumlah Data Paket Tender yang Dikelola

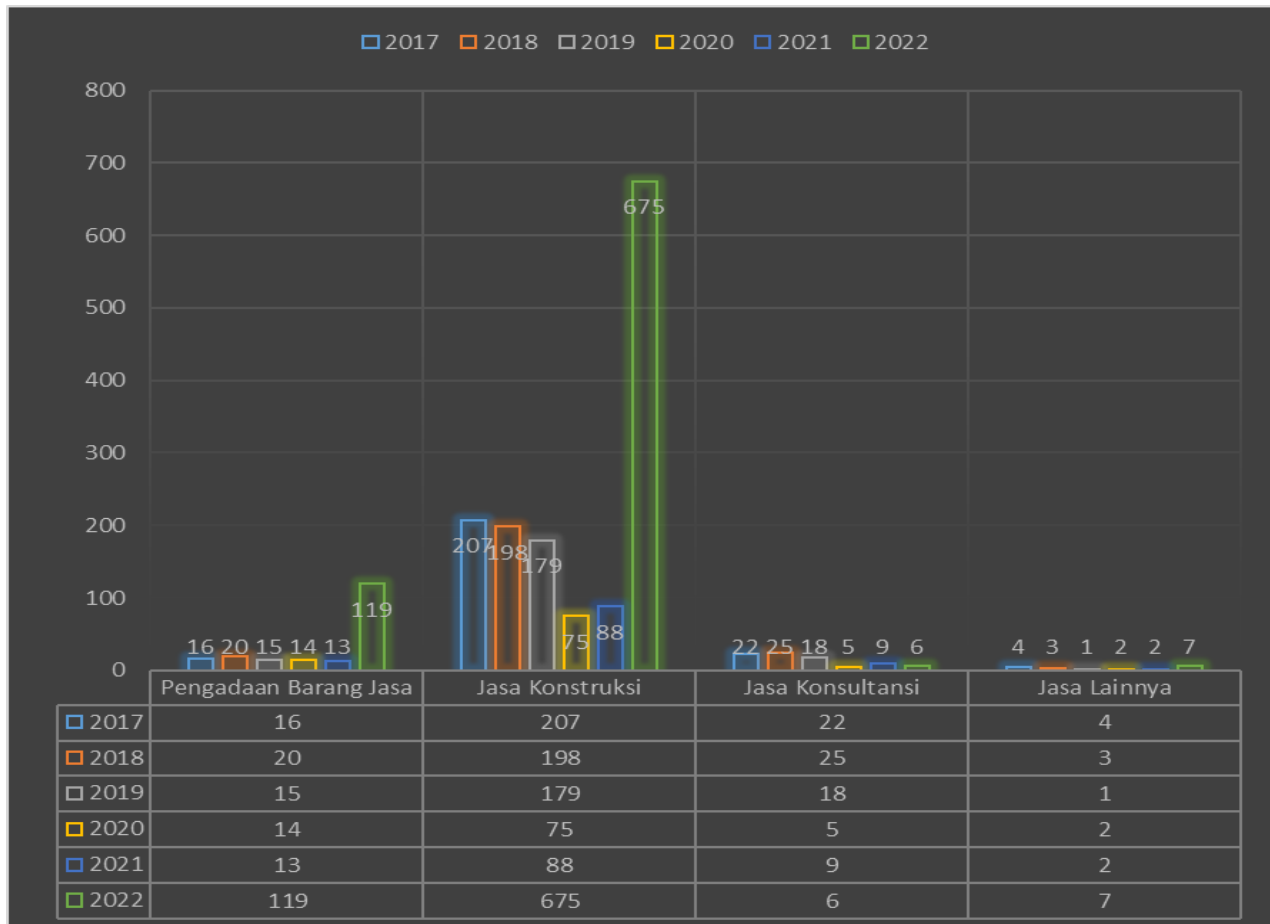


Sumber data : Bagian Pengadaan Barang dan Jasa Tahun 2022

Jumlah Paket Pengadaan yang Terealisasi

Diagram 3.14

Perbandingan Jumlah Paket Tender melalui UKPBJ Tahun 2017 s.d 2022



Sumber data: Bagian Pengadaan Barang dan Jasa Tahun 2022

- d) Kegiatan Pemantauan Kebijakan Sumber Daya Alam, kegiatan ini mencakup 2 (dua) subkegiatan yaitu Koordinasi, Sinkronisasi dan Evaluasi Kebijakan Pertanian, Kehutanan, Kelautan dan Perikanan serta Koordinasi, Sinkronisasi dan Evaluasi Kebijakan Pertambangan dan Lingkungan Hidup dengan Capaian Kinerja sebesar 25%.

Rincian kedua subkegiatan ini sebagai berikut:

- Koordinasi, Sinkronisasi dan Evaluasi Kebijakan Pertanian, Kehutanan, Kelautan dan Perikanan adalah merupakan suatu Sub Kegiatan Baru pada tahun 2022 ini, untuk kegiatan ditahun Pertama ini masih fokus pada pengumpulan data-data terkait Kebijakan, Pertanian, Kehutanan, Kelautan dan Perikanan.
- Kordinasi, Sinkronisasi dan Evaluasi Kebijakan pertambangan dan Lingkungan Hidup adalah merupakan sub kegiatan baru pada tahun 2022 ini, untuk kegiatan ditahun pertama ini masih berfokus pada kebutuhan pengumpulan data-data yang diperlukan.

Tabel 3.25

Capaian Kinerja Kegiatan Pemantauan Kebijakan Sumber Daya Alam Tahun 2022

No	Sub Kegiatan	Target	Realisasi	Capaian Kinerja (%)
1	Koordinasi, Sinkronisasi dan Evaluasi Kebijakan Pertanian, Kehutanan, Kelautan dan Perikanan	4 Rekomendasi	0 Rekomendasi	0
2	Koordinasi, Sinkronisasi dan Evaluasi Kebijakan Pertanian, Kehutanan, Kelautan dan Perikanan	4 Rekomendasi	2 Rekomendasi	25
<i>Persentase Pengelolaan Pengadaan Barang dan Jasa dilaksanakan</i>		8 Rekomendasi	2 Rekomendasi	25

D

Capaian Kinerja Program dan Kegiatan secara rinci dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 3.26
Pelaksanaan Urusan Penunjang Pada Sekretariat Daerah Kabupaten Luwu Timur Tahun 2022

Kode Urusan	Urusan Pemerintahan	Organisasi Perangkat daerah	Arah Kebijakan (Bab 5 Renstra)	Program/Kegiatan/Subkegiatan			Indikator	Target	Realisasi	Tingkat Capaian(9/8*100)	Penjelasan Terhadap Realisasi Program/Kegiatan/Subkegiatan
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	15
4	Pemerintahan Umum	Sekretariat Daerah	Peningkatan Akuntabilitas Pengelolaan Keuangan, Aset dan Penyusunan Laporan Kinerja serta Peningkatan Kualitas dan Kompetensi Aparatur melalui Pelatihan, Bimtek formal dan Fungsional	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota			Persentase penunjang urusan perangkat daerah berjalan sesuai standar (%)	100%	90.20%	90.20	Realisasi Program ini merupakan persentase rata-rata realisasi kinerja yang mendukung Program yakni jumlah persentase Realisasi Kinerja Kegiatan dibagi dengan Jumlah Kegiatan yakni 12 kegiatan dari 4 (Empat) Bagian di lingkup Sekretariat Daerah yakni Bagian Perencanaan dan Keuangan, Bagian Umum, Bagian Prokopim dan Bagian Organisasi.
			Peningkatan Akuntabilitas Pengelolaan Keuangan, Aset dan Penyusunan Laporan Kinerja serta Peningkatan Kualitas dan Kompetensi Aparatur melalui Pelatihan, Bimtek formal dan Fungsional		Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah		Persentase penyusunan dokumen perencanaan, penganggaran & evaluasi tepat waktu (%)	100%	100%	100	Pelaksanaan penyusunan dokumen perencanaan maupun penganggaran terlaksana tepat waktu sesuai dengan timing yang telah ditetapkan oleh TAPD
			Peningkatan Akuntabilitas Pengelolaan Keuangan, Aset dan Penyusunan Laporan Kinerja serta Peningkatan Kualitas dan Kompetensi Aparatur melalui Pelatihan, Bimtek formal dan Fungsional			Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	jumlah dokumen Perencanaan Yang disusun Tepat Waktu (Dokumen)	2 Dok	2 Dok	100	Capaian Kinerja output berupa Dokumen Renja Perubahan 2022 dan Renja Pokok 2023
			Peningkatan Akuntabilitas Pengelolaan Keuangan, Aset dan Penyusunan Laporan Kinerja serta Peningkatan Kualitas dan Kompetensi Aparatur melalui Pelatihan, Bimtek formal dan Fungsional			Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Jumlah dokumen RKA-SKPD yang disusun Tepat Waktu (Dokumen)	2 Dok	2 Dok	100	Capaian kinerja output berupa Dokumen RKA Perubahan 2022 dan RKA Pokok 2023
			Peningkatan Akuntabilitas Pengelolaan Keuangan, Aset dan Penyusunan Laporan Kinerja serta Peningkatan Kualitas dan Kompetensi Aparatur melalui Pelatihan, Bimtek formal dan Fungsional			Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	Jumlah dokumen DPA-SKPD yang disusun Tepat Waktu (Dokumen)	2 Dok	2 Dok	100	Realisasi maksimal dengan capaian kinerja output berupa DPA Pergeseran I 2022, DPA Pergeseran ke II 2022, DPA Perubahan 2022, dan DPA Pokok 2023.

**LKPJ SEKRETARIAT DAERAH
TAHUN 2022**

Kode Urusan	Urusan Pemerintahan	Organisasi Perangkat daerah	Arah Kebijakan (Bab 5 Renstra)	Program/Kegiatan/Subkegiatan			Indikator	Target	Realisasi	Tingkat Capaian(9/8*100)	Penjelasan Terhadap Realisasi Program/Kegiatan/Subkegiatan
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	15
			Peningkatan Akuntabilitas Pengelolaan Keuangan, Aset dan Penyusunan Laporan Kinerja serta Peningkatan Kualitas dan Kompetensi Aparatur melalui Pelatihan, Bimtek formal dan Fungsional			Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Kinerja Perangkat Daerah yang disusun tepat waktu	9 Dok	9 Dok	100	Realisasi maksimal dengan capaian kinerja output berupa terlaksananya Evaluasi Kinerja 12 bulan, Laporan Evaluasi Kinerja per triwulan sebanyak 4 Dokumen serta Laporan RKPD per triwulan sebanyak 4 Dokumen.
			Peningkatan Akuntabilitas Pengelolaan Keuangan, Aset dan Penyusunan Laporan Kinerja serta Peningkatan Kualitas dan Kompetensi Aparatur melalui Pelatihan, Bimtek formal dan Fungsional		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah		Persentase administrasi keuangan yang terselenggara dengan baik (%)	100%	84.83%	84.83	Tidak tercapainya secara maksimal persentase administrasi keuangan disebabkan terdapat 1 (satu) orang ASN Sekretariat Daerah yang meninggal pada Tahun 2022
			Peningkatan Akuntabilitas Pengelolaan Keuangan, Aset dan Penyusunan Laporan Kinerja serta Peningkatan Kualitas dan Kompetensi Aparatur melalui Pelatihan, Bimtek formal dan Fungsional			Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah ASN yang gaji dan tunjangan terbayarkan (Orang)	84 Orang	83 Orang	98.81	Jumlah ASN per 31 Desember lingkup Sekretariat Daerah yang dibayarkan Gajinya sebanyak 81 orang ASN lingkup Sekretariat Daerah dengan Rincian 6 orang Eselon II, 8 orang Eselon III, 4 orang eselon IV, 7 orang Fungsional PBJ, 21 orang Fungsional Penyetaraan, dan 35 orang staf pelaksana.
			Peningkatan Akuntabilitas Pengelolaan Keuangan, Aset dan Penyusunan Laporan Kinerja serta Peningkatan Kualitas dan Kompetensi Aparatur melalui Pelatihan, Bimtek formal dan Fungsional			Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian, Verifikasi Keuangan SKPD	Jumlah Kegiatan yang diverifikasi (Kegiatan)	20 Kegiatan	20 Kegiatan	100	Realisasi maksimal dengan terlaksananya penatausahaan keuangan Sekretariat Daerah terhadap 20 Kegiatan dengan Output sebanyak 568 SPM-SP2D dengan rincian 1 SPM UP, 30 SPM TU, 70 SPM GU dan Nihil dan sebanyak 467 SPM LS termasuk didalamnya LS Hibah, LS Gaji dan Tunjangan dan LS Pengadaan.
			Peningkatan Akuntabilitas Pengelolaan Keuangan, Aset dan Penyusunan Laporan Kinerja serta Peningkatan Kualitas dan Kompetensi Aparatur melalui Pelatihan, Bimtek formal dan Fungsional			Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulan/Semesteran SKPD	Jumlah dokumen laporan keuangan bulanan/triwulan/semesteran SKPD yang disusun Tepat Waktu (Dokumen)	18 Dok	18 Dok	100	Capaian kinerja output berupa Laporan Realisasi bulanan TA.2022 sebanyak 12 laporan, Laporan Keuangan Akhir Tahun TA. 2021 Laporan Keuangan semester 1 Tahun 2022 serta Laporan Fungsional Bendahara.
			Peningkatan Akuntabilitas Pengelolaan Keuangan, Aset dan Penyusunan Laporan Kinerja serta Peningkatan Kualitas dan Kompetensi Aparatur melalui Pelatihan, Bimtek formal dan		Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah		Persentase BMD yang Diadministrasikan sesuai standar (%)	100%	100%	100	Pengelolaan Administrasi Barang Milik Daerah sesuai dengan Standar Pengelolaan Barang Milik Daerah yakni Permendagri Nomor 47 Tahun 2021

**LKPJ SEKRETARIAT DAERAH
TAHUN 2022**

Kode Urusan	Urusan Pemerintahan	Organisasi Perangkat daerah	Arah Kebijakan (Bab 5 Renstra)	Program/Kegiatan/Subkegiatan			Indikator	Target	Realisasi	Tingkat Capaian(9/8*100)	Penjelasan Terhadap Realisasi Program/Kegiatan/Subkegiatan
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	15
			Fungsional								
			Peningkatan Akuntabilitas Pengelolaan Keuangan, Aset dan Penyusunan Laporan Kinerja serta Peningkatan Kualitas dan Kompetensi Aparatur melalui Pelatihan, Bimtek formal dan Fungsional			Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah laporan penatausahaan barang milik daerah pada SKPD yang disusun (Dokumen)	4 Dok	4 Dok	100	Adapun Capaian output yang dihasilkan dari penggunaan Anggaran yang ada adalah tersedianya Laporan Aset Tetap Sekretariat Daerah Tahun 2021 serta penatausahaan aset tetap 2022 diantaranya berupa terlaksananya Penilaian Aset pada Mess Pemda Jakarta sebelum dilakukan pembongkaran. Terlaksananya Lelang Aset Tetap pada Mess Pemda Jakarta. Pelabelan Barang pengadaan Tahun 2022, Pemusnahan BMD pada Mess Pemda Makassar kategori rusak berat (dimakan rayap). Pemusnahan BMD Ruang Bupati dan Ruanagan Wakil Bupati kategori rusak berat (termakan rayap) berdasarkan SK Penghapusan, Penyerahan Hibah Kasur dari Mess Pemda Makassar kepada Mahasiswa Komisariat Angkona.
					Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah		Persentase rata-rata capaian kinerja Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	100%	76,75%	76.75	Pada Kegiatan ini persentase administrasi kepegawaian tidak maksimal disebabkan Jumlah Pegawai yang mengikuti Sosialisasi dan Bimtek berdasarkan Undangan kegiatan yang diterima.
			Peningkatan Akuntabilitas Pengelolaan Keuangan, Aset dan Penyusunan Laporan Kinerja serta Peningkatan Kualitas dan Kompetensi Aparatur melalui Pelatihan, Bimtek formal dan Fungsional			Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	Jumlah laporan penatausahaan barang milik daerah pada SKPD yang disusun (Dokumen)	12 Dok	12 Dok	100	Capaian output dari penggunaan anggaran yang digunakan adalah laporan Data Administrasi Kepegawaian yang dilaporkan setiap bulan untuk tahun 2022 sesuai dengan perubahan data kepegawaian yang ada yakni data presensi, data kenaikan Gaji Berkala, laporan pendataan Upah Jasa P3K (Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja) dan Laporan Evaluasi Kinerja Upahjasa, Data Upahjasa Penerima Bantuan BPJS Ketenagakerjaan, Data Kepegawaian IKK. Data Pemetaan Pegawai ASN dan Non ASN Lingkup Setda, Data Proyeksi Kebutuhan Pegawai 5 tahun kedepan, Data Survey Penilaian Integritas (SPI)
			Peningkatan Akuntabilitas Pengelolaan Keuangan, Aset dan Penyusunan Laporan Kinerja serta Peningkatan Kualitas dan Kompetensi Aparatur melalui Pelatihan, Bimtek formal dan Fungsional			Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Pegawai yang mengikuti sosialisasi peraturan perundang-undangan (orang)	6 Orang	5 Orang	83.33	Sebanyak 5 orang ASN Lingkup sekretariat Daerah telah mengikuti Sosialisasi Srikandi dan Penginputan Anggaran 2023 di Kantor BPKP Makassar.

**LKPJ SEKRETARIAT DAERAH
TAHUN 2022**

Kode Urusan	Urusan Pemerintahan	Organisasi Perangkat daerah	Arah Kebijakan (Bab 5 Renstra)	Program/Kegiatan/Subkegiatan			Indikator	Target	Realisasi	Tingkat Capaian(9/8*100)	Penjelasan Terhadap Realisasi Program/Kegiatan/Subkegiatan
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	15
			Peningkatan Akuntabilitas Pengelolaan Keuangan, Aset dan Penyusunan Laporan Kinerja serta Peningkatan Kualitas dan Kompetensi Aparatur melalui Pelatihan, Bimtek formal dan Fungsional			Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Pegawai yang mengikuti bimbingan teknis implementasi peraturan perundang - undangan (Orang)	21 Orang	20 Orang	95.24	Sebanyak 20 orang ASN Lingkup sekretariat Daerah telah mengikuti Bimbingan Teknis.
					Administrasi Umum Perangkat Daerah		Persentase Rata- Rata Capaian Kinerja administrasi umum PD (%)	100%	95.19%	95.19	
			Peningkatan Akuntabilitas Pengelolaan Keuangan, Aset dan Penyusunan Laporan Kinerja serta Peningkatan Kualitas dan Kompetensi Aparatur melalui Pelatihan, Bimtek formal dan Fungsional			Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor yang di sediakan (jenis)	9 Jenis	9 Jenis	100	Realisasi Maksimal Capaian kegiatan ini adalah tersedianya penerangan listrik di Gedung Kantor Sekretariat Daerah, Rumah Jabatan Bupati, Wakil Bupati dan Rumah Jabatan Sekretaris Daerah serta Gedung Pertemuan dan Panggung Soekarno Hatta.
			Peningkatan Akuntabilitas Pengelolaan Keuangan, Aset dan Penyusunan Laporan Kinerja serta Peningkatan Kualitas dan Kompetensi Aparatur melalui Pelatihan, Bimtek formal dan Fungsional			Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah peralatan dan perlengkapan kantor yang disediakan (Unit)	9 Jenis	9 Jenis	100	Realisasi Maksimal dengan capaian Kinerja Output pada Pengadaan pencetakan Plakat, Sovenir/Cinder Mata Pemda dan Cinder mata Bupati, pengadaan Bendera dan Umbul-umbul yang sudah terlaksana.
			Peningkatan Akuntabilitas Pengelolaan Keuangan, Aset dan Penyusunan Laporan Kinerja serta Peningkatan Kualitas dan Kompetensi Aparatur melalui Pelatihan, Bimtek formal dan Fungsional			Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah peralatan rumah tangga yang disediakan (Unit)	11 Jenis	10 Jenis	90.91	Capaian Kinerja Output berupa Alat Dapur (Kompor Gas, Kipas Angin Uap dan Dispenser pada Rujab Bupati, Tangga Besi pada Kantor Bupati, Gorden untuk Rujab Bupati dan Ruangan Wakil Kepala Daerah, serta Karpet untuk Mess Pemda Mkassar dan pada Mushallah Rujab Bupati.
			Peningkatan Akuntabilitas Pengelolaan Keuangan, Aset dan Penyusunan Laporan Kinerja serta Peningkatan Kualitas dan Kompetensi Aparatur melalui Pelatihan, Bimtek formal dan Fungsional			Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah bahan logistik kantor yang disediakan (jenis)	8 jenis	8 Jenis	100	Capaian kegiatan yakni tersedianya Bahan Bakar Minyak dan Pelumas untuk Genset, BBM untuk operasional kendaraan dinas roda 4 (empat), Pengisian Aki Genset, Belanja Bahan kebersihan, Obat-obatan lainnya.

**LKPJ SEKRETARIAT DAERAH
TAHUN 2022**

Kode Urusan	Urusan Pemerintahan	Organisasi Perangkat daerah	Arah Kebijakan (Bab 5 Renstra)	Program/Kegiatan/Subkegiatan			Indikator	Target	Realisasi	Tingkat Capaian(9/8*100)	Penjelasan Terhadap Realisasi Program/Kegiatan/Subkegiatan
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	15
			Peningkatan Akuntabilitas Pengelolaan Keuangan, Aset dan Penyusunan Laporan Kinerja serta Peningkatan Kualitas dan Kompetensi Aparatur melalui Pelatihan, Bimtek formal dan Fungsional			Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Barang cetakan dan/atau penggandaan yang disediakan (jenis)	9 Jenis	9 Jenis	100	Capaian kegiatan yakni pengadaan Amplop Bupati, Amplop Setda, Cetak Stempel, Cetak Kartu nama Bupati/Wakil, Cetak Amplop Tinta Emas, Blanko SPDP, Cetak Memo, Jilid Laminating, Jilid Biasa, Kwitansi dan Penggandaan (Foto Copy).
			Peningkatan Akuntabilitas Pengelolaan Keuangan, Aset dan Penyusunan Laporan Kinerja serta Peningkatan Kualitas dan Kompetensi Aparatur melalui Pelatihan, Bimtek formal dan Fungsional			Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan (eksamplar)	7330 Eks	7330 Eks	100	Realisasi Maksimal dengan Capaian kinerja tersedianya bahan bacaan peraturan perUndang-undangan di Sekretariat Daerah yakni sebanyak 7330 exemplar dalam setahun. Kegiatan ini berupa penyediaan bahan bacaan langganan jurnal/surat kabar dan majalah. Yang terdiri dari lokal, majalah, nasional, regional harian, regional mingguan dan regional temporer.
			Peningkatan Akuntabilitas Pengelolaan Keuangan, Aset dan Penyusunan Laporan Kinerja serta Peningkatan Kualitas dan Kompetensi Aparatur melalui Pelatihan, Bimtek formal dan Fungsional			Fasilitasi Kunjungan Tamu	Jumlah tamu yang difasilitasi (Orang)	12000 Orang	10562 Orang	88.02	Realisasi maksimal, Kegiatan ini merupakan belanja yang disediakan untuk memfasilitasi tamu-tamu daerah seperti biaya sewa hotel tamu, makan dan minum, makan minum hari-hari besar sehingga anggaran ini sifatnya disediakan.
			Peningkatan Akuntabilitas Pengelolaan Keuangan, Aset dan Penyusunan Laporan Kinerja serta Peningkatan Kualitas dan Kompetensi Aparatur melalui Pelatihan, Bimtek formal dan Fungsional			Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah rapat koordinasi dan konsultasi SKPD yang diikuti (kali)	650 Kali	684	105.23	Realisasi kinerja sebanyak 684 kali kegiatan rapat koordinasi yang diikuti oleh PNS dan non PNS lingkup Setda.
			Peningkatan Akuntabilitas Pengelolaan Keuangan, Aset dan Penyusunan Laporan Kinerja serta Peningkatan Kualitas dan Kompetensi Aparatur melalui Pelatihan, Bimtek formal dan Fungsional			Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	Jumlah dokumen laporan hasil penatausahaan arsip dinamis pada SKPD (Dokumen)	50 dok	50 dok	100	Capaian kegiatan ini meliputi pengarsipan dokumen arsip aktif dan inaktif sebanyak 50 dokumen sesuai dengan yang telah ditargetkan.
			Peningkatan Akuntabilitas Pengelolaan Keuangan, Aset dan Penyusunan Laporan Kinerja serta Peningkatan Kualitas dan Kompetensi Aparatur melalui Pelatihan, Bimtek formal dan Fungsional		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah		Persentase BMD-PD penunjang yang terpenuhi (%)	100%	92.18%	92.18	

**LKPJ SEKRETARIAT DAERAH
TAHUN 2022**

Kode Urusan	Urusan Pemerintahan	Organisasi Perangkat daerah	Arah Kebijakan (Bab 5 Renstra)	Program/Kegiatan/Subkegiatan			Indikator	Target	Realisasi	Tingkat Capaian(9/8*100)	Penjelasan Terhadap Realisasi Program/Kegiatan/Subkegiatan
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	15
			Peningkatan Akuntabilitas Pengelolaan Keuangan, Aset dan Penyusunan Laporan Kinerja serta Peningkatan Kualitas dan Kompetensi Aparatur melalui Pelatihan, Bimtek formal dan Fungsional			Pengadaan Kendaraan Dinas	Jumlah kendaraan dinas yang diadakan (Unit)	4 Unit	3 Unit	75.00	Kendaraan yang diadakan pada Subkegiatan ini adalah 3 (tiga) unit kendaraan dinas operasional untuk para Asisten sedangkan mobil PKK yang direncanakan tidak dapat diadakan karena harus Inden selama 3 (tiga) bulan.
			Peningkatan Akuntabilitas Pengelolaan Keuangan, Aset dan Penyusunan Laporan Kinerja serta Peningkatan Kualitas dan Kompetensi Aparatur melalui Pelatihan, Bimtek formal dan Fungsional			Pengadaan Mebel	Jumlah mebel yang diadakan (unit)	62 Jenis	58 Jenis	93.55	capaian kinerja output berupa pengadaan Rak Besi dan Meja Rapat di Kantor Bupati, Lemari Pakaian, Pengadaan Cermin dan Matras, serta SpringBed untuk Mess Pemda Makassar, Sofa untuk Ruangan Wakil Bupati, Spring Bed untuk Pramusaji Rujab Wakil, Kursi Teras, Meja Tamu Teras dan Sofa untuk Rujab Bupati dan serta pengadaan Lemari Kaca.
			Peningkatan Akuntabilitas Pengelolaan Keuangan, Aset dan Penyusunan Laporan Kinerja serta Peningkatan Kualitas dan Kompetensi Aparatur melalui Pelatihan, Bimtek formal dan Fungsional			Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah peralatan dan mesin lainnya yang diadakan (Unit)	84 Unit	66 Unit	78.57	Realisasi Maksimal dengan capaian kinerja output berupa pengadaan CCTV, Microphone, LCD Projector/infocus, AC, Kamera Digital, Mesin Babat, Laptop dan Notebook, Scanner, Kamera Digital, Vacuum Cleaner untuk Kantor Bupati. Pengadaan Lampu Kristal Mushallah, Lemari Pendingin untuk Mess Pemda Makassar, Televisi dan Peralatan Audio di ruangan Rapat Bupati, Lemari Es untuk Rujab Wakil Bupati serta Peralatan Studio Sound system, Wireless pada Rujab Bupati serta Komputer dan Laptop pada Kantor Bupati dan Pengadaan Notebook untuk para Asisten dan Kabag Umum serta Bagian Prokopolim.
			Peningkatan Akuntabilitas Pengelolaan Keuangan, Aset dan Penyusunan Laporan Kinerja serta Peningkatan Kualitas dan Kompetensi Aparatur melalui Pelatihan, Bimtek formal dan Fungsional			Pengadaan Gedung Kantor atau bangunan lainnya	Jumlah pengadaan gedung kantor atau bangunan lainnya (Unit)	2 Paket	2 Paket	100	Realisasi Maksimal dengan capaian kinerja output berupa pembangunan Pagar pada Rumah Jabatan Sekda dan Bangunan tempat parkir pada kantor PBJ.
			Peningkatan Akuntabilitas Pengelolaan Keuangan, Aset dan Penyusunan Laporan Kinerja serta Peningkatan Kualitas dan Kompetensi Aparatur melalui Pelatihan, Bimtek formal dan Fungsional		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		Persentase Rata-Rata Capaian Kinerja jasa penunjang urusan pemerintahan daerah (%)	100%	88.08%	88.08	Persentase Kinerja Penunjang Urusan Pemerintah Daerah tidak maksimal disebabkan adanya kekosongan tenaga upah jasa pada beberapa posisi tenaga upah jasa yakni Tenaga Administrasi, CS, Tenaga Lapangan, dan Alat Studio

**LKPJ SEKRETARIAT DAERAH
TAHUN 2022**

Kode Urusan	Urusan Pemerintahan	Organisasi Perangkat daerah	Arah Kebijakan (Bab 5 Renstra)	Program/Kegiatan/Subkegiatan			Indikator	Target	Realisasi	Tingkat Capaian(9/8*100)	Penjelasan Terhadap Realisasi Program/Kegiatan/Subkegiatan
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	15
			Peningkatan Akuntabilitas Pengelolaan Keuangan, Aset dan Penyusunan Laporan Kinerja serta Peningkatan Kualitas dan Kompetensi Aparatur melalui Pelatihan, Bimtek formal dan Fungsional			Penyediaan Jasa Surat Menyurat	jumlah surat masuk dan keluar yang diadministrasikan (Surat)	4000 Surat	8672 Surat	216.80	Realisasi maksimal dengan capaian kinerja pengelolaan Surat Masuk sebanyak 6679 surat dan Surat Keluar sebanyak 1993 surat lingkup Kabupaten Luwu Timur.
			Peningkatan Akuntabilitas Pengelolaan Keuangan, Aset dan Penyusunan Laporan Kinerja serta Peningkatan Kualitas dan Kompetensi Aparatur melalui Pelatihan, Bimtek formal dan Fungsional			Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah rekening telepon, listrik dan air yang terbayarkan (Rekening)	420 Rekening	420 Rekening	100	Kegiatan ini diperuntukkan untuk pembayaran rekening bulanan jasa komunikasi SDA dan listrik yakni Tagihan Telepon, Rekening Air, Rekening Listrik, TV Kabel/Indihome Rumah Jabatan Bupati, Rumah Jabatan Sekda serta Sewa Internet Mess Pemda Makassar dan Jakarta.
			Peningkatan Akuntabilitas Pengelolaan Keuangan, Aset dan Penyusunan Laporan Kinerja serta Peningkatan Kualitas dan Kompetensi Aparatur melalui Pelatihan, Bimtek formal dan Fungsional			Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah jasa tenaga pelayanan umum kantor yang dibayarkan (Orang)	45 Orang	42 Orang	93.33	Sebanyak 42 orang tenaga upah jasa telah dibayarkan honor selama 12 bulan yang terdiri atas Upah Jasa tenaga Administrasi Kantor, tenaga listrik, tenaga operasional lapangan, Sopir Mess Pemda Jakarta, Sopir Kantor Bupati, Cleaning Service Kantor Bupati dan tenaga operator alat studio.
			Peningkatan Akuntabilitas Pengelolaan Keuangan, Aset dan Penyusunan Laporan Kinerja serta Peningkatan Kualitas dan Kompetensi Aparatur melalui Pelatihan, Bimtek formal dan Fungsional		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		Persentase Barang Milik Daerah penunjang urusan pemerintahan yang terpelihara dengan baik (%)	100%	91.08%	91.08	Tidak maksimalnya Capaian Barang Milik Daerah yang terpelihara disebabkan tahun 2022 sedang dilakukan rehabilitasi bangunan gedung terhadap Gedung Kantor Bupati dan Bangunan Mess Makassar sehingga beberapa peralatan tidak dapat dilakukan pemeliharaan untuk sementara waktu seperti AC.
			Peningkatan Akuntabilitas Pengelolaan Keuangan, Aset dan Penyusunan Laporan Kinerja serta Peningkatan Kualitas dan Kompetensi Aparatur melalui Pelatihan, Bimtek formal dan Fungsional			Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah kendaraan perorangan dinas atau jabatan yang dipelihara (unit)	45 Unit	45 Unit	100	Capaian Output subkegiatan ini adalah dilakukan pemeliharaan yakni Kendaraan dinas KDH/WKDH/Sekda, suku cadang kendaraan dinas KDH/WKDH/Sekda dan Kendaraan dinas roda empat, dan Kendaraan dinas roda empat operasional yang ada di lingkup Sekretariat Daerah.

**LKPJ SEKRETARIAT DAERAH
TAHUN 2022**

Kode Urusan	Urusan Pemerintahan	Organisasi Perangkat daerah	Arah Kebijakan (Bab 5 Renstra)	Program/Kegiatan/Subkegiatan			Indikator	Target	Realisasi	Tingkat Capaian(9/8*100)	Penjelasan Terhadap Realisasi Program/Kegiatan/Subkegiatan
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	15
			Peningkatan Akuntabilitas Pengelolaan Keuangan, Aset dan Penyusunan Laporan Kinerja serta Peningkatan Kualitas dan Kompetensi Aparatur melalui Pelatihan, Bimtek formal dan Fungsional			Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah kendaraan dinas operasional yang dipelihara dan dibayarkan pajaknya (Unit)	3 Unit	3 Unit	100	Capaian kinerja adalah pemeliharaan 3 unit kendaraan operasional lapangan sesuai dari jumlah yang ditargetkan yakni mobil Bus Pemda dan Truk Operasional.
			Peningkatan Akuntabilitas Pengelolaan Keuangan, Aset dan Penyusunan Laporan Kinerja serta Peningkatan Kualitas dan Kompetensi Aparatur melalui Pelatihan, Bimtek formal dan Fungsional			Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah mebel yang dipelihara (Unit)	126 Unit	126 Unit	100	Realisasi maksimal dengan capaian tersedianya Meubel berupa Meja kursi, Kursi Futura Kantor, Rak Arsip serta Sofa yang sudah dilakukan reparasi.
			Peningkatan Akuntabilitas Pengelolaan Keuangan, Aset dan Penyusunan Laporan Kinerja serta Peningkatan Kualitas dan Kompetensi Aparatur melalui Pelatihan, Bimtek formal dan Fungsional			Pemeliharaan Meubel	Jumlah peralatan dan mesin lainnya yang dipelihara (Unit)	173 Unit	169 Unit	97.69	Telah dilakukan pemeliharaan terhadap Peralatan Kantor seperti Laptop, Printer lingkup Sekretariat Daerah serta Genset dan AC di Kantor Sekretariat Daerah dan Rumah Jabatan.
			Peningkatan Akuntabilitas Pengelolaan Keuangan, Aset dan Penyusunan Laporan Kinerja serta Peningkatan Kualitas dan Kompetensi Aparatur melalui Pelatihan, Bimtek formal dan Fungsional			Pemeliharaan/ Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah gedung kantor dan/atau bangunan lainnya yang dipelihara/direhabilitasi (Unit)	10 Unit	10 Unit	100	Capaian kinerja dari kegiatan ini diantaranya adalah terlaksananya Pemeliharaan Mess Pemda Makassar, Pemeliharaan rumah Jabatan Bupati dan Gedung Pertemuan serta Rehabilitasi Gedung Kantor Bupati
			Peningkatan Akuntabilitas Pengelolaan Keuangan, Aset dan Penyusunan Laporan Kinerja serta Peningkatan Kualitas dan Kompetensi Aparatur melalui Pelatihan, Bimtek formal dan Fungsional		Administrasi Keuangan dan Operasional Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah		Persentase Laporan Administrasi Dana Operasional Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah (%)	100%	54.17%	54.17	Tidak maksimalnya persentase Laporan Administrasi Dana Operasional KDH dan WKDH disebabkan kekosongan jabatan pada Jabatan WKDH.

**LKPJ SEKRETARIAT DAERAH
TAHUN 2022**

Kode Urusan	Urusan Pemerintahan	Organisasi Perangkat daerah	Arah Kebijakan (Bab 5 Renstra)	Program/Kegiatan/Subkegiatan			Indikator	Target	Realisasi	Tingkat Capaian(9/8*100)	Penjelasan Terhadap Realisasi Program/Kegiatan/Subkegiatan
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	15
			Peningkatan Akuntabilitas Pengelolaan Keuangan, Aset dan Penyusunan Laporan Kinerja serta Peningkatan Kualitas dan Kompetensi Aparatur melalui Pelatihan, Bimtek formal dan Fungsional			Penyediaan Gaji dan Tunjangan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah	Jumlah KDH dan WKDH yang dibayarkan Gaji dan Tunjangan (Orang)	2 Orang	1 Orang	50	Terlaksananya pembayaran Gaji dan Tunjangan Bupati selama 12 bulan termasuk Gaji ke 13 dan Gaji ke 14
			Peningkatan Akuntabilitas Pengelolaan Keuangan, Aset dan Penyusunan Laporan Kinerja serta Peningkatan Kualitas dan Kompetensi Aparatur melalui Pelatihan, Bimtek formal dan Fungsional			Penyediaan Pakaian Dinas dan Atribut Kelengkapan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah	Jumlah pakaian dinas dan atribut kelengkapan KDH/WKDH yang diadakan (Stel)	16 Pasang	8 Pasang	50	Telah dilaksanakan pengadaan Pakaian Dinas Bupati beserta Atribut Kelengkapannya.
			Peningkatan Akuntabilitas Pengelolaan Keuangan, Aset dan Penyusunan Laporan Kinerja serta Peningkatan Kualitas dan Kompetensi Aparatur melalui Pelatihan, Bimtek formal dan Fungsional			Pelaksanaan Medical Check Up Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah	Persentase medical check-up KDH dan WKDH yang terlaksana (%)	100%	0%	0%	Biaya Jaminan Pemeliharaan Kesehatan untuk Bupati, Wakil Bupati beserta istri dan 2 (dua) orang anak ini tidak digunakan karena menurut Rekomendasi BPK Biaya Jaminan Kesehatan tersebut tidak bisa digunakan pada Rumah sakit Swasta namun hanya untuk Rumah Sakit Pemerintah sementara untuk jaminan kesehatan pada Rumah Sakit Pemerintah bisa menggunakan BPJS.
			Peningkatan Akuntabilitas Pengelolaan Keuangan, Aset dan Penyusunan Laporan Kinerja serta Peningkatan Kualitas dan Kompetensi Aparatur melalui Pelatihan, Bimtek formal dan Fungsional			Penyediaan Dana Penunjang Operasional Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah	Jumlah Kegiatan Operasional Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah yang dilaksanakan	4 Kegiatan	4 Kegiatan	100	Merupakan kegiatan operasional Bupati seperti Perjalanan Dinas Luar Daerah maupun Dalam Daerah, Biaya Gaji Upah Jasa Ajudan dan Upah Jasa Sopir Bupati
			Peningkatan Akuntabilitas Pengelolaan Keuangan, Aset dan Penyusunan Laporan Kinerja serta Peningkatan Kualitas dan Kompetensi Aparatur melalui Pelatihan, Bimtek formal dan Fungsional		Fasilitasi Kerumahtanggaan Sekretariat Daerah		Persentase Pemenuhan Kebutuhan Rumah Tangga Rujab dan Mess (%)	100%	54.03%	54.03	Tidak maksimalnya persentase pemenuhan Kebutuhan Rumah Tangga KDH/WKDH disebabkan kekosongan Jabatan pada Jabatan WKDH sehingga kebutuhan Rumah Tangganya pun belum terpenuhi.
			Peningkatan Akuntabilitas Pengelolaan Keuangan, Aset dan Penyusunan Laporan Kinerja serta Peningkatan Kualitas dan Kompetensi Aparatur melalui Pelatihan, Bimtek formal dan Fungsional			Penyediaan Kebutuhan Rumah Tangga Kepala Daerah	Jumlah Pemenuhan kebutuhan rumah tangga Kepala Daerah (Jenis)	3 Jenis	3 jenis	100	Terpenuhinya Kebutuhan Rumah Tangga Bupati yakni tersedianya Belanja Bahan Rumah Tangga dan pembayaran Gaji Upah Jasa Cleaning Service dan tenaga Pramusaji pada Rumah Jabatan Bupati selama 12 bulan.

**LKPJ SEKRETARIAT DAERAH
TAHUN 2022**

Kode Urusan	Urusan Pemerintahan	Organisasi Perangkat daerah	Arah Kebijakan (Bab 5 Renstra)	Program/Kegiatan/Subkegiatan			Indikator	Target	Realisasi	Tingkat Capaian(9/8*100)	Penjelasan Terhadap Realisasi Program/Kegiatan/Subkegiatan
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	15
			Peningkatan Akuntabilitas Pengelolaan Keuangan, Aset dan Penyusunan Laporan Kinerja serta Peningkatan Kualitas dan Kompetensi Aparatur melalui Pelatihan, Bimtek formal dan Fungsional			Penyediaan Kebutuhan Rumah Tangga Wakil Kepala Daerah	Jumlah Pemenuhan kebutuhan rumah tangga wakil Kepala Daerah (Jenis)	4 Jenis	1 Jenis	25	Kebutuhan Rumah Tangga Wakil Bupati tidak terpenuhi maksimal disebabkan Jabatan Wakil Bupati masih kosong, adapun 1 jenis yang terpenuhi adalah Upah Jasa tenaga Kebersihan atau Cleaning Service
			Peningkatan Akuntabilitas Pengelolaan Keuangan, Aset dan Penyusunan Laporan Kinerja serta Peningkatan Kualitas dan Kompetensi Aparatur melalui Pelatihan, Bimtek formal dan Fungsional			Penyediaan Kebutuhan Rumah Tangga Sekretariat Daerah	Jumlah Pemenuhan kebutuhan rumah tangga sekretariat daerah dan Mess (jenis)	7 jenis	7 Jenis	100	Output dari kegiatan ini adalah pembayaran PBB untuk Mess Jakarta dan Makassar, Pembayaran Uang makan minum piket pada Mess Pemda Jakarta dan Mess Pemda Makassar, Pembayaran luran Kebersihan Mess, Pembayaran tenaga Upah Jasa yang ada di Rumah Jabatan Sekretariat Daerah yaitu Upah Jasa Cleaning service dan Pramusaji serta pemenuhan kebutuhan rumah Tangga Mess Pemda.
			Peningkatan Akuntabilitas Pengelolaan Keuangan, Aset dan Penyusunan Laporan Kinerja serta Peningkatan Kualitas dan Kompetensi Aparatur melalui Pelatihan, Bimtek formal dan Fungsional		Penataan Organisasi		Persentase OPD yang meningkat nilai saki (%) .	31.71%	82.05%	82.05	Dari 39 OPD se Kabupaten Luwu Timur 32 OPD diantaranya dapat menaikkan nilai predikat nilai SAKIPnya dari Tahun 2020 ke Tahun 2021 berdasarkan Hasil Evaluasi Internal dari Inspektorat Kabupaten Luwu Timur
							Persentase OPD yang menghasilkan Inovasi pelayanan publik (%)	50%	40%	80.00	Dari 10 OPD yang dilakukan pendampingan untuk menghasilkan inovasi ada 3 OPD yang berhasil menghasilkan 4 Inovasi Pelayanan Publik yakni Puskesmas Angkona, Puskesmas Mangkutana dan Puskesmas Nuha
			Peningkatan Akuntabilitas Pengelolaan Keuangan, Aset dan Penyusunan Laporan Kinerja serta Peningkatan Kualitas dan Kompetensi Aparatur melalui Pelatihan, Bimtek formal dan Fungsional			Pengelolaan Kelembagaan dan Analisis Jabatan (OPD)	Jumlah Perangkat daerah yang dilakukan Penataan Kelembagaan (Perangkat Daerah)	39 OPD	47 OPD	120.51	Capaian kinerja output berupa Dokumen Jabatan dari seluruh OPD sebanyak 40 OPD dan Peraturan Bupati Kelembagaan sebanyak 7 Perbup yang terdiri dari 6 (enam) Perbup UPT Perubahan dan 1 (satu) Perbup Inspektorat.
			Peningkatan Akuntabilitas Pengelolaan Keuangan, Aset dan Penyusunan Laporan Kinerja serta Peningkatan Kualitas dan Kompetensi			Fasilitasi Pelayanan Publik dan Tata Laksana (OPD)	Jumlah Sosialisasi Tata Laksana yang Difasilitasi (Kegiatan)	1 Kegiatan	0	0.00	Sosialisasi tidak terlaksana karena kegiatannya dialihkan ke Monitoring dan Evaluasi Proses Bisnis

**LKPJ SEKRETARIAT DAERAH
TAHUN 2022**

Kode Urusan	Urusan Pemerintahan	Organisasi Perangkat daerah	Arah Kebijakan (Bab 5 Renstra)	Program/Kegiatan/Subkegiatan			Indikator	Target	Realisasi	Tingkat Capaian(9/8*100)	Penjelasan Terhadap Realisasi Program/Kegiatan/Subkegiatan
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	15
			Aparatur melalui Pelatihan, Bimtek formal dan Fungsional				Jumlah OPD yang dibina dalam rangka menghasilkan inovasi pelayanan publik (Perangkat Daerah). Jumlah Sosialisasi Tata Laksana yang dilaksanakan (Kegiatan)	10 OPD	4 OPD	40	Telah dilakukan penjaringan dan pendampingan 4 Inovasi pelayanan publik tingkat OPD dan mengikuti kompetensi Inovasi pelayanan publik tingkat provinsi dan Nasional. Kegiatan yang telah dilaksanakan lainnya adalah pengadaan ID Card ASN.
			Peningkatan Akuntabilitas Pengelolaan Keuangan, Aset dan Penyusunan Laporan Kinerja serta Peningkatan Kualitas dan Kompetensi Aparatur melalui Pelatihan, Bimtek formal dan Fungsional			Peningkatan Kinerja dan Reformasi Birokrasi (OPD)	Jumlah Perangkat Daerah yang dibina dalam rangka peningkatan Kinerja dan Reformasi Birokrasi (Perangkat Daerah)	39 Kegiatan	39 Kegiatan	100	Capaian kinerja output berupa Penguatan pelaksanaan RB Kabupaten Luwu Timur yang diukur dengan indeks Reformasi Birokrasi, adapun nilai dari Menteri PAN mengalami kenaikan yakni dari nilai C ke CC sementara LHE belum diterima
			Peningkatan Akuntabilitas Pengelolaan Keuangan, Aset dan Penyusunan Laporan Kinerja serta Peningkatan Kualitas dan Kompetensi Aparatur melalui Pelatihan, Bimtek formal dan Fungsional			Monitoring, Evaluasi dan Pengendalian Kualitas Pelayanan Publik dan Tata Laksana	Jumlah laporan hasil monitoring, evaluasi, dan pengendalian kualitas pelayanan publik dan tata laksana (Laporan)	2 Laporan	2 Laporan	100	Capaian output berupa Laporan hasil Monitoring dan Evaluasi Proses Bisnis dan Dokumen SKM (Survey Eksternal Kualitas Pelayanan Publik)
			Peningkatan Akuntabilitas Pengelolaan Keuangan, Aset dan Penyusunan Laporan Kinerja serta Peningkatan Kualitas dan Kompetensi Aparatur melalui Pelatihan, Bimtek formal dan Fungsional			Koordinasi dan Penyusunan Laporan Kinerja Pemerintah Daerah	Jumlah dokumen LAKIP pemerintah daerah yang disusun	1 Dok	1 Dok	100	Realisasi maksimal dengan capaian kinerja output berupa Nilai Laporan Evaluasi Akuntabilitas Kinerja LAKIP Kabupaten Luwu Timur Tahun 2021 masih tetap dengan nilai B disebabkan Aplikasi E-SAKIP belum berbasis Kinerja tapi masih berbasis Anggaran, sementara LHE juga belum diterima dari Menteri PAN
			Peningkatan Akuntabilitas Pengelolaan Keuangan, Aset dan Penyusunan Laporan Kinerja serta Peningkatan Kualitas dan Kompetensi Aparatur melalui Pelatihan, Bimtek formal dan Fungsional		Pelaksanaan Protokol dan Komunikasi Pimpinan		Jumlah Keprotokoleran, komunikasi dan pendokumentasian pimpinan yang difasilitasi	900 Kegiatan	900 Kegiatan	100	Capaian realisasi kinerja pada bagian Protokol dan Komunikasi Pimpinan berjalan sesuai dengan target yang ditetapkan sampai dengan akhir tahun 2022 sebesar 900 Kegiatan dari tiga sub bagian mencapai 100 persen dengan predikat kinerja 100 persen. Dari jumlah 900 kegiatan itu terdiri dari fasilitasi kegiatan OPD, pelayanan masyarakat, hingga menghadiri berbagai hajatan masyarakat. Meski begitu masih terdapat beberapa kendala yang penting untuk menjadi bahan evaluasi kedepan

**LKPJ SEKRETARIAT DAERAH
TAHUN 2022**

Kode Urusan	Urusan Pemerintahan	Organisasi Perangkat daerah	Arah Kebijakan (Bab 5 Renstra)	Program/Kegiatan/Subkegiatan			Indikator	Target	Realisasi	Tingkat Capaian(9/8*100)	Penjelasan Terhadap Realisasi Program/Kegiatan/Subkegiatan
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	15
			Peningkatan Akuntabilitas Pengelolaan Keuangan, Aset dan Penyusunan Laporan Kinerja serta Peningkatan Kualitas dan Kompetensi Aparatur melalui Pelatihan, Bimtek formal dan Fungsional			Fasilitasi Keprotokolan	Jumlah kegiatan kedinasan KDH/WKDH yang difasilitasi	300 Kegiatan	300 Kegiatan	100	Kegiatan yang dilakukan pada Subkegiatan ini adalah Meliput kegiatan kedinasan Pimpinan yang meliputi tata tempat, tata upacara dan tata penghormatan, liputan lapangan, dokumentasi foto, serta mengelola media sosial.
			Peningkatan Akuntabilitas Pengelolaan Keuangan, Aset dan Penyusunan Laporan Kinerja serta Peningkatan Kualitas dan Kompetensi Aparatur melalui Pelatihan, Bimtek formal dan Fungsional			Fasilitasi Komunikasi Pimpinan	Jumlah Komunikasi Pimpinan yang difasilitasi	300 Kegiatan	300 Kegiatan	100	Memfasilitasi komunikasi KDH/WKDH.
			Peningkatan Akuntabilitas Pengelolaan Keuangan, Aset dan Penyusunan Laporan Kinerja serta Peningkatan Kualitas dan Kompetensi Aparatur melalui Pelatihan, Bimtek formal dan Fungsional			Pendokumentasian Tugas Pimpinan	Jumlah informasi kedinasan KDH/WKDH yang didokumentasikan/ dipublikasikan	300 Kegiatan	300 Kegiatan	100	Bentuk kegiatan yang dilakukan pada Subkegiatan ini adalah mendokumentasikan/mempublikasikan informasi kedinasan KDH/WKDH.
				PROGRAM PEMERINTAHAN DAN KESEJAHTERAAN RAKYAT			Persentase rekomendasi kebijakan bidang pemerintahan dan kesra yang ditindaklanjuti dan dilaksanakan	100%	100%	100	Capaian Maksimal persentase rekomendasi kegiatan dapat terlaksana sesuai target Rekomendasi kebijakan Kesejahteraan Rakyat
					Administrasi Tata Pemerintahan		Jumlah Rekomendasi administrasi tata pemerintahan yang dihasilkan	4 Laporan	4 Laporan	100	Capaian Output adalah terlaksananya penyusunan Laporan LPDP, SPM dan RLPPD Tahun 2021 serta review EKPPD oleh Tim daerah Inspektorat Provinsi
						Penataan Administrasi Pemerintahan	Jumlah Kelurahan dan Kecamatan yang ditata administrasinya pemerintahannya	11 Kel/Kec.	14 Kel/Kec.	127.27	Capaian output adalah terfasilitasinya penataan administrasi kelurahan dan kecamatan, yang terdiri dari 11 kecamatan (Burau, Wotu, Angkona, Malili, Wasuponda, Nuha, Towuti, Tomoni, Tomoni Timur, Mangkutana dan Kalaeana) dan 3 Kelurahan (Malili, Magani dan Tomoni) yang ditargetkan tiap triwulan sebanyak 14 administrasi kecamatan/kelurahan sampai dengan Triwulan ke 4 telah terlaksana monitoring dan Evaluasi kecamatan dan kelurahan serta fasilitasi penyelesaian kasus pengaduan

**LKPJ SEKRETARIAT DAERAH
TAHUN 2022**

Kode Urusan	Urusan Pemerintahan	Organisasi Perangkat daerah	Arah Kebijakan (Bab 5 Renstra)	Program/Kegiatan/Subkegiatan			Indikator	Target	Realisasi	Tingkat Capaian(9/8*100)	Penjelasan Terhadap Realisasi Program/Kegiatan/Subkegiatan
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	15
						Pengelolaan Administrasi Kewilayahan	Jumlah Peta yang dihasilkan	30 Peta	34 Peta	113.33	Memfasilitasi penyediaan dokumen penegasan batas wilayah, yang fokus kerjanya di wilayah batas desa, sesuai dengan amanat Peraturan Menteri Dalam Negeri (Permendagri 45 tahun 2016 terkait Pedoman Penetapan dan Penegasan Batas Desa, telah menghasilkan 34 Peta Desa yang kemudian dibuatkan Peraturan Bupati di Bagian Hukum, meliputi 5 Desa di Kecamatan Angkona (Desa Balirejo, Maliwowo, Solo, Wanasari dan Watangpanua), 5 Desa di Kalaena (Argomulyo, Kalaena Kiri, Mekar Sari, Sumber Makmur dan Sumber Agung), 8 Desa di Kecamatan Tomoni (Desa Bangun Jaya, Bangun Karya, Beringin Jaya, Kalpataru, Mulyasri, Rante Mario, Sumber Alam dan Tadulako), 5 Desa di Kecamatan Tomoni Timur (Desa Alam Buana, Cendana Hitam Timur, Manunggal, Margomulyo dan Purwosari) dan 11 Desa di Wotu (Desa Arolipu, Bahari, Bawalipu, Kalaena, Karambua, Lampenai, Madani, Rinjani, Tabaroge, Tarengge dan Desa Tarengge Timur. Adapun penambahan Anggaran pada Perubahan Anggaran namun target kinerja tetap disebabkan penambahan anggaran diperuntukkan untuk perjalanan dinas kegiatan desa Arolipu kecamatan Wotu dan konsultasi ke Badan Informasi Geospasial (BIG) dan Dirjen Bina Marga administrasi kewilayahan terkait batas desa Lampenai, Desa Bawalipu, Desa Lera dan desa Tarengge.
						Fasilitasi Pelaksanaan Otonomi Daerah	Jumlah Laporan pelaksanaan otonomi daerah yang difasilitasi	3 Laporan	3 Laporan	100	Realisasi maksimal dengan capaian output Penyusunan laporan LPPD, SPM dan RLPPD tahun 2021 hingga pada Triwulan IV dan dilakukannya reviu EKPPD oleh Tim daerah Inspektorat Provinsi.
					Pelaksanaan Kebijakan Kesejahteraan Rakyat		Jumlah Rekomendasi pelaksanaan kebijakan kesejahteraan rakyat yang dihasilkan	4 Rekomendasi	4 Rekomendasi	100	Rekomendasi yang telah direalisasikan adalah : 1. Keputusan Bupati Luwu Timur tentang Penetapan Besaran Beasiswa Tahun Anggaran 2022, 2. Keputusan Bupati Luwu Timur tentang Hibah Tahun Anggaran 2022, 3. Keputusan Bupati Luwu Timur tentang Penetapan Besaran Upah petugas Keagamaan, 4. Keputusan Bupati Luwu Timur tentang Tim Pembina Usaha Kesehatan Sekolah/Madrasah Tahun 2022
						Fasilitasi Pengelolaan Bina Mental Spiritual	Jumlah Kegiatan keagamaan yang dilaksanakan	7 Kegiatan	7 Kegiatan	100	Kegiatan Bina Mental Spiritual yang difasilitasi yakni 1. Kegiatan Hari-Hari Besar Keagamaan; 2. Pembinaan Keagamaan; 3. Musabagah Tilawatil Qura'an (MTQ); 4. Pemberian Honorarium/Upah Rohaniawan/Petugas Keagamaan; 5. Ibadah Haji; 6. Apresiasi Wisata Religi; 7. Pemberian Hibah kepada Lembaga Keagamaan dan Rumah Ibadah sebanyak 25 tempat ibadah yakni 20 mesjid, 2 Gereja, dan 3 Pura.

**LKPJ SEKRETARIAT DAERAH
TAHUN 2022**

Kode Urusan	Urusan Pemerintahan	Organisasi Perangkat daerah	Arah Kebijakan (Bab 5 Renstra)	Program/Kegiatan/Subkegiatan			Indikator	Target	Realisasi	Tingkat Capaian(9/8*100)	Penjelasan Terhadap Realisasi Program/Kegiatan/Subkegiatan
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	15
						Pelaksanaan Kebijakan, Evaluasi, dan Capaian Kinerja terkait Kesejahteraan Sosial	Jumlah kegiatan kesejahteraan sosial yang dibina dan dievaluasi	2 Kegiatan	2 Kegiatan	100	Output dari Kegiatan ini adalah 1. Monitoring dan Evaluasi Tempat Ibadah terhadap Proposal Permohonan Hibah Lembaga Keagamaan dan Tempat Ibadah; 2. Pemberian Beasiswa Kurang Mampu kepada 332 orang mahasiswa Luwu Timur dari berbagai Universitas di Indonesia..
						Pelaksanaan Kebijakan, Evaluasi, dan Capaian Kinerja terkait Kesejahteraan Masyarakat	Jumlah kegiatan kesejahteraan masyarakat yang dibina dan dievaluasi	3 Kegiatan	3 Kegiatan	100	Kegiatan yang telah dilakukan adalah Koordinasi UKS/M tentang rencana lomba pada tahun 2023, Pemberian Beasiswa Berprestasi sebanyak 5661 orang termasuk hasil seleksi dari Dinas Pendidikan dan Kebudayaan dan Penyelesaian Studi kepada mahasiswa untuk menunjang penelitian atau penunjang lainnya bagi program pascasarjana yakni 24 orang Mahasiswa S2 dan S3.,
			Melaksanakan Pendampingan kepada Perangkat Daerah dalam menyusun regulasi yang Implementatif di Daerah		Fasilitasi dan Koordinasi Hukum		Persentase koordinasi hukum yang dilaksanakan (%)	85%	98%	115.29	Capaian persentase koordinasi hukum yang dilaksanakan diperoleh dari rata-rata capaian kinerja sub kegiatan yang mendukung capaian kegiatan. Capaian kinerja sub kegiatan fasilitasi penyusunan produk hukum daerah, capaian fasilitasi bantuan hukum dan capaian pendokumentasian produk hukum dan pengelolaan informasi hukum dijumlahkan kemudian dibagi 3 sesuai jumlah sub kegiatan yang mendukung.
			Melaksanakan Pendampingan kepada Perangkat Daerah dalam menyusun regulasi yang Implementatif di Daerah			Fasilitasi Penyusunan Produk Hukum Daerah	Jumlah Produk Hukum yang ditetapkan (Perda/Perbup/SK)	400 Produk Hukum	461 Produk Hukum	115.25	Capaian output berupa produk hukum yang ditetapkan sampai dengan Triwulan IV, jumlah produk hukum daerah yang ditetapkan melebihi target asumsi. Dari target asumsi sebanyak 400 Dokumen, rancangan produk hukum daerah yang difasilitasi dan dapat ditetapkan sebanyak 460 Dokumen yang terdiri dari 13 Perda, 55 Perbup, dan 393 SK. Meskipun capaian melebihi asumsi, namun masih terdapat rancangan produk hukum daerah yang diusulkan oleh pengampu/pengusul belum dilakukan koreksi. hal ini disebabkan oleh karena kurangnya tenaga perancang perundang-undangan. selain itu hal ini juga menyebabkan tingkat ketepatan waktu proses penyelesaian suatu produk hukum daerah masih lambat atau tidak sesuai dengan target waktu yang telah ditetapkan.
			Melaksanakan Pendampingan kepada Perangkat Daerah dalam menyusun regulasi yang Implementatif di Daerah			Fasilitasi Bantuan Hukum	Jumlah kasus yang didampingi melalui bantuan hukum (Kasus)	2 Kasus	0 Kasus	0	Melalui pelaksanaan sub kegiatan ini telah dilakukan banyak aktivitas yang menghasilkan hasil kerja antara lain analisis dan telaah permasalahan hukum, penyusunan laporan HAM, kajian perundang-undangan, konsep perjanjian kerja sama dan layanan konsultasi hukum. Dalam rangka pemenuhan Hak Asasi Manusia, pada tahun anggaran 2022 juga telah dilaksanakan penyusunan Rancangan Perda tentang Bantuan Hukum. Nantinya kebijakan ini akan memberikan landasan Pemerintah Daerah dalam menyelenggarakan bantuan hukum bagi masyarakat miskin. Sehingga setelah Perda ini berlaku maka masyarakat yang masuk kategori miskin dapat memohon bantuan hukum secara cuma-cuma kepada Pemerintah Daerah. Saat penyusunan laporan ini telah masuk pada tahap pembahasan Bersama dengan DPRD Kabupaten Luwu Timur.

**LKPJ SEKRETARIAT DAERAH
TAHUN 2022**

Kode Urusan	Urusan Pemerintahan	Organisasi Perangkat daerah	Arah Kebijakan (Bab 5 Renstra)	Program/Kegiatan/Subkegiatan			Indikator	Target	Realisasi	Tingkat Capaian(9/8*100)	Penjelasan Terhadap Realisasi Program/Kegiatan/Subkegiatan
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	15
			Melaksanakan Pendampingan kepada Perangkat Daerah dalam menyusun regulasi yang Implementatif di Daerah				Jumlah produk hukum yang dipublikasikan (Perda/Perbup/SK)	400 Produk Hukum	461 Produk Hukum	115.25	Realisasi jumlah produk hukum yang dipublikasikan sebanyak 461 Dokumen. Jumlah ini melebihi target asumsi yang telah ditetapkan. Seluruh produk hukum yang telah ditetapkan telah dipublikasikan sesuai standar. Produk Hukum daerah yang berbentuk pengaturan telah diundangkan dalam Lembaran Daerah untuk Peraturan Daerah dan dalam Berita daerah untuk Peraturan Bupati sedangkan produk hukum daerah yang berbentuk penetapan telah diarsipkan sesuai dengan standar penyimpanan dokumen produk hukum
						Pendokumentasian Produk Hukum dan Pengelolaan Informasi Hukum	Jumlah Desa Sadar Hukum	11 Desa	11 Desa	100	Realisasi jumlah Desa binaan sadar hukum yang dilakukan sebanyak 11 Desa sesuai dengan target yang telah ditetapkan. Adapun desa yang dibina sebagai berikut: 1. Laro 2. Lambara Harapan 3. Tabaroge 4. Bahari 5. Ujung Baru 6. Rante Mario 7. Kasintuwu 8. Wewangriu 9. Lakawali Pantai 10. Tokalimbo 11. Ranteangin Penetapan desa yang menjadi Binaan Sadar Hukum ditargetkan sebanyak 22 Desa per tahun, untuk Tahun 2022 Jumlah Desa/Kelurahan yang dibina sebanyak 11 desa/kelurahan berkurang dari target per tahun disebabkan oleh karena ketersediaan Anggaran. Jumlah Desa dan Kelurahan sampai dengan Tahun 2022 yang telah dilakukan pembinaan sebanyak 109 Desa dan Kelurahan. 19 desa tersisa akan dilakukan pembinaan secara bertahap di tahun 2023 sebanyak 11 desa, di tahun 2024 sebanyak 8 desa.
					Fasilitasi Kerjasama Daerah		Jumlah kerja sama daerah yang difasilitasi (MOU)	30 PKS	22 PKS	73.33	Capain Output berupa Perjanjian Kerja Sama dengan BPN Kab. Lutim, P2KP Unhas, Yayasan Save The cildren, BLK Makassar, PT Vale Indonesia Tbk, Kabupaten Kulon Progo, Kab Rembang, BKD Provinsi, PT Bak Sulsebar dan terakhir dengan Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin
						Fasilitasi Kerja Sama luar Negeri	Jumlah MOU Luar Negeri yang difasilitasi	22 MOU	29 MOU	131.82	Capaian Output berupa fasilitasi kerjasama daerah, hingga triwulan IV tahun 2022 yakni sebanyak 56 dokumen, diantaranya 35 dokumen Kesepakatan Bersama, baik dengan daerah lain, instansi vertikal maupun dengan pihak ketiga) dan 21 Perjanjian Kerja sama yang telah dibuat.
						Evaluasi Peaksanaan Kerjasama	Jumlah Kerja sama yang dievaluasi	2 MOU	2 MOU	100	Realisasi maksimal dengan Capaian Kinerja Output dilakukan evaluasi kesepakatan bersama dengan Universitas Cokroaminoto palopo dan Pihak ketiga yakni Save the children untuk perpanjangan kesepakatan bersama.

**LKPJ SEKRETARIAT DAERAH
TAHUN 2022**

Kode Urusan	Urusan Pemerintahan	Organisasi Perangkat daerah	Arah Kebijakan (Bab 5 Renstra)	Program/Kegiatan/Subkegiatan			Indikator	Target	Realisasi	Tingkat Capaian(9/8*100)	Penjelasan Terhadap Realisasi Program/Kegiatan/Subkegiatan
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	15
			Melaksanakan pengembangan, pengkajian dan Monev terhadap kebijakan perekonomian daerah.	PROGRAM PEREKONOMIAN DAN PEMBANGUNAN			Persentase rekomendasi sektor perekonomian dan pembangunan yang ditindaklanjuti dan dilaksanakan (Rekomendasi)	50%	37,49%	74.98	Rekomendasi yang dihasilkan adalah Dokumen Anaisis Kelayakan Usaha dan Kebutuhan Daerah BUMD, Usulan Penyesuaian tarif air minum ke provinsi, Usulan pendirian BUMD ke Kemendagri, dan Hasil Evaluasi BUMD, Rekomendasi yang dihasilkan adalah Rekomendasi untuk mengikutkan UMKM dalam pameran UMKM, Penguatan tentang pelaporan UMKM yang telah dilaksanakan di Kabupaten Luwu Timur dan Rekomendasi untuk melakukan sosialisasi terkait penipuan online berkedok Investasi oleh OJK serta Rekomendasi Rekomendasi percepatan Daya Sera APBD, Rekomendasi Percepatan Pelaksanaan Kegiatan Fisik, Rekomendasi Pelaksanaan DAK. Adapun penetapan target 50% karena rekomendasi yang dihasilkan dilaksanakan oleh OPD teknis terkait dan untuk tahun berikutnya akan dilakukan perbaikan target agar lebih efisien dan dengan perbaikan target disertai dengan pelaksanaan evaluasi secara periodik.
			Melaksanakan pengembangan, pengkajian dan Monev terhadap kebijakan perekonomian daerah.		Pelaksanaan Kebijakan Perekonomian		Jumlah rekomendasi kebijakan perekonomian yang dihasilkan (rekomendasi)	12 Rekomendasi	11 Rekomendasi	91.67	Rekomendasi yang dihasilkan adalah Dokumen Anaisis Kelayakan Usaha dan Kebutuhan Daerah BUMD, Usulan Penyesuaian tarif air minum ke provinsi, Usulan pendirian BUMD ke Kemendagri, dan Hasil Evaluasi BUMD, Rekomendasi yang dihasilkan adalah Rekomendasi untuk mengikutkan UMKM dalam pameran UMKM, Penguatan tentang pelaporan UMKM yang telah dilaksanakan di Kabupaten Luwu Timur dan Rekomendasi untuk melakukan sosialisasi terkait penipuan online berkedok Investasi oleh OJK
			Melaksanakan pengembangan, pengkajian dan Monev terhadap kebijakan perekonomian daerah.			Koordinasi, Sinkronisasi, Monitoring dan Evaluasi Kebijakan Pengelolaan BUMD dan BLUD	Jumlah rekomendasi kebijakan pengelolaan BUMD dan BLUD yang dihasilkan (rekomendasi)	4 Rekomendasi	4 Rekomendasi	100	Penyusunan Rancangan Perda BUMD tidak dilaksanakan karena belum ada rekomendasi hasil penilaian dari Kemendagri dan untuk penyesuaian bentuk hukum BUMD masih menunggu petunjuk lebih lanjut dari Biro Hukum Mendagri dan Dirjen Bina Keuangan Daerah. Rekomendasi yang dihasilkan adalah Dokumen Analisis Kelayakan Usaha dan Kebutuhan Daerah BUMD, Usulan Penyesuaian tarif air minum ke provinsi, Usulan pendirian BUMD ke Kemendagri, dan Hasil Evaluasi BUMD. Pelaksanaan kegiatan ini menyangkut Evaluasi, Monitoring Kebijakan Pengelolaan BUMD dan BLUD yang ada di Kabupaten Luwu Timur yang mana terdiri dari 4 BUMD dan satu Perseroada.
			Melaksanakan pengembangan, pengkajian dan Monev terhadap kebijakan perekonomian daerah.			Pengendalian dan Distribusi Perekonomian	Jumlah rekomendasi kebijakan pengendalian dan distribusi perekonomian yang dihasilkan (rekomendasi)	4 Rekomendasi	4 Rekomendasi	100	Kegiatan yang dilaksanakan antara lain, Pengendalian Inflasi Daerah (TPID), dan Pelaksanaan Koordinasi Dana Bagi Hasil Cukai Hasil Tembakau (DBH-CHT) dalam pelaksanaan Kegiatan Pengendalian Inflasi Daerah ini pada bulan Desember 2022 kabupaten Luwu timur mencapai inflasi sebesar 5,13% yang mengikuti Laporan Badan Pusat Sataistik Zona Palopo yang mencakup Beberapa Kabupaten kota yang berada di Luwu Raya. Dan selanjutnya dalam Kegiatan Dana Bagi Hasil Cukai Hasil Tembakau ini Bagian Ekonomi dan Pembangunan adalah merupakan Koordinator bagi Beberapa SKPD yang mengelola Dana Bagi Hasil Cukai Hasil Tembakau yang terdiri dari Kantor Satpol PP, Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi serta dinas Kesehatan selaku pengelola Dana Bagi Hasil Cukai Hasil Tembakau untuk Tahun 2022.

**LKPJ SEKRETARIAT DAERAH
TAHUN 2022**

Kode Urusan	Urusan Pemerintahan	Organisasi Perangkat daerah	Arah Kebijakan (Bab 5 Renstra)	Program/Kegiatan/Subkegiatan			Indikator	Target	Realisasi	Tingkat Capaian(9/8*100)	Penjelasan Terhadap Realisasi Program/Kegiatan/Subkegiatan
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	15
			Melaksanakan pengembangan, pengkajian dan Monev terhadap kebijakan perekonomian daerah.			Perencanaan dan Pengawasan Ekonomi Mikro kecil	Jumlah rekomendasi kebijakan perencanaan dan pengawasan ekonomi mikro kecil yang dihasilkan (rekomendasi)	4 Rekomendasi	3 Rekomendasi	75	Rekomendasi yang dihasilkan adalah Rekomendasi untuk mengikutkan UMKM dalam pameran UMKM, Penguatan tentang pelaporan UMKM yang telah dilaksanakan di Kabupaten Luwu Timur dan Rekomendasi untuk melakukan sosialisasi terkait penipuan online berkedok Investasi oleh OJK. Pada Sub Kegiatan ini dilaksanakan beberapa hal yakni Koordinasi yang berkaitan dengan Percepatan Akses Keuangan di Daerah (TPAKD) yang mana terdiri dari koordinasi tentang Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM), fasilitasi beberapa kegiatan sosialisasi yang dilaksanakan oleh Otoritas Jasa Keuangan (OJK) serta kegiatan lintas sektor yang dilaksanakan pada sub kegiatan ini.
			Melaksanakan pengembangan, pengkajian dan Monev terhadap kebijakan perekonomian daerah.		Pelaksanaan Administrasi Pembangunan		Jumlah rekomendasi pelaksanaan administrasi pembangunan yang dihasilkan (rekomendasi)	8 Rekomendasi	8 Rekomendasi	100	Kegiatan ini menghasilkan Rekomendasi yang ditindak lanjuti dan dilaksanakan berupa: 1. Percepatan Daya Sera APBD Rekomendasi Percepatan Pelaksanaan Kegiatan Fisik, 2. Rekomendasi Pengendalian dan Pelaksanaan DAK, 3. Percepatan Daya Serap DAK (APBN) ; 4. Pelaporan melalui Aplikasi TEPR (Tim Evaluasi dan Pengawasan Reaisasi Anggaran tingkat Provinsi Sulawesi Selatan) 5. Keputusan Bupati terkait penetapan proyek strategis daerah; 6. Pendampingan proyek Strategis oleh Kejaksaan Negeri Luwu Timur; 7. Hasil evaluasi peaksanaan pekerjaan fisik Pemerintah Kabupaten Luwu Timur; 8. Hasil Rapat Koordinasi Pengendalian Pembangunan Daerah.
			Melaksanakan pengembangan, pengkajian dan Monev terhadap kebijakan perekonomian daerah.			Pengendalian dan Evaluasi Program Pembangunan	Jumlah rekomendasi Pelaksanaan Pengendalian dan evauasi pembangunan (Rekomendasi)	4 Rekomendasi	4 Rekomendasi	100.00	kegiatan yang dilakukan adalah pelaporan pelaksanaan Pembangunan Daerah yang dilaporkan ke provinsi termasuk anggaran Dana Alokasi Khusus (DAK) yang pelaporannya dilakukan setiap bulannya. Adapun Rekomendasi yang dihasilkan adalah: 1. Hasil Rapat Koordinasi Pengendalian dan Pelaksanaan DAK; 2. Percepatan Daya Serap APBD; 3. Percepatan Daya Serap DAK (APBN) ; 4. Pelaporan melalui Aplikasi TEPR (Tim Evaluasi dan Pengawasan Reaisasi Anggaran tingkat Provinsi Sulawesi Selatan)

**LKPJ SEKRETARIAT DAERAH
TAHUN 2022**

Kode Urusan	Urusan Pemerintahan	Organisasi Perangkat daerah	Arah Kebijakan (Bab 5 Renstra)	Program/Kegiatan/Subkegiatan			Indikator	Target	Realisasi	Tingkat Capaian(9/8*100)	Penjelasan Terhadap Realisasi Program/Kegiatan/Subkegiatan
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	15
			Melaksanakan pengembangan, pengkajian dan Monev terhadap kebijakan perekonomian daerah.			Pengelolaan Evaluasi dan Pelaporan Pelaksanaan Pembangunan	Jumlah rekomendasi pelaksanaan pembangunan fisik (Rekomendasi)	4 Rekomendasi	4 Rekomendasi	100	Dilaksanakan evaluasi dan pelaporan kegiatan fisik yang telah dilaksanakan oleh masing-masing Organisasi Perangkat Daerah (OPD) yang mempunyai Kegiatan Fisik dan dilakukan monitoring oleh Bagian Ekonomi dan Pembangunan (Ekbang). Setelah dilakukan monitoring selanjutnya akan dilakukan rapat koordinasi pada masing-masing kegiatan yang mengalami permasalahan-permasalahan atau kendala-kendala yang dihadapi untuk dicarikan solusinya. adapun rekomendasi yang dihasilkan adalah: 1. Keputusan Bupati terkait penetapan proyek strategis daerah; 2. Pendampingan proyek Strategis oleh Kejaksaan Negeri Luwu Timur; 3. Hasil evaluasi pelaksanaan pekerjaan fisik Pemerintah Kabupaten Luwu Timur; 4. Hasil Rapat Koordinasi Pengendalian Pembangunan Daerah.
					Pengelolaan Pengadaan Barang dan Jasa		Persentase Pengelolaan Pengadaan Barang dan Jasa (%)	80%	111.49%	139.36	Kegiatan Pengelolaan Barang dan Jasa adalah suatu kegiatan yang memfasilitasi penyelenggaraan pelaksanaan pemilihan penyedia Barang/ Jasa, di mana pada Tahun 2022 dari target 800 paket telah terealisasi sebanyak 1233 paket yang telah dihasilkan dari proses pengadaan barang dan jasa. Pengelolaan sistem Informasi Pengadaan Barang/Jasa yang dikelola melalui Layanan Pengadaan secara Elektronik di mana pada Tahun 2022 telah dimanfaatkan penggunaan 7 Aplikasi yakni SIRUP, SPSE, SIKAP, EKATALOG, LPSE SUPPORT, BELA PENGADAAN/TOKO DARING dan E-KONTRAK serta Pembinaan dan Pendampingan bagi pelaku Pengadaan Barang/Jasa terutama bagi pengelola pengadaan Barang/Jasa dan UKPBJ. di mana Tahun 2022 telah dilakukan pembinaan dalam bentuk kegiatan sosialisasi terhadap regulasi mengenai Pengadaan Barang dan Jasa sekaligus dilakukan pendampingan terhadap permasalahan dan penyelesaian di bidang pengadaan Barang dan Jasa. adapun penetapan target 80% adalah capaian target pelaksanaan pengadaan barang/jasa setelah memperhitungkan paket-paket yang gagal menghasilkan penyedia baik itu tender maupun pengadaan langsung serta e-purchasing atau pembelian melalui e-katalog.
						Pengelolaan Pengadaan Barang dan Jasa	Jumlah paket yang diproses oleh POKJA dan Pejabat Pengada (Paket)	800 Paket	1233 Paket	154.13	Kegiatan ini memfasilitasi pelaksanaan pemilihan penyedia, baik itu pelaksanaan tender, pengadaan langsung maupun e-purchasing. Realisasi Maksimal dengan Capaian Kinerja Output 1233 paket tender dan pengadaan langsung.

**LKPJ SEKRETARIAT DAERAH
TAHUN 2022**

Kode Urusan	Urusan Pemerintahan	Organisasi Perangkat daerah	Arah Kebijakan (Bab 5 Renstra)	Program/Kegiatan/Subkegiatan			Indikator	Target	Realisasi	Tingkat Capaian(9/8*100)	Penjelasan Terhadap Realisasi Program/Kegiatan/Subkegiatan
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	15
						Pengelolaan Layanan Pengadaan Secara Elektronik	Jumlah Aplikasi Digital pendukung layanan pengadaan Barang dan Jasa yang dapat diakses oleh Perangkat Daerah, Pelaku Usaha, dan UMK (aplikasi)	7 Aplikasi	7 Aplikasi	100	Realisasi maksima dengan capaian output berupa penerapan aplikasi yang dapat diakses oleh OPD, Pelaku Usaha dan UKM. Aplikasi yang pengelolaannya melalui LPSE sebanyak 7 aplikasi yakni SIRUP, SPSE, SIKAP, EKATALOG, LPSE SUPPORT, BELA PENGADAAN/TOKO DARING dan E-KONTRAK serta telah diimplementasikan kepada seluruh OPD. Salah satu aplikasi yakni SPSE berhasil menayangkan 3598 produk pada katalog lokal.
						Pembinaan dan Advokasi Pengadaan Barang dan Jasa	Jumlah OPD yang mendapatkan pembinaan pengadaan barang dan jasa (Perangkat daerah)	61 opd	61 opd	100	Telah terlaksana pembinaan kepada ASN pengelola PBJ dalam bentuk fasilitasi kegiatan sosialisasi kepada PPK mengenai tatacara perhitungan TKDN dalam pelaksanaan PBJ, serta membuka layanan konsultasi PBJ sebagai bentuk pendampingan/advokasi bagi OPD. Upaya pemenuhan SDM serta pendampingan terhadap para pelaku pengadaan barang/jasa ini dilaksanakan terhadap 61 terdiri dari 29 Dinas/Badan/Kantor, 1 RSUD, 11 Kecamatan, 3 Kelurahan serta 18 Puskesmas.
					Pemantauan Kebijakan Sumber Daya Alam		Jumlah Rekomendasi kebijakan Sumber Daya Alam yang dihasilkan (Rekomendasi)	8 Rekomendasi	2 Rekomendasi	25	Untuk Kegiatan Pemantauan Kebijakan Sumber Daya Alam merupakan kegiatan baru sehingga pada tahun pertama ini masih fokus pada pengumpulan data-data terkait pelaksanaan pemantauan Sumber Daya Alam
			Melaksanakan pengembangan, pengkajian dan Monev terhadap kebijakan perekonomian daerah.			Koordinasi, Sinkronisasi dan Evaluasi Kebijakan Pertanian, Kehutanan, Kelautan, dan Perikanan	Jumlah rekomendasi kebijakan pertanian, kehutanan, kelautan dan perikanan yang dihasilkan (rekomendasi)	4 Rekomendasi	0 Rekomendasi	0	Untuk kegiatan ditahun Pertama ini masih fokus pada pengumpulan data-data terkait Kebijakan, Pertanian, Kehutanan, Kelautan dan Perikanan, adapun solusi pada sub kegiatan ini masih pada tahap koordinasi pada organisasi Perangkat Daerah yang terkait dengan sub kegiatan tersebut
			Melaksanakan pengembangan, pengkajian dan Monev terhadap kebijakan perekonomian daerah.			Koordinasi, Sinkronisasi, dan Evaluasi Kebijakan Pertambangan dan Lingkungan Hidup	Jumlah rekomendasi kebijakan pertambangan dan lingkungan yang dihasilkan (Rekomendasi)	4 Rekomendasi	2 Rekomendasi	50	Untuk kegiatan ditahun pertama ini masih berfokus pada kebutuhan pengumpulan data- data yang diperlukan untuk sub kegiatan ini.

3.4 Kebijakan Strategis yang Ditetapkan

Kebijakan Strategis merupakan suatu proses pembuatan keputusan untuk penentuan tujuan dan cara atau alternatif terbaik dalam mencapai tujuan tersebut yang didasarkan pada siasat/kiat atau strategi tertentu. Ada tiga strategi dalam penyusunan kebijakan yaitu melalui perumusan kebijakan, implementasi kebijakan, dan evaluasi kebijakan. Melalui penyusunan strategi kebijakan diharapkan dapat dicegah terjadinya penyimpangan atau kegagalan dalam pelaksanaan program dan kegiatan. Oleh karena itu agar kebijakan yang diambil menjadi sebuah solusi terhadap berbagai masalah yang dihadapi, maka perlu dirumuskan suatu strategi dalam penyusunan kebijakan tersebut.

Tabel 3.27
Kebijakan Strategis pada Urusan Penunjang)**

No.	Kebijakan Strategis	Dasar Hukum	Tujuan/Masalah yang diselesaikan
(1)	(2)	(3)	(4)
1.	Pemerintah Daerah menyediakan Law Firm Agus Melas and Partner sebagai Jasa Konsultan Hukum Pemerintah Daerah	Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 12 Tahun 2014 tentang Pedoman Penanganan Perkara di Lingkungan Kementerian Dalam Negeri dan Pemerintah Daerah.	1. Memberikan Layanan Konsultasi Hukum atas Permasalahan Hukum Pemerintah Daerah; 2. Mendampingi penanganan perkara hukum Pemerintah Daerah sampai selesai
2.	Penetapan Desa Binaan Sadar Hukum Kabupaten Luwu Timur Tahun 2022	Peraturan Daerah Kabupaten Luwu Timur Nomor 3 Tahun 2015 tentang Desa.	Untuk menumbuhkan kesadaran masyarakat terhadap hukum positif yang berlaku di Indonesia
3.	Penetapan Daftar Penerima Hibah pada Sekretariat Daerah Bagian Kesejahteraan Rakyat Tahun 2022	Peraturan Bupati Luwu Timur Nomor 16 tahun 2021 tentang Tata Cara Penganggaran, Pelaksanaan dan Penatausahaan, Pelaporan dan pertanggungjawaban serta Monitoring dan Evaluasi Hibah dan Bantuan Sosial yang bersumber dari APBD.	1. Meningkatkan Fasilitas Sarana dan Prasarana tempat Ibadah sehingga masyarakat untuk melaksanakan Ibadah.
4.	Penetapan Penerima Beasiswa Daerah Hasil Seleksi Tahun 2022	Peraturan Bupati Luwu Timur Nomor 45 Tahun 2021 tentang Pedoman Bantuan Beasiswa Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Luwu Timur Nomor 76 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Luwu Timur Nomor 45 Tahun 2021 tentang Pedoman Bantuan Beasiswa Daerah.	1. Untuk meningkatkan Akses dan Pemerataan Kesempatan Belajar di Perguruan Tinggi bagi Masyarakat Daerah; 2. Untuk membantu Mahasiswa Kurang mampu untuk mendapatkan kesempatan yang sama dalam pendidikan. 3. Untuk memberikan penghargaan dan Motivasi bagi Mahasiswa Berprestasi agar dapat meraih Prestasi yang lebih tinggi. 4. Untuk memberikan bantuan kepada Mahasiswa Daerah dalam pelaksanaan penelitian dalam rangka tugas Akhir Pendidikannya.

No.	Kebijakan Strategis	Dasar Hukum	Tujuan/Masalah yang diselesaikan
5.	Penetapan Pengelola Gerakan Luwu Timur Jum'at Sedekah pada Sekretariat Daerah	1. Peraturan Pemerintah Nomor 14 Tahun 2014 tentang pelaksanaan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011 tentang Pengeolaan Zakat; 2. Keputusan Sekretaris Daerah Nomor 13/VIII/Tahun 2021 tentang Penetapan Pengelola Gerakan Luwu Timur Jum'at Sedekah pada Sekretariat Daerah Kabupaten Luwu Timur.	
6.	Pembentukan Tim Pembina Usaha Kesehatan Sekolah Kabupaten Luwu Timur.	1. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja. 2. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2010 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan 3. Peraturan Bersama antara MEnteri Pendidikan dan Kebudayaan, Menteri Kesehatan, Menteri Agama dan Menteri Dalam Negeri Nomor 6/X/PB/2014, Nomor 73 Tahun 2014, Nomor 41 Tahun 2014, Nomor 81 Tahun 2014 tentang Pembinaan dan Pengembangan Usaha Kesehatan Sekolah/Madrasah.	Pembinaan dan Pengembangan UKS antar sector dan antar program.
7	Pembentukan Tim Legislasi Produk Hukum Daerah Kabupaten Luwu Timur Tahun Anggaran 2022	Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah	1. Meningkatkan efektivitas penyusunan produk hukum daerah secara sistematis dan terkoordinasi untuk menghasilkan produk hukum yang berkualitas 2. Menyediakan Kebijakan Daerah sesuai dengan kebutuhan Masyarakat.
		Peraturan Bupati Luwu Timur Nomor 5 Tahun 2019 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah Di Lingkungan Pemerintah Daerah	
		Peraturan Bupati Luwu Timur Nomor 80 Tahun 2021 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Luwu Timur Tahun 2022	

3.5 Realisasi Keuangan Perangkat Daerah

Tabel 3.28
Realisasi Keuangan pada Urusan Penunjang)**

NO.	PROGRAM/KEGIATAN			ANGGARAN	REALISASI ANGGARAN		PERMASALAHAN/ KENDALA	SOLUSI DAN REKOMENDASI PERBAIKAN
				(Rp.)	(Rp.)	(%)		
1	2			4	6	7	12	
						(6/5*100)		
5	BELANJA			74,270,997,414.00	66,489,774,928.00	89.52		
01			Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	31,621,714,947.00	27,335,503,009.00	86.45		
	01		Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	104,021,000.00	100,370,800.00	96.49		
		01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	26,715,000.00	25,668,300	96.08	Realisasi maksimal dengan capaian Kinerja output berupa Renja Perubahan 2022 dan Renja Pokok 2023	
		02	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	9,451,000.00	8,676,200	91.80	Realisasi maksimal dengan capaian kinerja output berupa RKA Perubahan 2022, RKA Pokok 2023	
		03	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	7,238,000.00	7,161,900	98.95	Realisasi maksimal dengan capaian kinerja output berupa DPA Pergeseran I 2022, DPA Pergeseran ke II 2022, DPA Perubahan 2022, dan DPA Pokok 2023.	
		04	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	60,617,000.00	58,864,400	97.11	Realisasi maksimal dengan capaian kinerja output berupa terlaksanya Evaluasi Kinerja 12 bulan, Laporan Evaluasi Kinerja 4 Dokumen serta Laporan RKPD 4 Dokumen.	
02			Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	10,712,125,163.00	10,466,303,896.00	97.71		

**LKPJ SEKRETARIAT DAERAH
TAHUN 2022**

NO.			PROGRAM/KEGIATAN	ANGGARAN	REALISASI ANGGARAN		PERMASALAHAN/ KENDALA	SOLUSI DAN REKOMENDASI PERBAIKAN
				(Rp.)	(Rp.)	(%)		
		01	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	58,979,000.00	58,558,000.00	99.29	Realisasi maksimal dengan terlaksananya penatausahaan keuangan Sekretariat Daerah selama 12 bulan dengan Ouput sebanyak 568 SPM-SP2D dengan rincian 1 SPM UP, 30 SPM TU, 70 SPM GU dan Nihil dan sebanyak 467 SPM LS termasuk didalamnya LS Hibah, LS Gaji dan Tunjangan dan LS Pengadaan.	
		02	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/ Semesteran SKPD	59,525,000.00	57,183,240.00	96.07	Realisasi maksimal dengan capaian kinerja output berupa Laporan Realisasi bulanan TA.2022 sebanyak 12 laporan, Laporan Keuangan Akhir Tahun TA. 2021 Laporan Keuangan semester 1 Tahun 2022.	
		03	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	10,593,621,163.00	10,350,562,656	97.71	Realisasi Maksimal dengan capaian kinerja terlaksananya pembayaran gaji sebanyak 81 orang ASN lingkup Sekretariat Daerah dengan Rincian 6 orang Eselon II, 8 orang Eselon III, 4 orang eselon IV, 7 orang Eselon Fungsional PBJ, 21 orang Fungsional Penyetaraan, dan 35 orang staf pelaksana	
	03		Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	103,258,000.00	74,194,710.00	71.85		
		01	Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	103,258,000.00	74,194,710	71.85	Penggunaan Anggaran tidak maksimal terkendala pada kegiatan penilaian Aset Tetap pada Sekretariat Daerah yang tidak dilaksanakan disebabkan tidak adanya kekosongan waktu oleh Tim KPKNL Palopo untuk memenuhi permohonan pelaksanaan penilaian Aset pada Sekretraiat Daerah. Adapun Capaian output yang dihasilkan dari penggunaan Anggaran yang ada adalah tersedianya Laporan Aset Tetap Sekretariat Daerah Tahun 2021 serta penatausahaan aset tetap 2022 diantaranya berupa terlaksananya Penilaian Aset pada Mess Pemda Jakarta sebelum dilakukan pembongkaran. Terlaksananya Lelang Aset Tetap pada Mess Pemda Jakarta. Pelabelan Barang pengadaan Tahun 2022, Pemusnahan BMD pada Mess Pemda Makassar kategori rusak berat (dimakan rayap), Pemusnahan BMD Ruang Bupati dan Ruanagan Wakil Bupati kategori rusak berat (termakan rayap) berdasarkan SK Penghapusan, Penyerahan Hibah Kasur dari Mess Pemda Makassar kepada Mahasiswa Komisariat Angkona.	Akan dilakukan evaluasi dan perbaikan

**LKPJ SEKRETARIAT DAERAH
TAHUN 2022**

NO.			PROGRAM/KEGIATAN	ANGGARAN	REALISASI ANGGARAN		PERMASALAHAN/ KENDALA	SOLUSI DAN REKOMENDASI PERBAIKAN
				(Rp.)	(Rp.)	(%)		
	05		Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	183,103,740.00	142,286,500.00	77.71		
		02	Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	53,283,740.00	43,190,000.00	81.06	Penggunaan Anggaran tidak maksimal disebabkan adanya iuran porsedasi yang tidak terbayarkan karena tidak adanya tagihan namun Capaian output dari penggunaan anggaran yang digunakan adalah laporan Data Administrasi Kepegawaian yang dilaporkan setiap bulan untuk tahun 2022 sesuai dengan perubahan data kepegawaian yang ada yakni data presensi, data kenaikan Gaji Berkala, laporan pendataan Upah Jasa P3K (Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja) dan Laporan Evaluasi Kinerja Upahjasa, Data Upahjasa Penerima Bantuan BPJS Ketenagakerjaan, Data Kepegawaian IKK, Data Pemetaan Pegawai ASN dan Non ASN Lingkup Setda, Data Proyeksi Kebutuhan Pegawai 5 tahun kedepan, Data Survey Penilaian Integritas (SPI)	
		03	Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	21,810,000.00	16,070,000.00	73.68	Sebanyak 5 orang ASN Lingkup sekretariat Daerah telah mengikuti Sosialisasi Srikandi dan Penginputan Anggaran 2023 di Kantor BPKP Makassar, Capaian Anggaran yang tidak maksimal disebabkan karena anggaran sifatnya disiapkan untuk mengikuti Sosialisasi.	Akan dilakukan evaluasi dan perbaikan
		04	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	108,010,000.00	83,026,500.00	76.87	Sebanyak 20 orang ASN Lingkup sekretariat Daerah telah mengikuti Bimbingan Teknis. Anggaran yang tidak maksimal digunakan karena kegiatan ini sifatnya disiapkan.	Akan dilakukan evaluasi dan perbaikan
	06		Administrasi Umum Perangkat Daerah	5,448,256,413.00	4,473,869,742.00	82.12		
		01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	78,995,000.00	72,923,400.00	92.31	Realisasi Maksimal Capaian kegiatan ini adalah tersedianya penerangan listrik di Gedung Kantor Sekretariat Daerah, Rumah Jabatan Bupati, Wakil Bupati dan Rumah Jabatan Sekretaris Daerah serta Gedung Pertemuan dan Panggung Soekarno Hatta.	
		02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	177,750,000.00	177,115,000.00	99.64	Realisasi Maksimal dengan capaian Kinerja Output pada Pengadaan pencetakan Plakat, Sovenir/Cinder Mata Pemda dan Cinder mata Bupati, pengadaan Bendera dan Umbul-umbul yang sudah terlaksana.	

**LKPJ SEKRETARIAT DAERAH
TAHUN 2022**

NO.			PROGRAM/KEGIATAN	ANGGARAN	REALISASI ANGGARAN		PERMASALAHAN/ KENDALA	SOLUSI DAN REKOMENDASI PERBAIKAN
				(Rp.)	(Rp.)	(%)		
		03	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	287,400,000.00	263,226,229.00	91.59	Realisasi Maksimal dengan Capaian Kinerja Output berupa Alat Dapur (Kompor Gas, Kipas Angin Uap dan Dispenser pada Rujab Bupati, Tangga Besi pada Kantor Bupati, Gorden untuk Rujab Bupati dan Ruangan Wakil Kepala Daerah, serta Karpet untuk Mess Pemda Mkassar dan pada Mushallah Rujab Bupati.	
		04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	437,696,779.00	262,551,793.00	59.98	Penggunaan Anggaran kegiatan ini tidak maksimal disebabkan adanya belanja yang tidak digunakan seperti Sewa Kursi dan dekorasi yang disiapkan untuk event di Rumah Jabatan dan Kantor Bupati.	
		05	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	78,155,000.00	53,239,700.00	68.12	Penyerapan Anggaran tidak maksimal karena beberapa belanja tidak terpakai seperti Penyediaan Kartu Lebaran, Kartu Natal, Memo	Akan dilakukan evaluasi dan perbaikan
		06	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang- undangan	340,060,000.00	330,810,000.00	97.28	Realisasi Maksimal dengan Capaian kinerja tersedianya bahan bacaan peraturan perUndang- undangan di Sekretariat Daerah yakni sebanyak 7330 exemplar dalm setahun.	
		07	Fasilitasi Kunjungan Tamu	617,310,000.00	558,962,057.00	90.55	Realisasi maksimal, Kegiatan ini merupakan belanja yang disediakan untuk memfasilitasi tamu-tamu daerah seperti biaya sewa hotel tamu, makan dan minum, makan minum hari-hari besar sehingga anggaran ini sifatnya disediakan.	
		08	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	1,372,233,600.00	1,371,027,563.00	99.91	Realisasi Maksimal, Kegiatan ini merupakan belanja yang disediakan untuk mefasilitasi perjalanan dinas dalam rangka koordinasi para pejabat dan staf lingkup Sekretariat Daerah sebanyak 1258 kali perjalanan	
		09	Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	23,756,000.00	23,660,000.00	99.60	Realisasi Maksimal dengan Capaian Kinerja berupa pengarsipan dokumen arsip aktif dan inaktif.	
			Pengadaan Kendaraan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	2,034,900,034.00	1,360,354,000.00	66.85	Penggunaan Anggaran tidak maksimal disebabkan pengadaan Kendaraan operasional PKK harus inden selama 3 (tiga) bulan sehingga belum bisa diproses pengadaannya pada Tahun 2022.	Akan dilakukan evaluasi dan melanjutkan proses pengadaan barang tersebut.
07			Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	1,968,116,567.00	1,791,987,600.00	91.05		

**LKPJ SEKRETARIAT DAERAH
TAHUN 2022**

NO.			PROGRAM/KEGIATAN	ANGGARAN	REALISASI ANGGARAN		PERMASALAHAN/ KENDALA	SOLUSI DAN REKOMENDASI PERBAIKAN
				(Rp.)	(Rp.)	(%)		
		05	Pengadaan Mebel	428,092,000.00	388,435,610.00	90.74	Realisasi maksimal dengan capaian kinerja output berupa pengadaan Rak Besi dan Meja Rapat di Kantor Bupati, Lemari Pakaian, Pengadaan Cermin dan Matras, serta SpringBed untuk Mess Pemda Makassar, Sofa untuk Ruang Wakil Bupati, Spring Bed untuk Pramusaji Rujab Wakil, Kursi Teras, Meja Tamu Teras dan Sofa untuk Rujab Bupati dan serta pengadaan Lemari Kaca.	
		06	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	1,233,024,567.00	1,099,934,990.00	89.21	Realisasi Maksimal dengan capaian kinerja output berupa pengadaan CCTV, Microphone, LCD Projector/infocus, AC, Kamera Digital, Mesin Babat, Laptop dan Notebook, Scanner, Kamera Digital, Vacuum Cleaner untuk Kantor Bupati. Pengadaan Lampu Kristal Mushallah, Lemari Pendingin untuk Mess Pemda Makassar, Televisi dan Peralatan Audio di ruangan Rapat Bupati, Lemari Es untuk Rujab Wakil Bupati serta Peralatan Studio Sound system, Wireless pada Rujab Bupati serta Komputer dan Laptop pada Kantor Bupati dan Pengadaan Notebook untuk para Asisten dan Kabag Umum serta Bagian Prokopim.	
		09	Pengadaan Gedung Kantor atau bangunan lainnya	307,000,000.00	303,617,000.00	98.90	Realisasi Maksimal dengan capaian kinerja output berupa pembangunan Pagar pada Rumah Jabatan Sekda dan Bangunan tempat parkir pada kantor PBJ.	
	08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	1,509,395,334.00	1,332,267,597.00	88.26		
		01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	17,495,334.00	16,495,334.00	94.28	Realisasi maksimal dengan capaian kinerja pengelolaan Surat Masuk sebanyak 6679 surat dan Surat Keluar sebanyak 1993 surat. Sisa Anggaran adalah peruntukan Belanja paket pengiriman yang tidak terpakai.	
		02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	830,400,000.00	732,022,263.00	88.15	Penyerapan Anggaran tidak maksimal disebabkan karena Belanja Listrik yang diperuntukkan untuk Mess Pemda Jakarta karena masih dalam proses pembangunan sehingga yang dibayarkan hanya biaya beban dan Rumah Jabatan Wakil Bupati juga tidak digunakan maksimal karena kekosongan Jabatan.	Akan dilakukan evaluasi dan perbaikan

**LKPJ SEKRETARIAT DAERAH
TAHUN 2022**

NO.			PROGRAM/KEGIATAN	ANGGARAN	REALISASI ANGGARAN		PERMASALAHAN/ KENDALA	SOLUSI DAN REKOMENDASI PERBAIKAN
				(Rp.)	(Rp.)	(%)		
		04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	661,500,000.00	583,750,000.00	88.25	Penggunaan Anggaran tidak maksimal disebabkan adanya kekosongan tenaga Upah Jasa yakni tenaga lapangan 1 (satu) orang, tenaga administrasi 4 (empat) orang, Cleaning Service kantor Bupati 4 (empat) orang, Tenaga Sopir 2 (dua) orang dan tenaga alat studio 1 (satu) orang.	Akan dilakukan evaluasi dan perbaikan
	09		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	5,696,580,395.00	4,160,326,051.00	73.03		
		01	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	974,805,395.00	597,713,207.00	61.32	Tidak maksimalnya realisasi pada kegiatan ini disebabkan beberapa kendaraan sudah tidak layak pakai (rusak berat) dan beberapa Kendaraan dilakukan Pinjam pakai oleh Polres DP2G sehingga sudah tidak dilakukan pemeliharaan.	Akan dilakukan evaluasi dan perbaikan
		02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Dinas Operasional Lapangan	46,500,000.00	39,917,000.00	85.84	Realisasi maksimal dengan capaian kinerja berupa penyediaan biaya pemeliharaan untuk kendaraan operasional lapangan seperti mobil Truk operasional dan Bus Pemda.	
		03	Pemeliharaan Meubel	105,450,000.00	105,450,000.00	100.00	Realisasi maksimal dengan capaian tersedianya Meubel berupa Meja kursi, Kursi Futura Kantor, Rak Arsip serta Sofa yang sudah dilakukan reparasi.	
		04	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	197,090,000.00	89,403,500.00	45.36	Penyerapan Anggaran yang tidak maksimal disebabkan karena beberapa peralatan kantor pada Kantor Bupati, Mess Pemda Makassar dan Mess Pemda Jakarta belum dilakukan pemeliharaan karena masih dalam proses penyelesaian pengerjaan Rehab.	Akan dilakukan evaluasi dan perbaikan
		05	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	4,372,735,000.00	3,327,842,344.00	76.10	Tidak optimalnya Realisasi disebabkan Pengerjaan Pemeliharaan Gedung Kantor Bupati belum selesai sampai tanggal berakhirnya kontrak sehingga masih menyisakan anggaran 25% dari kontrak, namun capaian kinerja dari kegiatan ini adalah terlaksananya Pemeliharaan Mess Pemda Makassar, Pemeliharaan rumah Jabatan Bupati dan Gedung Pertemuan.	
	11		Administrasi Keuangan dan Operasional Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah	2,633,923,359.00	1,898,561,322.00	72.08		

**LKPJ SEKRETARIAT DAERAH
TAHUN 2022**

NO.			PROGRAM/KEGIATAN	ANGGARAN	REALISASI ANGGARAN		PERMASALAHAN/ KENDALA	SOLUSI DAN REKOMENDASI PERBAIKAN
				(Rp.)	(Rp.)	(%)		
		01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah	546,690,359.00	448,285,252.00	82.00	Tidak Optimalnya Realisasi disebabkan terdapat anggaran yang disediakan untuk Jabatan Wakil Bupati selama 3 bulan terakhir namun Jabatan Wakil Bupati masih kosong hingga berakhirnya periode anggaran.	
		02	Penyediaan Pakaian Dinas dan Atribut Kelengkapan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah	73,500,000.00	36,750,000.00	50.00	Realisasi tidak maksimal karena Belanja kelengkapan atribut yang disiapkan untuk Wakil Bupati tidak digunakan.	
		03	Pelaksanaan Medical Check Up Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah	50,000,000.00	-	-	Anggaran ini sifatnya disediakan untuk Jaminan Pemeliharaan Kesehatan untuk Bupati, Wakil Bupati beserta istri dan 2 (dua) orang anak, Anggaran ini tidak bisa digunakan untuk Rumah sakit Swasta tapi Rumah Sakit Pemerintah, menurut rekomendasi BPK sementara untuk jaminan kesehatan pada Rumah Sakit Pemerintah bisa menggunakan BPJS.	
		04	Penyediaan Dana Penunjang Operasional Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah	1,963,733,000.00	1,413,526,070.00	71.98	Rendahnya Realisasi Anggaran disebabkan tidak terlaksananya rencana Bimtek dan rencana perjalanan dinas Bupati ke Luar Negeri	Akan dilakukan evaluasi dan perbaikan
	12		Fasilitasi Kerumahtanggaan Sekretariat Daerah	1,383,500,000.00	1,092,022,778.00	78.93		
		01	Penyediaan Kebutuhan Rumah Tangga Kepala Daerah	865,000,000.00	779,301,600.00	90.09	Realisasi tidak maksimal disebabkan karena adanya kekosongan tenaga Pramusaji dan Cleaning Service.	
		02	Penyediaan Kebutuhan Rumah Tangga Wakil Kepala Daerah	185,000,000.00	30,000,000.00	16.22	Realisasi tidak maksimal disebabkan karena Belanja Operasional Rujab WKDH dan tenaga Upah Jasa Pramusaji dan CS tidak digunakan.	Akan dilakukan evaluasi dan perbaikan
		03	Penyediaan Kebutuhan Rumah Tangga Sekretariat Daerah	333,500,000.00	282,721,178.00	84.77	Penggunaan Anggaran tidak maksimal disebabkan Uang makan minum piket pada Mess Pemda Jakarta dan Mess Pemda Makassar tidak dibayarkan maksimal karena Mess Makassar masih dalam proses pengerjaan Rehab dan Mess Jakarta dalam proses Pembangunan serta adanya Belanja PBB untuk Mess Pemda Makassar yang tidak terbayarkan untuk Tahun 2022.	Akan dilakukan evaluasi dan perbaikan

**LKPJ SEKRETARIAT DAERAH
TAHUN 2022**

NO.			PROGRAM/KEGIATAN	ANGGARAN	REALISASI ANGGARAN		PERMASALAHAN/ KENDALA	SOLUSI DAN REKOMENDASI PERBAIKAN
				(Rp.)	(Rp.)	(%)		
	13		Penataan Organisasi	974,221,300.00	967,918,603.00	99.35		
		01	Pengelolaan Kelembagaan dan Analisis Jabatan	200,614,800.00	199,512,598.00	99.45	Realisasi maksimal dengan capaian kinerja output berupa Dokumen Jabatan dari seluruh OPD sebanyak 40 OPD dan Peraturan Bupati Kelembagaan sebanyak 7 Perbup yang terdiri dari 6 (enam) Perbup UPT Perubahan dan 1 (satu) Perbup Inspektorat.	
		02	Fasilitasi Pelayanan Publik dan Tata Laksana	106,109,000.00	105,624,000.00	99.54	Realisasi maksimal dengan capaian kinerja output Inovasi Pelayanan Publik dan pengadaan ID Card ASN.	
		03	Peningkatan Kinerja dan Reformasi Birokrasi	174,826,000.00	172,045,018.00	98.41	Realisasi maksimal dengan capaian kinerja output berupa Penguatan pelaksanaan RB Kabupaten Luwu Timur yang diukur dengan indeks Reformasi Birokrasi, adapun nilai dari Menteri PAN mengalami kenaikan yakni dari nilai C ke CC sementara LHE belum diterima	
		04	Monitoring, Evaluasi dan Pengendalian Kualitas Pelayanan Publik dan Tata Laksana	289,529,500.00	288,881,600.00	99.78	Realisasi maksimal dengan capaian output berupa Laporan hasil monev probis dan dokumen SKM (Survey Eksternal Kualitas Pelayanan Publik)	
		05	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Kinerja Pemerintah Daerah	203,142,000.00	201,855,387.00	99.37	Realisasi maksimal dengan capaian kinerja output berupa Nilai Laporan Evaluasi Akuntabilitas Kinerja LAKIP Kabupaten Luwu Timur Tahun 2021 masih tetap dengan nilai B disebabkan Aplikasi E-SAKIP belum berbasis Kinerja tapi masih berbasis Anggaran, sementara LHE juga belum diterima dari Menteri PAN	
	14		Pelaksanaan Protokol dan Komunikasi Pimpinan	905,213,676.00	835,393,410.00	92.29		
		01	Fasilitasi Keprotokolan	351,172,921.00	338,197,611.00	96.31	Realisasi maksimal namun Anggaran yang tersisa adalah Belanja yang disiapkan sesuai dengan permintaan Pimpinan untuk jasa pengawalan.	
		02	Fasilitasi Komunikasi Pimpinan	108,818,449.00	102,903,870.00	94.56	Realisasi maksimal namun Anggaran yang tersisa pada Belanja Perjalanan Dinas disiapkan untuk mengikuti kegiatan Pimpinan.	

**LKPJ SEKRETARIAT DAERAH
TAHUN 2022**

NO.			PROGRAM/KEGIATAN	ANGGARAN	REALISASI ANGGARAN		PERMASALAHAN/ KENDALA	SOLUSI DAN REKOMENDASI PERBAIKAN
				(Rp.)	(Rp.)	(%)		
		03	Pendokumentasian Tugas Pimpinan	445,222,306.00	394,291,929.00	88.56	Realisasi tidak maksimal karena adanya Belanja Cetak yang tidak terlaksana disebabkan kenaikan harga sehingga anggaran yang tersedia tidak mencukupi.	Akan dilakukan evaluasi dan perbaikan
02			PROGRAM PEMERINTAHAN DAN KESEJAHTERAAN RAKYAT	40,688,871,823.00	37,495,823,789.00	92.15		
	01		Administrasi Tata Pemerintahan	478,674,493.00	466,531,775.00	97.46		
		01	Penataan Administrasi Pemerintahan	127,034,953.00	122,132,832.00	96.14	Realisasi Maksimal dengan capaian output terfasilitasinya penyelesaian kasus pengaduan masyarakat dan memfasilitasi penataan administrasi kelurahan dan kecamatan.	
		02	Pengelolaan Administrasi Kewilayahan	162,089,140.00	159,291,026.00	98.27	Realisasi maksimal dengan capaian kinerja output adalah telah dilakukannya penetapan batas desa sebanyak 71 Berita acara hingga pada Triwulan IV dan saat ini pengajuan sebanyak 34 Draf Perbup ke bagian hukum.	
		03	Fasilitasi Pelaksanaan Otonomi Daerah	189,550,400.00	185,107,917.00	97.66	Realisasi maksimal dengan capaian output Penyusunan laporan LPPD, SPM dan RLPPD tahun 2021 hingga pada Triwulan IV dan dilakukannya reviu EKPPD oleh Tim daerah Inspektorat Provinsi.	
	02		Pelaksanaan Kebijakan Kesejahteraan Rakyat	39,366,267,750.00	36,301,952,543.00	92.22		
		01	Fasilitasi Pengelolaan Bina Mental Spiritual	13,648,469,670.00	11,169,926,693.00	81.84	Penggunaan Anggaran kurang maksimal disebabkan terdapat Hibah ke tempat ibadah sebanyak 16 tempat ibadah dan 1 lembaga keagamaan yang tidak terbayarkan terkendala pada regulasi mekanisme pengajuan proposal yang diterima sebelum penetapan KUA-PPAS Perubahan sementara pengajuan proposal yang seharusnya diterima setelah penetapan KUA-PPAS dan Wisata Religi yang tidak terlaksana. Capaian Kinerja yang dihasilkan pada kegiatan ini adalah terlaksananya pembayaran Hibah ke tempat ibadah dan lembaga ibadah sebanyak 25 tempat ibadah yakni 20 mesjid, 2 Gereja, dan 3 Pura, pembayaran Honorarium Petugas Keagamaan ke 3 kelurahan.	Akan dilakukan evaluasi dan perbaikan

**LKPJ SEKRETARIAT DAERAH
TAHUN 2022**

NO.			PROGRAM/KEGIATAN	ANGGARAN	REALISASI ANGGARAN		PERMASALAHAN/ KENDALA	SOLUSI DAN REKOMENDASI PERBAIKAN
				(Rp.)	(Rp.)	(%)		
		02	Pelaksanaan Kebijakan, Evaluasi, dan Capaian Kinerja terkait Kesejahteraan Sosial	3,068,170,460.00	2,576,212,300.00	83.97	Penggunaan Anggaran kurang maksimal disebabkan dari 743 yang ditargetkan untuk menerima Beasiswa Kurang Mampu hanya 635 orang yang lulus seleksi administratif. Capaian Kinerja dari kegiatan ini adalah pembayaran Beasiswa Kurang mampu kepada 332 orang mahasiswa Luwu Timur dari berbagai Universitas di Indonesia.	Wisata Religi tidak teraksana disebabkan Anggran yang tidak mencukupi untuk 36 orang yang lulus seleksi
		03	Pelaksanaan Kebijakan, Evaluasi, dan Capaian Kinerja terkait Kesejahteraan Masyarakat	22,649,627,620.00	22,555,813,550.00	99.59	Realisasi maksimal dengan capaian kinerja output berupa pembayaran Beasiswa ke Mahasiswa Berprestasi sebanyak 5661 orang termasuk hasil seleksi dari Dinas Pendidikan dan Kebudayaan dari Jumlah tersebut terdapat Bantuan Penyelesaian Studi kepada 24 orang Mahasiswa S2 dan S3.	
	03		Fasilitasi dan Koordinasi Hukum	740,162,888.00	630,833,427.00	85.23		
		01	Fasilitasi Penyusunan Produk Hukum Daerah	263,499,498.00	262,408,695.00	99.59	Realisasi maksimal dengan capaian output berupa produk hukum Sampai dengan Triwulan IV, jumlah produk hukum daerah yang ditetapkan melebihi target asumsi. Dari target asumsi sebanyak 400 Dokumen, rancangan produk hukum daerah yang difasilitasi dan dapat ditetapkan sebanyak 460 Dokumen yang terdiri dari 13 Perda, 55 Perbup, dan 393 SK. Meskipun capaian melebihi asumsi, namun masih terdapat rancangan produk hukum daerah yang diusulkan oleh pengampu belum dilakukan koreksi. hal ini disebabkan oleh karena kurangnya tenaga perancang perundang-undangan. selain itu tingkat ketepatan waktu proses penyelesaian suatu produk hukum daerah masih lambat atau tidak sesuai dengan target waktu yang telah ditetapkan.	
		02	Fasilitasi Bantuan Hukum	329,311,140.00	222,822,032.00	67.66	Permasalahan yang dihadapi dalam mencapai target kinerja sub kegiatan ini masih sama TW III. Dengan tidak adanya perkara litigasi yang ditangani sampai berakhirnya tahun anggaran 2022, maka tidak tergambar capaian kinerja sub kegiatan ini sesuai indikator yang telah ditetapkan. Meskipun melalui sub kegiatan ini telah dilakukan banyak aktivitas seperti analisis dan telaah permasalahan hukum, laporan HAM, kajian perundang-undangan, dan layanan konsultasi hukum.	

**LKPJ SEKRETARIAT DAERAH
TAHUN 2022**

NO.			PROGRAM/KEGIATAN	ANGGARAN	REALISASI ANGGARAN		PERMASALAHAN/ KENDALA	SOLUSI DAN REKOMENDASI PERBAIKAN
				(Rp.)	(Rp.)	(%)		
		03	Pendokumentasian Produk Hukum dan Pengelolaan Informasi Hukum	147,352,250.00	145,602,700.00	98.81	Pelaksanaan pendokumentasian produk hukum daerah telah terlaksana dengan baik serta pengelolaan JDIH juga mulai dilaksanakan dengan baik. Namun kegiatan penyebarluasan produk hukum daerah melalui penyuluhan (sosialisasi) langsung kepada masyarakat masih sangat kurang, hal ini perlu diintensifkan agar dapat meningkatkan pengetahuan masyarakat terhadap produk hukum.	
	04		Fasilitasi Kerjasama Daerah	103,766,692.00	96,506,044.00	93.00		
		01	Fasilitasi Kerja Sama Dalam Negeri	89,618,092.00	83,770,044.00	93.47	Realisasi maksimal dengan Capaian Output berupa fasilitasi kerjasama daerah, hingga triwulan IV tahun 2022 yakni sebanyak 56 dokumen, diantaranya 35 dokumen Kesepakatan Bersama, baik dengan daerah lain, instansi vertikal maupun dengan pihak ketiga) dan 21 Perjanjian Kerja sama yang telah dibuat.	
		02	Evaluasi Pelaksanaan kerja sama	14,148,600.00	12,736,000.00	90.02	Realisasi maksimal dengan Capaian Kinerja Output dilakukan evaluasi kesepakatan bersama dengan Universitas Cokroaminoto palopo dan Pihak ketiga yakni Save the children untuk perpanjangan kesepakatan bersama.	
03			PROGRAM PEREKONOMIAN DAN PEMBANGUNAN	1,960,410,644.00	1,658,448,130.00	84.60		
	01		Pelaksanaan Kebijakan Perekonomian	650,219,606.00	433,760,365.00	66.71		
		01	Koordinasi, Sinkronisasi, Monitoring dan Evaluasi Kebijakan Pegelolaan BUMD dan BLUD	493,104,500.00	326,744,061.00	66.26	Anggaran kegiatan untuk penyusunan Rancangan perda BUMD tidak dilaksanakan karena belum ada rekomendasi hasil penilaian dari Kemendagri dan untuk penyesuaian bentuk hukum BUMD masih menunggu petunjuk lebih lanjut dari Biro Hukum Mendagri dan Dirjen Bina Keuangan Daerah. Capaian Output terlaksananya kegiatan koordinasi, sinkronisasi dan Evaluasi BUMD.	Berusaha lebih efektif dan efisien untuk melakukan koordinasi kepada Kemenkumham dan kemendagri agar BUMD Baru yang diusulkan bisa terbentuk dalam tahun 2022 ini.
		02	Pengendalian dan Distribusi Perekonomian	106,729,756.00	84,471,904.00	79.15	Penyerapan Anggaran tidak maksimal disebabkan kegiatan rapat koordinasi terkait pengendalian Inflasi dan rapat koordinasi terkait DBH-CHT dilaksanakan secara virtual. Capaian Output kegiatan ini adalah tersedianya Laporan TPID (Tim Pengendalian Inflasi Daerah), Laporan Realisasi semester II DBH-CHT.	Sering melakukan koordinasi lintas sektor.

**LKPJ SEKRETARIAT DAERAH
TAHUN 2022**

NO.			PROGRAM/KEGIATAN	ANGGARAN	REALISASI ANGGARAN		PERMASALAHAN/ KENDALA	SOLUSI DAN REKOMENDASI PERBAIKAN
				(Rp.)	(Rp.)	(%)		
		03	Perencanaan dan Pengawasan Ekonomi Mikro kecil	50,385,350.00	22,544,400.00	44.74	Penyerapan Anggaran tidak maksimal disebabkan kegiatan rapat koordinasi terkait TPAKD (Percepatan Akses Keuangan Daerah) dilaksanakan secara Virtual. Capaian Output dari kegiatan ini adalah Laporan Tahunan TPAKD.	Sering melakukan koordinasi lintas sektor.
	02		Pelaksanaan Administrasi Pembangunan	171,856,817.00	145,244,825.00	84.52		
		01	Pengendalian dan Evaluasi Program Pembangunan	63,284,743.00	48,345,400.00	76.39	Penyerapan Anggaran tidak maksimal disebabkan tersisa Belanja Perjalanan Dinas ke Jakarta yang direncanakan untuk melakukan koordinasi terkait Dana DAK namun sampai akhir periode undangan Rakor Kemendagri.	
		02	Pengelolaan Evaluasi dan Pelaporan Pelaksanaan Pembangunan	108,572,074.00	96,899,425.00	89.25	Penyerapan Anggaran tidak maksimal disebabkan adanya sisa Anggaran pada Belanja Perjalanan Dinas yang disiapkan untuk perjalanan dinas ke Jakarta melakukan pendampingan Tim PHO atas pembangunan Mess Pemda Lutim di Jakarta. Capaian Output Laporan Proyek Fisik Luwu Timur.	lebih efektif melakukan Rapat koordinasi terhadap Organisasi Perangkat Daerah terkait agar kegiatan ini dapat berjalan sesuai dengan yang diharapkan.
	03		Pengelolaan Pengadaan Barang dan Jasa	1,071,312,796.00	1,040,003,570.00	97.08		
		01	Pengelolaan Pengadaan Barang dan Jasa	214,199,016.00	213,852,860.00	99.84	Realisasi Maksimal dengan Capaian Kinerja Output 1233 paket tender dan pengadaan langsung.	
		02	Pengelolaan Layanan Pengadaan secara Elektronik	764,628,860.00	737,717,300.00	96.48	Realisasi maksima dengan capaian output berupa penerapan aplikasi yang dapat diakses oleh OPD, Pelaku Usaha dan UKM diantaranya aplikasi SPSE yang berhasil menayangkan 3598 produk pada katalog lokal.	
		03	Pembinaan dan Advokasi Pengadaan Barang dan Jasa	92,484,920.00	88,433,410.00	95.62	Telah terlaksana pembinaan kepada ASN pengelola PBJ dalam bentuk fasilitasi kegiatan sosialisasi kepada PPK mengenai tatacara perhitungan TKDN dalam pelaksanaan PBJ, serta membuka layanan konsultasi PBJ sebagai bentuk pendampingan/advokasi bagi OPD.	
	03		Pemantauan Kebijakan Sumber daya alam	67,021,425.00	39,439,370.00	58.85		

**LKPJ SEKRETARIAT DAERAH
TAHUN 2022**

NO.			PROGRAM/KEGIATAN	ANGGARAN	REALISASI ANGGARAN		PERMASALAHAN/ KENDALA	SOLUSI DAN REKOMENDASI PERBAIKAN
				(Rp.)	(Rp.)	(%)		
		01	Koordinasi Sinkronisasi dan Evaluasi kebijakan pertanian, kehutanan, kelautan dan perikanan	25,136,250.00	10,098,500.00	40.18	Rendahnya Realisasi disebabkan pelaksanaan kegiatan masih sementara dilakukan pengumpulan data terkait data terkait kebijakan pertanian, kehutanan, kelautan dan perikanan selanjutnya baru akan dilaksanakan rapat koordinasi.	Masih pada tahap koordinasi pada organisasi Perangkat Daerah yang terkait dengan sub kegiatan tersebut.
		02	Koordinasi, sinkronisasi dan evaluasi kebijakan pertambangan dan lingkungan hidup	41,885,175.00	29,340,870.00	70.05	Rendahnya Realisasi disebabkan pelaksanaan kegiatan masih sementara dilakukan pengumpulan data terkait kebijakan pertambangan dan lingkungan hidup selanjutnya baru akan dilaksanakan rapat koordinasi.	Akan dilakukan koordinasi pada organisasi perangkat daerah yang terkait.
			TOTAL BELANJA	74,270,997,414.00	66,489,774,928.00	89.52		

3.6 Kerjasama Daerah

Mou adalah dokumen perjanjian resmi yang disepakati oleh Pemerintah Kabupaten Luwu Timur dengan pihak ketiga dalam hal ini difasilitasi oleh Bagian Pemerintahan. Nota Kesepahaman merupakan kesepakatan antara pihak untuk berunding dalam rangka membuat perjanjian di kemudian hari, apabila hal-hal yang belum pasti telah dapat dipastikan yang bertujuan untuk mengadakan hubungan hukum sebagai suatu surat yang dibuat oleh salah satu pihak yang isinya memuat kehendak, surat tersebut ditujukan kepada pihak lain dan berdasarkan surat tersebut pihak yang lain diharapkan untuk membuat *letter of intent* yang sejenis untuk menunjukkan niatnya. Pada pihak yang bermaksud mengadakan nota kesepahaman memiliki kewenangan untuk bersama-sama menentukan apa yang akan menjadi isi Nota Kesepahaman. Isi Nota Kesepahaman menggambarkan apa yang dikehendaki oleh kedua belah pihak. Bentuk kerjasama Pemerintah Daerah Kabupaten Luwu Timur dengan lembaga-lembaga vertical maupun bidang pendidikan selama tahun 2022 dapat dilihat apada tabel berikut :

**Tabel 3.29
KERJASAMA ANTAR DAERAH**

No	PERANGKAT DAERAH	INSTANSI MITRA MOU/KERJASAMA	TANGGAL MOU/KERJASAMA	NOMOR MOU/KERJASAMA	PERIHAL MOU/KERJASAMA
1	PEMDA LUWU TIMUR	BPN LUWU TIMUR	3-Jan-22	147.543/01/KSB/PEM-LT/I/2022	PERJANJIAN KERJASAMA TENTANG PERTANAHAN DAN PERINTEGRASIA DATA PERTANAHAN DENAGN PAJAK BUMI DAN BANGUNAN, PERKOTAAN DAN PERDESAAN DAN BEA PEROLEHAN HAK ATAS TANAH DAN BANGUNAN, PENYELESAIAN ASET PEMDA LUWU TIMUR
2	PEMDA LUWU TIMUR	P2KP UNHAS	3-Jan-22	147.543/02/PKS/PEM-LT/I/2022	PERJANJIAN KERJASAMA TENTANG SURVEY EKSTERNAL, KUALITAS PELAYANAN PUBLIK
3	PEMDA LUWU TIMUR	AGUS MELAS DAN PARTNER	6-Jan-22	147.543/04/PKS/PEM-LT/I/2022	PERJANJIAN KERJASAMA TENTANG KONSULTASN HKUM PEMERINTAH KABUPATEN LUWU TIMUR
4	PEMDA LUWU TIMUR	SAVE THE CILDREN	7-Jan-22	147.543/05/PKS/PEM-LT/I/2022	PROGRAM PELINDUNGAN ANAK TERPADU DI KABUPATEN LUWU TIMUR
5	BKPSDM	BPJS KETENAGAKERJAAN	8-Jan-22	147.543/09/PKS/PEM-LT/IV/2022	PERJANJIAN KERJASAMA TENTANG KEPERSERTAAN JAMINAN SOSIAL KETENAGAKERJAAN BAGI TENAGA UPAH JASA DI LINGKUP PEMERINTAH DAERAH KAB LUWU TIMUR
6	PEMDA LUWU TIMUR	MAHKAMAH KONSTITUSI	25-Feb-22	147.543/07/NK/PEM-LT/II/2022	NOTA KESEPAKATAN BERSAMA TENTANG PENINGKATAN PEMAHAMAN PANCASILA DAN HAK KONSTITUSIONAL WARGA NEGARA DI KAB LUWU TIMUR
7	PEMDA LUWU TIMUR	KAB BANTUL PROVINSI ISTIMEWA YOGYAKARTA	4-Mar-22	147.543/08/PKS/PEM-LT/III/2022	PERJANJIAN KERJASAMA TENTANG PENYUSUNAN RENCANA DAN PETA ARSITEKTUR SISTEM PEMERINTAHAN BERBASIS ELEKTRONIK KABUPATEN LUWU TIMUR
8	DINAS KOMINFO	PEMDA LUWU TIMUR	22-Mar-22	147.543/10/PKS/PEM-LT/III/2022	PERJANJIAN KERJASAMA TENTANG PENYUSUNAN RENCANA DAN PETA ARSITEKTUR SISTEM PEMERINTAHAN BERBASIS ELEKTRONIK KABUPATEN LUWU TIMUR
9	PEMDA LUWU TIMUR	KOTA YOGYAKARTA	19-Apr-22	147.543/13/KSB/PEM-LT/IV/2022	KESEPAKTAN BERSAMA TENTANG PENYELENGGARAAN TRANSMIGRASI DI KAB LUWU TIMUR
10	PEMDA LUWU TIMUR	AKADEMI TEKNOLOGI INDUSTRI DEWANTARA PALOPO	20-Apr-22	147.543/11/KSB/PEM-LT/IV/2022	KESEPAKATAN BERSAMA TENTANG PELAKSANAAN TRDIARMA PERGURUAN TINGGI

No	PERANGKAT DAERAH	INSTANSI MITRA MOU/KERJASAMA	TANGGAL MOU/KERJASAMA	NOMOR MOU/KERJASAMA	PERIHAL MOU/KERJASAMA
11	PEMDA LUWU TIMUR	INTITUT KESEHATAN DAN BISNIS KURNIA PERSADA PALOPO	20-Apr-22	147.543/12/KSB/PEM- LT/IV/2022	KESEPAKATAN BERSAMA TENTANG PELAKSANAAN TRDIARMA PERGURUAN TINGGI
12	PEMDA LUWU TIMUR	KOTA SEMARANG, PROVINSI JAWA TENGAH	20-Apr-22	147.543/18/KSB/PEM- LT/V/2022	KESEPAKATAN BERSAMA TENTANG PENYELENGGARAAN TRANSMIGRASI DI KAB LUWU TIMUR TAHUN 2022
13	PEMDA LUWU TIMUR	KAB REMBANG PROVINSI JAWA TENGAH	20-Apr-22	147.543/12.2/KSB/PEM- LT/IV/2022	KESEPAKATAN BERSAMA TENTANG PENYELENGGARAAN TRANSMIGRASI DI KAB LUWU TIMUR TAHUN 2022
14	PEMDA LUWU TIMUR	KAB SRAGEN PROVINSI JAWA TENGAH	20-Apr-22	147.543/12.1/KSB/PEM- LT/IV/2022	KESEPAKATAN BERSAMA TENTANG PENYELENGGARAAN TRANSMIGRASI DI KAB LUWU TIMUR TAHUN 2022
15	PEMDA LUWU TIMUR	KAB KEBUMEN PROVINSI JAWA TENGAH	20-Apr-22	147.543/12.3/KSB/PEM- LT/IV/2022	KESEPAKATAN BERSAMA TENTANG PENYELENGGARAAN TRANSMIGRASI DI KAB LUWU TIMUR TAHUN 2022
16	PEMDA LUWU TIMUR	KOTA SERANG, PROV BANTENG	25-Apr-22	147.543/14/PKS/PEM- LT/IV/2022	PERJANJIAN KERJASAMA TENTANG PELAKSANAAN KEGIATAN PEMBANGUNAN FASILITASI DAN PEMANPATAN PENGEMBANGAN SATUAN PERMUKIMAN MAHALONA
17	PEMDA LUWU TIMUR	PT VALE INDONESIA, Tbk	12-May-22	147.543/15/PKS/PEM- LT/V/2022	PERJANJIAN KERJASAMA TENTANG PEMBANGUNAN FASILITAS RUANG TERBUKA HIJAU BUNDARAN BATARA GURU
18	PEMDA LUWU TIMUR	BALAI LATIHAN KERJA MAKASSAR	17-May-22	147.543/08.1/KSB/PEM- LT/III/2022	KESEPAKATAN BERSAMA TENTANG PENINGKATAN KOMPETENSI TENAGA KERJA MELALUI PELATIHAN BERBASIS KOMPETENSI DAN SERTIFIKASI
19	DISNAKER PEMDA LUWU TIMUR	BALAI LATIHAN KERJA MAKASSAR	17-May-22	147.543/08.2/KSB/PEM- LT/III/2022	PERJANJIAN KERJSAMA TENTANG PENYELENGGARAAN PELATIHAN BERBASIS KOMPETENSI DAN SERTIFIKASI, PEMANFAAT FASILITAS LATIHAN KERJA, DAN PEMBIAYAANKONSUMSI PESERTA PELATIHAN
20	PEMDA LUWU TIMUR	KAB TRANGGALEK PROVINSI JAWA TIMUR	20-May-22	147.543/19/KSB/PEM- LT/V/2022	KESEPAKATAN BERSAMA TENTANG PENYELENGGARAAN TRANSMIGRASI DI KAB LUWU TIMUR TAHUN 2022

No	PERANGKAT DAERAH	INSTANSI MITRA MOU/KERJASAMA	TANGGAL MOU/KERJASAMA	NOMOR MOU/KERJASAMA	PERIHAL MOU/KERJASAMA
21	PEMDA LUWU TIMUR	KAB SLEMAN PROVINSI ISTIMEWA YOGYAKARTA	25-May-22	147.543/29/PKS/PEM- LT/V/2022	PERJANJIAN KERJASAMA (PKS) PENYELENGGARAAN TRANSMIGRASI DISATUAN PERMUKIMAN MAHALONA SKP C SP.1 KAWASAN TRANSMIGRASI DI MAHALONA, KECAMATAN TOWUTI, KAB LUWU TIMUR, PROV. SULSEL
22	PEMDA LUWU TIMUR	KAB BANTUL PROVINSI ISTIMEWA YOGYAKARTA	25-May-22	147.543/24/KSB/PEM- LT/V/2022	PERJANJIAN KERJASAMA (PKS) PENYELENGGARAAN TRANSMIGRASI DISATUAN PERMUKIMAN MAHALONA SKP C SP.1 KAWASAN TRANSMIGRASI DI MAHALONA, KECAMATAN TOWUTI, KAB LUWU TIMUR, PROV. SULSEL
23	PEMDA LUWU TIMUR	KAB KULON PROGO PROVINSI ISTIMEWA YOGYAKARTA	25-May-22	147.543/26/KSB/PEM- LT/V/2022	PERJANJIAN KERJASAMA (PKS) PENYELENGGARAAN TRANSMIGRASI DISATUAN PERMUKIMAN MAHALONA SKP C SP.1 KAWASAN TRANSMIGRASI DI MAHALONA, KECAMATAN TOWUTI, KAB LUWU TIMUR, PROV. SULSEL
24	PEMDA LUWU TIMUR	KOTA SEMARANG, PROVINSI JAWA TENGAH	31-May-22	147.543/31/PKS/PEM- LT/V/2022	PERJANJIAN KERJASAMA (PKS) PENYELENGGARAAN TRANSMIGRASI DISATUAN PERMUKIMAN MAHALONA SKP C SP.1 KAWASAN TRANSMIGRASI DI MAHALONA, KECAMATAN TOWUTI, KAB LUWU TIMUR, PROV. SULSEL
25	PEMDA LUWU TIMUR	KAB REMBANG PROVINSI JAWA TENGAH	31-May-22	147.543/30/PKS/PEM- LT/V/2022	PERJANJIAN KERJASAMA (PKS) PENYELENGGARAAN TRANSMIGRASI DISATUAN PERMUKIMAN MAHALONA SKP C SP.1 KAWASAN TRANSMIGRASI DI MAHALONA, KECAMATAN TOWUTI, KAB LUWU TIMUR, PROV. SULSEL
26	PEMDA LUWU TIMUR	KAB SRAGEN PROVINSI JAWA TENGAH	31-May-22	147.543/14/PKS/PEM- LT/IV/2022	PERJANJIAN KERJASAMA (PKS) PENYELENGGARAAN TRANSMIGRASI DISATUAN PERMUKIMAN MAHALONA SKP C SP.1 KAWASAN TRANSMIGRASI DI MAHALONA, KECAMATAN TOWUTI, KAB LUWU TIMUR, PROV. SULSEL
27	PEMDA LUWU TIMUR	KAB KEBUMEN PROVINSI JAWA TENGAH	31-May-22	147.543/33/PKS/PEM- LT/V/2022	PERJANJIAN KERJASAMA (PKS) PENYELENGGARAAN TRANSMIGRASI DISATUAN PERMUKIMAN MAHALONA SKP C SP.1 KAWASAN TRANSMIGRASI DI MAHALONA, KECAMATAN TOWUTI, KAB LUWU TIMUR, PROV. SULSEL
28	PEMDA LUWU TIMUR	PT.ELEVENIA SINERGI PRIMA NUSANTARA	2-Jun-22	147.543/40/KSB/PEM- LT/VI/2022	KESEPAKATAN BERSAMA TENTANG PENINGKATAN AKSES PASAR UNTUK PRODUK LADA DAN KOMUDITAS UNGGULAN LAINNYA KAB. LUWU TIMUR
29	PEMDA LUWU TIMUR	PT.BOYMAXWEIL INDOJAYA GROUP	2-Jun-22	147.543/41/KSB/PEM- LT/VI/2022	KESEPAKATAN BERSAMA TENTANG PENINGKATAN AKSES PASAR UNTUK PRODUK LADA DAN KOMUDITAS UNGGULAN LAINNYA KAB. LUWU TIMUR

No	PERANGKAT DAERAH	INSTANSI MITRA MOU/KERJASAMA	TANGGAL MOU/KERJASAMA	NOMOR MOU/KERJASAMA	PERIHAL MOU/KERJASAMA
30	PEMDA LUWU TIMUR	KOPERASI 1000 DESA EKSPOR INDONESIA	2-Jun-22	147.543/42/KSB/PEM- LT/VI/2022	KESEPAKATAN BERSAMA TENTANG PENINGKATAN AKSES PASAR UNTUK PRODUK LADA DAN KOMUDITAS UNGGULAN LAINNYA KAB. LUWU TIMUR
31	PEMDA LUWU TIMUR	UKM MENDUNIA FOUNDATION	2-Jun-22	147.543/43/KSB/PEM- LT/VI/2022	KESEPAKATAN BERSAMA TENTANG PENINGKATAN AKSES PASAR UNTUK PRODUK LADA DAN KOMUDITAS UNGGULAN LAINNYA KAB. LUWU TIMUR
32	PEMDA LUWU TIMUR	PT.NUSA BERDAYA INDONESIA	2-Jun-22	147.543/44/KSB/PEM- LT/VI/2022	KESEPAKATAN BERSAMA TENTANG PENINGKATAN AKSES PASAR UNTUK PRODUK LADA DAN KOMUDITAS UNGGULAN LAINNYA KAB. LUWU TIMUR
33	PEMDA LUWU TIMUR	KAB. TANGGAMUS, PROVINSI LAMPUNG	4-Jul-22	147.543/45/KSB/PEM- LT/VII/2022	KESEPAKATAN BERSAMA TENTANG PENYELENGGARAAN TRANSMIGRASI DI KAB LUWU TIMUR TAHUN 2022
34	PEMDA LUWU TIMUR	KAB. PRINGSERUI, PROVINSI LAMPUNG	5-Jul-22	147.543/46/KSB/PEM- LT/VII/2022	KESEPAKATAN BERSAMA TENTANG PENYELENGGARAAN TRANSMIGRASI DI KAB LUWU TIMUR TAHUN 2022
35	PEMDA LUWU TIMUR	UNIVERSITAS COKROAMINOTO PALOPO	26-Jul-26	147.543/47/KSB/PEM- LT/VII/2022	KESEPAKATAN BERSAMA DALAM BIDANG PENDIDIKAN , PENELITIAN, PENGABDIAN MASYARAKAT, KEGIATAN KEMAHASISWAAN, PENINGKATAN SUMBER DAYA MANUSIA, PELATIHAN, PEMBANGUNAN DAERAH DAN IMPLEMENTASI PROGRAM MERDEKA BELAJAR – KAMPUS MERDEKA
36	PEMDA LUWU TIMUR	PEMERINTAH PROV SULSEL	2-Aug-22	147.543/48/KSB/PEM- LT/VIII/2022	KESEPAKATAN BERSAMA TENTANG KELEMBAGAAN DALAM RANGKA FASILITASI PENYELENGGARAAN PENILAIAN POTENSI DAN KOMPETENSI APARATUR SIPIL NEGARA
37	PEMDA LUWU TIMUR	PERPUSTAKAAN NASIONAL	23-Aug-22	147.543/50/KSB/PEM- LT/VIII/2022	KESEPAKATAN BERSAMA TENTANG
38	PEMDA LUWU TIMUR	PT TELKOM INDONESIA	1-Sep-22	147.543/51/KSB/PEM- LT/IX/2022	KESEPAKATAN BERSAMA TENTANG PEMANFAATAN TEKNOLOGI INFORMASI DAN KOMUNIKASI UNTUK MEWUJUDKAN PROGRAM DIGITALISASI DI KABUPATEN LUWU TIMUR
39	PEMDA LUWU TIMUR	LAN MAKASSAR	1-Sep-22	147.543/51/KSB/PEM- LT/IX/2022	KESEPAKATAN BERSAMA TENTANG PENGUATAN KAPASITAS PEMERINTAH KABUPATEN LUWU TIMUR MELALUI PENYELENGGARAAN KEGIATAN ANALISIS KEBIJAKA, PELATIHAN DAN PENGEMBANGAN KOMPETENSI SERTA PENDIDIKAN TINGGI TERAPAN

No	PERANGKAT DAERAH	INSTANSI MITRA MOU/KERJASAMA	TANGGAL MOU/KERJASAMA	NOMOR MOU/KERJASAMA	PERIHAL MOU/KERJASAMA
40	PEMDA LUWU TIMUR	PEMERINTAH PROV SULSEL	26-Sep-22	147.543/55/KSB/PEM- LT/IX/2022	KESEPAKATAN BERSAMA TENTANG BANTUAN DANA SHARING BAGI PESERTA PROGRAM KESEHATAN GRATIS PROVINSI SUL-SEL INTEGRASI KEDALAM PROGRAM JAMINAN KESEHATAN NASIONAL YANG DIDAFTARKAN DAN DIBAYARKAN IURANNYA OLEH PEEMERINTAH DAERAH
41	PEMDA LUWU TIMUR	UNIVERSITAS TERBUKA	8-Oct-22	147.543/62/KSB/PEM- LT/X/2022	KESEPAKATAN BERSAMA TENTANG PENYELENGGARAAN TRI DARMA PERGURUAN TINGGI
42	PEMDA LUWU TIMUR	BANK SULSELBAR	10-Oct-22	147.543/63/ADD- PKS/PEM-LT/X/2022	PERJANJIAN KERJASAMA TENTANG PEMAKAIAN TANAH UNTUK ANJUNGAN TUNAI (ATM)
43	PEMDA LUWU TIMUR	PEMERINTAH PROV SULSEL	11-Oct-22	147.543/64/KSB/PEM- LT/X/2022	KESEPAKATAN BERSAMA TENTANG PENGENDALIAN INFLASI ANTAR DAERAH DI PROVINSI
44	PEMDA LUWU TIMUR	PT MALILI INDUSTRIAL PARK	13-Oct-22	147.543/65/KSB/PEM- LT/X/2022	KESEPAKATAN BERSAMA TENTANG RENCANA KERJASAMA PEMANFAATAN LAHAN PEMBANGUNAN KAWASAN INDUSTRI
45	PEMDA LUWU TIMUR	PT VALE INDONESIA	1-Nov-22	147.543/70/PKS/PEM- LT/XI/2022	PERJANJIAN KERJASAMA TENTAG HIBAH HASIL PENYALURAN TENAGA LISTRIK
46	PEMDA LUWU TIMUR	LAN RI JAKARTA	7-Dec-22	147.543/72/KSB/PEM- LT/XII/2022	KESEPAKATAN BERSAMA TENTANG PENGUATAN KAPASITAS PEMERINTAH KABUPATEN LUWU TIMUR MELALUI PENYELENGGARAAN KEGIATAN ANALISIS KEBIJAKAN, PELATIHAN DAN PENGEMBANGAN KOMPETENSI SERTA PENDIDIKAN TINGGI TERAPAN TAHUN 2022
47	PEMDA LUWU TIMUR	BANK SULSELBAR	8-Dec-22	147.543/73/MOU/PEM- LT/XII/2022	KESEPAKATAN BERSAMA TENTANG PENGEMBANGAN DAN PENGUATAN APLIKASI KONEKSI TRANSAKSI ANTARA REKENING KAS UMUM DAERAH DENGAN APLIKASI DIMDA-NG (DALAM RANGKA OPTIMALISASI PENGELOLAAN KEUANGAN PEMDA LUWU TIMUR
48	PEMDA LUWU TIMUR	BANK SULSELBAR	8-Dec-22	147.543/74/PKS/PEM- LT/XII/2022	PERJANJIAN KERJASAMA TERKAIT PENGEMBANGAN DAN PENGUATAN APLIKASI KONEKSI TRANSAKSI ANTARA REKENING KAS UMUM DAERAH DENGAN APLIKASI DIMDA-NG (DALAM RANGKA OPTIMALISASI PENGELOLAAN KEUANGAN PEMDA LUWU TIMUR

No	PERANGKAT DAERAH	INSTANSI MITRA MOU/KERJASAMA	TANGGAL MOU/KERJASAMA	NOMOR MOU/KERJASAMA	PERIHAL MOU/KERJASAMA
49	PEMDA LUWU TIMUR	DIRJEN PERUMAHAN KEMENTERIAN PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG	21-Dec-22	147.543/75/PKS/PEM- LT/XII/2022	PERJANJIAN KERJASAMA TENTANG NASKAH HIBAH BARANG MILIK NEGARA ANTARA DIRJEN PERUMAHAN PUPR DENGAN PEMDA LUWU TIMUR
50	PEMDA LUWU TIMUR	FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS HASANUDDIN	27-Dec-22	147.543/80/PKS/PEM- LT/XII/2022	PERJANJIAN KERJASAMA TENTANG PELAKSANAAN PENDIDIKAN, PENELITIAN DAN PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT
51	PEMDA LUWU TIMUR	DINKES PEM PROV SULSEL	28-Dec-22	147.543/81/MOU/PEM- LT/XII/2022	KESEPAKATAN BERSAMA TENTANG BANTUAN DANA SHARIN BAGI PESERTA PROGRAM KESEHATAN GRATIS PROVINSI SULSEL INTEGRASI KEDALAM PROGRAM JAMINAN KESEHATAN NASIONAL OLEH PEMDA

Sumber : Bagian Pemerintahan Tahun 2022

